



LAPORAN

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2025



BERGERAK, BERSATU, BERPRESTASI



INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2025

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA 2025

© 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab 1

Dr. Gunawan Suswantoro

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

Penanggung Jawab 2

Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Ketua Tim Pelaksana

Yuni Kusmiati, SH., SE., MH.

Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Wakil Ketua Tim Pelaksana

Dr. H. Amar Ahmad, M.Si

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Anggota

**Mochammad Indra Perkasa | Dina Nur Fitri | Alies Yusefika Ayu Lafifa | Syifa Aulia |
Daniel Sunda | Jarot Suseno | Andhika Pratama Hadi | Tommy Afriandi**

Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Diterbitkan Oleh

Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Didukung Oleh

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda

Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global

Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Badan Pusat Statistik

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV

email : walidata@kemenpora.go.id



DAFTAR SINGKATAN

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
DI	Daerah Istimewa
DKI	Daerah Khusus Ibukota
HITS	Holistik, Integratif, Tematik, Spasial
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda
Kemempora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
KP	Kegiatan Prioritas
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
Pro P	Proyek Prioritas
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
RAD	Rencana Aksi Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSE	<i>Relative Standard Error</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	Sumber Daya Manusia
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Menavigasi Masa Depan: Pemuda sebagai Kekuatan Penggerak Indonesia Emas 2045

Masa depan bangsa tidak diwariskan, ia dibentuk. Di tangan generasi mudalah, arah Indonesia ditentukan. Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2025 ini hadir bukan sekadar sebagai kumpulan angka, melainkan sebagai cermin dan kompas. Ia adalah alat navigasi kita untuk memastikan para pemuda—tulang punggung transformasi bangsa—siap menghadapi tantangan zaman dan merebut peluang.

Saya menyambut baik kenaikan nilai IPP Nasional menjadi 58,33. Ini adalah buah kerja bersama dan sinyal optimisme yang kuat. Terutama, lonjakan pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan menunjukkan bahwa gairah pemuda untuk berkontribusi semakin menyala. Capaian ini memberikan kita optimisme, sekaligus mengarahkan perhatian kita pada area-area yang menjadi prioritas ke depan. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja misalnya, menjadi fokus kita bersama untuk terus ditingkatkan. Data ini menjadi kompas untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja, memastikan setiap potensi pemuda dapat tersalurkan secara optimal.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan IPP 2025, serta kepada semua instansi dan mitra yang terus berperan aktif dalam pelayanan dan pemberdayaan pemuda di berbagai bidang. IPP akan menjadi panduan reflektif dan bahan belajar bersama bagi pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan program yang berpihak pada pemuda secara presisi. Dengan demikian, kebijakan kepemudaan dapat semakin adaptif, merata, dan berdampak nyata dalam memperkuat kapasitas generasi muda di seluruh Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan terkait pelayanan kepemudaan. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dicapai oleh satu sektor saja, melainkan melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan organisasi kepemudaan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan hasil IPP menjadi kebijakan dan program nyata di wilayahnya.

Sinergi lintas sektor, komitmen bersama, dan keberlanjutan aksi nyata merupakan kunci dalam menjawab tantangan pembangunan pemuda ke depan. Mari kita terus memperkuat kolaborasi untuk memastikan setiap pemuda memiliki keterampilan, pengetahuan, dan peluang yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan bangsa.

Dengan semangat kebersamaan, kita melangkah bersama menuju Indonesia Emas 2045, yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.

Jakarta, Desember 2025
**Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia,**

ttd

Pratikno



SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyampaikan Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025 sebagai instrumen penting dalam mengukur capaian dan arah pembangunan kepemudaan di Indonesia. Sejalan dengan visi Presiden untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kelompok pemuda, IPP menjadi cerminan dari sejauh mana negara hadir dalam memastikan pemuda tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

Hadirnya laporan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata dari dinamika kehidupan pemuda Indonesia di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, kepemimpinan, hingga gender serta inklusivitas. Tahun 2025 menjadi momentum penting karena capaian IPP menunjukkan arah baru pembangunan kepemudaan yang semakin terukur dan berorientasi hasil.

Meskipun tren IPP secara nasional terus meningkat, kita masih dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan: ketimpangan antar wilayah, rendahnya partisipasi pemuda, serta lemahnya tata kelola lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan kepemudaan secara komprehensif.

Pembangunan pemuda adalah investasi jangka panjang bangsa. IPP hadir sebagai alat ukur sekaligus kompas kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menilai efektivitas program dan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan pemuda. Capaian IPP tidak hanya menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga menilai sejauh mana pemuda memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif, berinovasi, dan memimpin perubahan sosial. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam merumuskan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) di semua tingkatan pemerintahan.

Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, kita memerlukan koordinasi lintas sektor yang solid. Isu kepemudaan tidak dapat ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja, tetapi harus menjadi gerakan bersama lintas bidang: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, dan ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi melalui Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (RAD-PK), agar pembangunan pemuda menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala daerah untuk menempatkan pembangunan kepemudaan sebagai prioritas strategis dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Kita juga perlu memperkuat komitmen politik (*political will*) dalam menjadikan pembangunan pemuda sebagai agenda utama pembangunan nasional. Pemuda hari ini adalah generasi penentu masa depan bangsa, yang akan memimpin Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tugas kita adalah memastikan mereka memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi publik, serta lingkungan yang mendukung pengembangan potensi dan inovasi.

Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh tim penyusun laporan IPP 2025, kepada Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja keras dan kolaborasi ini menjadi pijakan kuat bagi perumusan kebijakan kepemudaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kehidupan pemuda di seluruh pelosok negeri.

Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali bahwa pembangunan pemuda bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Mari kita jadikan pemuda sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Mari kita wujudkan generasi muda berkarakter gigih, patriotik dan empati yang siap memimpin Indonesia menuju kejayaan di tahun 2045.

Salam Pemuda!
Indonesia Maju!

Jakarta, Desember 2025
**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

ttd

Erick Thohir

SAMBUTAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Salam Pemuda! Maju!

Jejak sejarah dan dinamika global menegaskan peran strategis pemuda sebagai tulang punggung pembangunan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di panggung dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Youth2030: Progress Report 2025 menegaskan bahwa pemuda adalah katalis utama dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemuda bukan sekadar agen perubahan, melainkan arsitek masa depan yang mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui solusi kreatif dan kolaborasi lintas batas (United Nations, 2025). Dengan demikian, menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat, merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan arah pembangunan nasional dan global tetap relevan, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Pemerintah secara konsisten mendorong peningkatan kualitas pemuda, sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 dalam RPJMN 2020-2024, yaitu "Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing." Kerangka ini menargetkan pembentukan generasi yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat, yang mampu bersaing di tengah dinamika global. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mencerminkan kemajuan pembangunan kepemudaan Indonesia dalam lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender. Sepanjang 2020-2024, IPP meningkat dari 51,00 menjadi 58,33, melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 pada tahun 2024. Capaian membanggakan ini menunjukkan peningkatan kolaborasi dan komitmen lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pembangunan kepemudaan, mulai dari kebijakan, program, hingga penyediaan layanan yang relevan dan berkelanjutan.

Tahun 2025 menandai awal fase baru pembangunan nasional jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menjadi landasan strategis menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045: negara maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahap pertama dari visi besar tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Laporan IPP Indonesia Tahun 2025 menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. IPP diharapkan tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penajaman kebijakan untuk memperkuat perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengawasan pembangunan kepemudaan di berbagai tingkat pemerintahan. Lebih dari sekadar angka, IPP menjadi jendela untuk memahami realitas, potensi, dan tantangan yang dihadapi pemuda di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi dasar atas intervensi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Sebagai penutup, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *Laporan IPP Indonesia Tahun 2025*. Semoga publikasi ini menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2025
**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia,**

ttd

Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S.



SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namô Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Laporan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025. Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemuda adalah aset strategis bangsa, penentu arah masa depan, dan motor penggerak kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di masa mendatang. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat dipandang sebagai sektor pelengkap, melainkan sebagai prioritas strategis yang harus terus kita ukur, pantau, dan evaluasi secara berkala.

Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi instrumen yang sangat penting. IPP memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat perkembangan pemuda Indonesia di berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, hingga partisipasi dan kepemimpinan. Melalui IPP, kita dapat melihat seberapa besar peran pemuda dalam pembangunan dan bagaimana kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah mampu menjawab kebutuhan serta tantangan generasi muda.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengukuran IPP karena untuk pertama kalinya metode perhitungan IPP disempurnakan dengan pendekatan baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan relevan dengan kondisi terkini. Metode baru ini tidak hanya menyesuaikan dengan standar pengukuran global, tetapi juga memperkuat integrasi data lintas sektor agar hasilnya lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Perkembangan Pembangunan Pemuda Indonesia selama Tahun 2015-2024 terus mengalami peningkatan. Capaian Tahun 2024 sebesar 58,33 telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67. Rentang capaian daerah berkisar 53,33 hingga 74,83, dan terdapat 23 provinsi yang memiliki capaian IPP di atas capaian nasional. Hal ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memajukan potensi pemuda Indonesia, namun demikian masih ada kesenjangan dan ruang untuk optimalisasi yang perlu diatasi dengan upaya berkelanjutan dan sinergis dari semua pihak terkait

Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen mendukung penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan kepemudaan. Pemerintah daerah harus dapat menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan kepemudaan di lapangan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, hingga pemberdayaan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pembangunan. Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun di tingkat pusat dapat diterjemahkan dalam program nyata di daerah, dengan dukungan data yang akurat dan perencanaan yang terukur.

Penghargaan kami berikan kepada seluruh tim yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memformulasikan buku laporan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025. Semoga pedoman ini dapat dilaksanakan oleh seluruh unsur Pemerintah Daerah guna mencapai pelaporan capaian Indeks Pembangunan Pemuda yang konkret sebagai wujud komitmen daerah yang tinggi terhadap Indeks Pembangunan Pemuda.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2025

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**

ttd

Muhammad Tito Karnavian

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA



Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan data statistik yang berkualitas, memiliki komitmen untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional berbasis data. Salah satu bentuk kontribusi nyata BPS dalam mendukung kebijakan pembangunan sumber daya manusia adalah penyediaan data dasar dan perhitungan indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Indeks ini adalah alat ukur yang menggambarkan kondisi dan kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia melalui lima domain utama: Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi, serta Lapangan dan Kesempatan Kerja. Melalui hasil IPP, pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang partisipasi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Informasi ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pembangunan pemuda sebagai salah satu prioritas strategis.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi sumber informasi statistik, tetapi juga menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan pemuda yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ke depan, BPS akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi kepemudaan, guna memastikan tersedianya data statistik kepemudaan yang akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan zaman

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan pemuda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, November 2025

Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

ttd

Amalia Adininggar Widayanti



Sumber Gambar : canva.com



Sumber Gambar : canva.com

RINGKASAN EKSEKUTIF



Sumber Gambar : canva.com

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah pemuda di Indonesia (usia 16-30 tahun) mencapai sekitar 64,22 juta jiwa atau seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun tidak mendominasi proporsi penduduk Indonesia, namun jumlah pemuda yang cukup besar ini harus menjadi modal besar bagi peningkatan investasi, inovasi, kemajuan dan pembangunan bangsa yang 10 tahun terakhir telah menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat pemantauan kemajuan pembangunan pemuda tersebut.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, namun secara umum tetap mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015, IPP meningkat dari 48,67, menjadi 58,33 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 9,66 poin. Capaian tersebut melampaui target akhir RPJMN 2020–2024 sebesar 57,67. Meski demikian, laju kenaikan IPP tergolong lambat dan kurang signifikan, karena dalam kurun 10 tahun terakhir rata-rata peningkatannya tidak lebih dari 1 poin per tahun. Namun, pencapaian target RPJMN patut diapresiasi sebagai bukti adanya progres nyata dalam pembangunan pemuda di Indonesia.

Capaian pembangunan pemuda antar daerah di Indonesia cukup bervariasi dengan nilai berkisar 53,33 hingga 74,83. Dari 34 Provinsi sebanyak 23 Provinsi memiliki capaian di atas capaian nasional, 1 Provinsi memiliki capaian yang sama dan 10 provinsi memiliki capaian di bawah capaian nasional. Adapun tiga provinsi dengan peningkatan IPP terbesar yakni provinsi Kepulauan Riau, provinsi Bali dan provinsi DKI Jakarta. Secara umum, daerah memiliki keunggulan pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan terutama indikator persentase pemuda korban kejahatan dan memiliki kelemahan pada domain pendidikan terutama indikator angka partisipasi kasar perguruan tinggi, hal ini mayoritas daerah memiliki kecenderungan capaian yang menurun atau stagnan dan di bawah capaian nasional.

Pada periode pembangunan 2025-2029, kerangka kebijakan pembangunan pemuda memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, sehingga di tahun 2024 telah dilakukan peninjauan ulang terhadap IPP untuk memastikan bahwa ukuran tersebut mampu merefleksikan capaian pembangunan pemuda dan mengangkat dinamika situasi pemuda saat ini. Pembaharuan tersebut mencakup struktur, ruang lingkup, indikator penyusun, definisi operasional, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. Dengan adanya perbedaan tersebut maka IPP metode lama tidak dapat diperbandingkan dengan IPP metode baru.



IPP metode baru terdiri dari 3 lapisan pembangunan, lima domain pembangunan pemuda yaitu: 1) domain pendidikan dan pelatihan; 2) domain kesehatan; 3) ketenagakerjaan layak; 4) domain partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) domain inklusivitas dan kesetaraan gender dengan 16 indikator penyusunnya. Metode pengukurannya tidak lagi melalui proses normalisasi data dengan metode desil namun menggunakan metode persentil dan terdapat pembobotan pada setiap indikator maupun domain. Selain itu IPP metode baru dapat diintegrasikan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

Adapun capaian IPP metode baru tahun 2024 sebesar 62,88 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,59. Capaian domain Kesehatan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan domain lainnya yaitu 69,34, kemudian domain pendidikan dan pelatihan sebesar 69,11, domain inklusivitas dan gender sebesar 64,14, domain ketenagakerjaan layak sebesar 63,31 dan yang paling perlu mendapat perhatian adalah domain partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 48,24. Sedangkan pada tingkat provinsi, terdapat sebanyak 17 provinsi dari 38 provinsi memiliki capaian di atas capaian nasional dan 21 provinsi memiliki capaian di bawah capaian nasional.

Senada dengan metode lama, secara umum pada IPP metode baru daerah memiliki keunggulan pada domain kesehatan dan kesejahteraan terutama pada indikator angka kesakitan pemuda dan memiliki kelemahan pada domain partisipasi dan kepemimpinan terutama pada indikator persentase pemuda yang aktif organisasi, hal ini dikarenakan mayoritas daerah masih memiliki capaian di bawah capaian nasional.

Mengingat IPP metode baru telah ditetapkan sebagai tolok ukur pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, maka diperlukan a) penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan; b) Pemerintah daerah yang telah memiliki RAD perlu segera melakukan penyesuaian program/intervensi dan target capaian, sedangkan daerah yang belum menyusun diharapkan segera menyusunnya sesuai amanat Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal; c) Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui asistensi teknis dan pemantauan berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif; dan d) Peran aktif setiap pemangku kepentingan dalam menjaga konsistensi capaian, serta mendorong peningkatan capaian pada domain yang masih lemah melalui program/kegiatan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan; e) membangun kesadaran, komitmen dan political will agar kebijakan dan program kepemudaan menjadi agenda strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	ii
SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	iii
SAMBUTAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI	iv
SAMBUTAN MENTERI PPN / BAPPENAS	v
SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI	vi
SAMBUTAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

1	BAB	1.1	Pembangunan Pemuda Indonesia	2
	01	1.2	Demografi dan Sebaran Pemuda di Indonesia	3
		1.3	Pengukuran Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia	5
		1.4	Alur Proses Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda	10
		1.5	Sistematika Penulisan	13
	PENDAHULUAN			

15	BAB	2.1	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda	16
	02	2.2	Indeks Pembangunan Pemuda di 34 Provinsi Tahun 2024	22
		2.3	Tantangan Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda	25
	DINAMIKA CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA			

27	BAB	3.1	Provinsi Aceh	28
	03	3.2	Provinsi Sumatera Utara	29
		3.3	Provinsi Sumatera Barat	30
		3.4	Provinsi Riau	31
		3.5	Provinsi Jambi	32
		3.6	Provinsi Sumatera Selatan	34
		3.7	Provinsi Bengkulu	35
		3.8	Provinsi Lampung	36
		3.9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
		3.10	Provinsi Kepulauan Riau	39
		3.11	Provinsi DKI Jakarta	41
	PROFIL INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA DI 34 PROVINSI			



3.12	Provinsi Jawa Barat	43
3.13	Provinsi Jawa Tengah	44
3.14	Provinsi DI Yogyakarta	45
3.15	Provinsi Jawa Timur	47
3.16	Provinsi Banten	49
3.17	Provinsi Bali	50
3.18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	52
3.19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	54
3.20	Provinsi Kalimantan Barat	56
3.21	Provinsi Kalimantan Tengah	57
3.22	Provinsi Kalimantan Selatan	58
3.23	Provinsi Kalimantan Timur	59
3.24	Provinsi Kalimantan Utara	60
3.25	Provinsi Sulawesi Utara	61
3.26	Provinsi Sulawesi Tengah	63
3.27	Provinsi Sulawesi Selatan	64
3.28	Provinsi Sulawesi Tenggara	66
3.29	Provinsi Gorontalo	68
3.30	Provinsi Sulawesi Barat	69
3.31	Provinsi Maluku	70
3.32	Provinsi Maluku Utara	71
3.33	Provinsi Papua Barat	72
3.34	Provinsi Papua	74

75

BAB

04

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA METODE BARU

4.1	Sekilas tentang IPP Metode Baru	76
4.2	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru	83

87

BAB

05

PENUTUP

5.1	Kesimpulan	88
5.2	Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Metadata Indikator IPP.....	8
Tabel 1.2	Batas Minimum dan Batas Maksimum indikator IPP.....	11
Tabel 2.1	IPP 34 Provinsi Tahun 2023 dan 2024	22
Tabel 2.2	Capaian Domain IPP pada 34 Provinsi	24
Tabel 3.1	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Aceh.....	28
Tabel 3.2	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Utara.....	29
Tabel 3.3	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Barat.....	30
Tabel 3.4	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Riau	31
Tabel 3.5	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jambi.....	32
Tabel 3.6	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Selatan.....	34
Tabel 3.7	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Bengkulu.....	35
Tabel 3.8	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Lampung.....	37
Tabel 3.9	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Bangka Belitung.....	38
Tabel 3.10	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kepulauan Riau.....	39
Tabel 3.11	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi DKI Jakarta.....	41
Tabel 3.12	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Barat.....	43
Tabel 3.13	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Tengah.....	44
Tabel 3.14	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi DI Yogyakarta.....	46
Tabel 3.15	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Timur.....	48
Tabel 3.16	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Banten.....	49
Tabel 3.17	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Bali.....	51
Tabel 3.18	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	53
Tabel 3.19	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	55
Tabel 3.20	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Barat	56
Tabel 3.21	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Tengah.....	57
Tabel 3.22	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Selatan.....	58
Tabel 3.23	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Timur.....	59
Tabel 3.24	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Utara.....	60
Tabel 3.25	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Utara.....	62
Tabel 3.26	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Tengah.....	63
Tabel 3.27	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Selatan.....	65
Tabel 3.28	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	67
Tabel 3.29	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Gorontalo.....	68
Tabel 3.30	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Barat.....	69
Tabel 3.31	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Maluku.....	70
Tabel 3.32	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Maluku Utara.....	71
Tabel 3.33	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Papua Barat.....	73
Tabel 3.34	Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Papua.....	74
Tabel 4.1	Domain dan Indikator IPP Metode Baru	77
Tabel 4.2	Nilai Minimum dan Maksimum pada IPP Metode Baru	82
Tabel 4.3	Capaian IPP Metode Baru Tahun 2024 per Provinsi	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Pemuda Indonesia 2020-2024.....	4
Gambar 1.2	Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	5
Gambar 1.3	Alur proses perhitungan IPP	10
Gambar 2.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2024.....	16
Gambar 2.2	Perkembangan Domain Indeks Pembangunan Pemuda	16
Gambar 3.1	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Aceh Tahun 2022-2024	28
Gambar 3.2	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024	29
Gambar 3.3	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024	30
Gambar 3.4	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2022-2024	31
Gambar 3.5	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2022-2024	32
Gambar 3.6	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024	34
Gambar 3.7	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024	35
Gambar 3.8	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2022-2024	36
Gambar 3.9	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024	38
Gambar 3.10	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	39
Gambar 3.11	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024	41
Gambar 3.12	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024	43
Gambar 3.13	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024	44
Gambar 3.14	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2022-2024	45
Gambar 3.15	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024	47
Gambar 3.16	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Banten Tahun 2022-2024	49
Gambar 3.17	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bali Tahun 2022-2024	50
Gambar 3.18	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024	52
Gambar 3.19	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024	54
Gambar 3.20	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022-2024	56
Gambar 3.21	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024	57
Gambar 3.22	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	58
Gambar 3.23	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024	59
Gambar 3.24	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024	60
Gambar 3.25	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024	61
Gambar 3.26	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024	63
Gambar 3.27	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024	64
Gambar 3.28	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024	66
Gambar 3.29	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024	68
Gambar 3.30	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024	69
Gambar 3.31	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Tahun 2022-2024	70
Gambar 3.32	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024	71
Gambar 3.33	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024	72
Gambar 3.34	Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2022-2024	74
Gambar 4.1	Perbedaan IPP metode lama dan IPP metode baru.....	79
Gambar 4.2	Tahapan pengukuran IPP	80
Gambar 4.3	SOP Penghitungan Estimasi Indikator Pembentuk IPP	81
Gambar 4.4	Capaian IPP Tahun 2020-2024 Metode Baru	83
Gambar 4.5	Perkembangan Domain Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru	84





BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi pembangunan pemuda Indonesia, demografi dan sebaran pemuda di Indonesia, pengukuran capaian pembangunan pemuda Indonesia, alur proses perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda dan sistematika penulisan



1.1 PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA

Indonesia saat ini tengah berada dalam periode bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Periode bonus demografi ini memberikan peluang historis bagi negara untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Namun, potensi besar ini tidak akan terwujud secara otomatis. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok pemuda. Pemuda (usia 16–30 tahun) adalah motor utama dari populasi usia produktif. Mereka adalah generasi yang akan mewarisi kepemimpinan, memegang kendali inovasi, dan menjadi pelaku utama dalam sektor ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, pembangunan pemuda bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan sebuah investasi strategis dan prasyarat mutlak untuk menyongsong masa depan Indonesia yang unggul. Pembangunan pemuda harus difokuskan pada lima dimensi utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Dengan memastikan bahwa setiap pemuda memiliki akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya untuk berkembang, kita dapat mengubah potensi demografi menjadi kekuatan riil yang mendorong kemajuan bangsa.

Peran dan tantangan pemuda semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Isu-isu kepemudaan yang harus dicermati dalam beberapa tahun ke depan antara lain berkaitan dengan partisipasi pemuda dalam struktur ekonomi, peningkatan kualitas SDM dan angkatan kerja, serta pembangunan infrastruktur menuju transformasi ekonomi digital (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (56,98 persen), sementara sekitar 7,95 persen pemuda berstatus pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kualitas SDM terutama dilihat dari capaian pendidikan dan kesehatannya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. hanya terdapat 28 dari 100 orang pemuda yang masih bersekolah. Terkait kesehatan, sekitar 17,99 persen pemuda mengalami keluhan kesehatan, dengan tingkat kesakitan sebesar 6,80 persen (Badan Pusat Statistik, 2024).



Berdasarkan klasifikasi desa, akses internet oleh pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan (97,79 persen berbanding 92,36 persen) (Badan Pusat Statistik, 2024). Data tersebut menggambarkan bahwa layanan infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal keterampilan penggunaan teknologi, Pada tahun 2024, proporsi anak muda Indonesia usia 15-24 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer/TIK sebesar 95,51 persen (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memegang peran sentral sebagai koordinator utama dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia. Kebijakan Kemenpora dirancang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Pada periode 2020-2024, terdapat beberapa Proyek Prioritas (Pro-P) berdasarkan Kegiatan Prioritas (KP3) Peningkatan Kualitas Pemuda dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, Pencegahan Perilaku Berisiko, serta Partisipasi Aktif Sosial dan Politik (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2021).

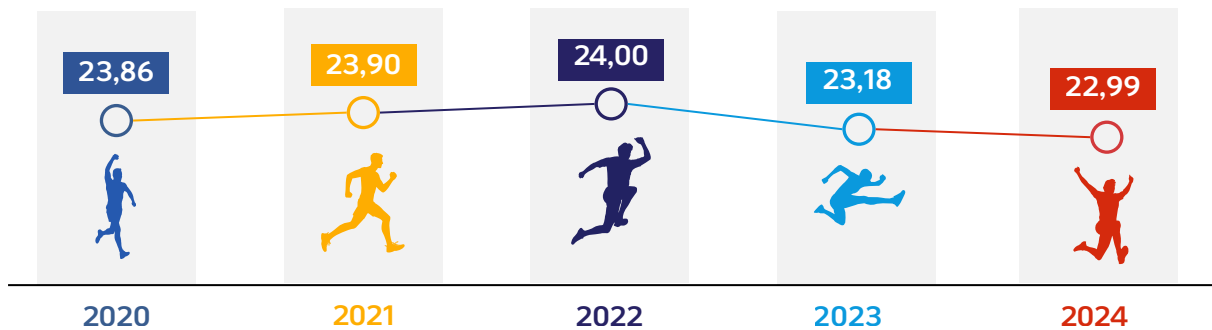
Salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan pemuda dalam suatu negara. Dengan memperhatikan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda, Indonesia dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda secara menyeluruh.

1.2 DEMOGRAFI DAN SEBARAN PEMUDA



Peningkatan kualitas pemuda menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan pemuda diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Urgensi pemerintah fokus dalam pembangunan kualitas manusia karena pemuda pemegang tongkat estafet bangsa dan penentu optimalisasi adanya bonus demografi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun, sehingga pada tahun 2024 yang termasuk dalam golongan usia pemuda adalah mereka yang lahir pada tahun 1994-2008. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, jumlah pemuda diperkirakan sekitar 64,22 juta jiwa dengan persentase 22,99 persen di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024). Jumlah pemuda yang lebih dari seperlima jumlah penduduk Indonesia menjadi aset penting dan menjadi kekuatan bangsa apabila dipersiapkan dengan baik.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase jumlah pemuda di Indonesia mengalami tren yang relatif menurun dari sebesar 23,86 persen di tahun 2020 menjadi 22,99 persen di tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Penurunan persentase pemuda ini sejalan dengan angka kelahiran total yang relatif turun sesuai dengan data Sensus Penduduk (SP) dan *Long Form* SP2020 BPS (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1.1 Persentase Pemuda Indonesia 2020-2024 (sumber BPS, Statistik Pemuda Indonesia 2024)

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase pemuda perempuan adalah sebesar 49,40 persen dari total jumlah keseluruhan pemuda dan persentase jumlah pemuda laki – laki adalah sebesar 50,60 persen dari jumlah keseluruhan pemuda. Dari data tersebut, perbedaan jumlah pemuda laki-laki dan perempuan tidak signifikan, dengan besaran selisih 1,20 persen. Hal tersebut juga terlihat dari *Sex Ratio* Pemuda 102,44 yang artinya dari 100 pemuda perempuan terdapat sekitar 102 pemuda laki - laki. Perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang tipis, diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan gender.

Melihat persebaran pemuda pada masing-masing provinsi, persebaran pemuda tertinggi ada di wilayah timur yaitu Provinsi Maluku (27,60 persen), Maluku Utara (27,40 persen). Kemudian diikuti Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,35 persen), Papua Barat (26,65 persen) dan Sulawesi Tenggara (26,59 persen). Mayoritas provinsi-provinsi memperoleh persebaran pemuda di atas rata-rata nasional yaitu (22,99 persen). Selain itu, tingkat persebaran pemuda terendah, yaitu Provinsi Jawa Tengah (21,63 persen), Jawa Timur (21,63 persen) dan Jambi (21,49 persen) (Badan Pusat Statistik, 2024).

Hidup di kota masih menjadi pilihan bagi para pemuda, dilihat dari data klasifikasi tempat tinggal terdapat 60,72 persen yang hidup di kota dibandingkan di desa hanya 39,28 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Para pemuda memilih hidup di kota dapat dikarenakan adanya kelengkapan fasilitas, sarana, prasarana serta ketersediaan infrastruktur. Selain itu, kota merupakan pusat perekonomian yang menjadi daya tarik pemuda untuk mencari penghidupan lebih baik.

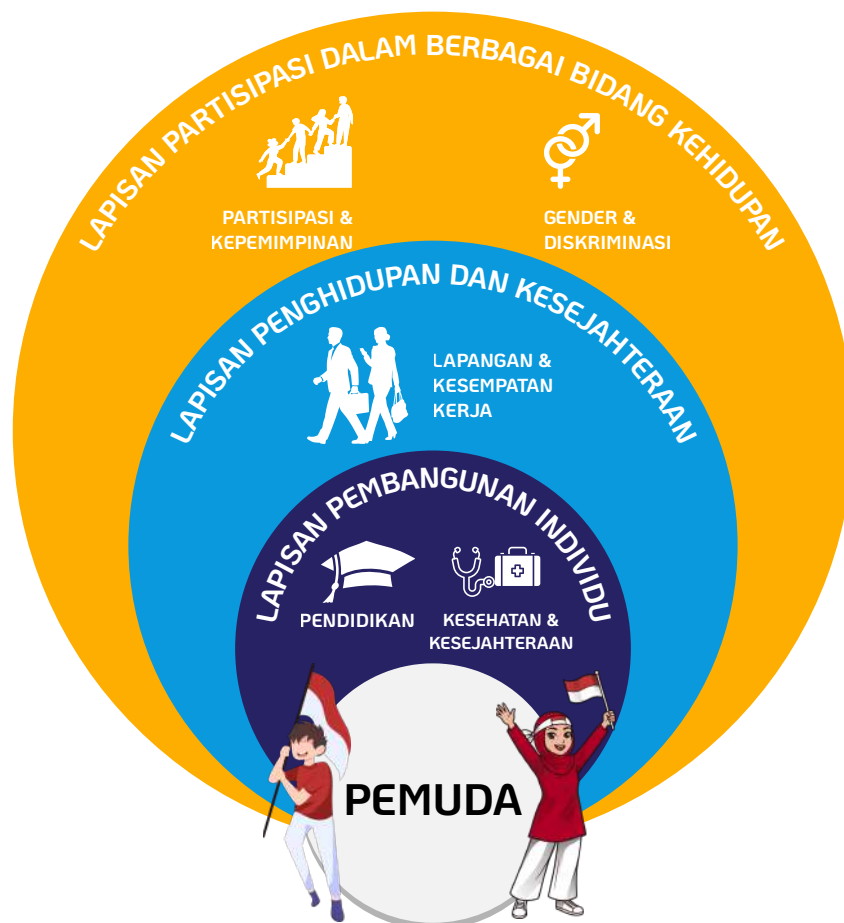
Tahun 2024, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan persentase pemuda terbanyak di Indonesia dengan persentase hampir separuh yaitu 54,71 persen dari keseluruhan jumlah pemuda. Persentase perkembangan persebaran pemuda di Pulau Jawa mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 persentase pemuda di Pulau Jawa mencapai 55,11 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal demikian dapat terjadi dikarenakan pemerintah mulai melakukan pembangunan di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menarik para pemuda untuk tinggal di luar Pulau Jawa. Faktor lain yang mendasari pemuda melakukan migrasi adalah perkawinan. Pasangan dari dua daerah yang berbeda cenderung akan melakukan migrasi.

Dalam waktu lima tahun, tren pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin bertolak belakang. Persentase pemuda yang berstatus kawin menurun dari 38,85 persen pada tahun 2020 menjadi 29,10 persen pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Sedangkan, persentase pemuda dengan status belum kawin mengalami kenaikan, di tahun 2024 sebesar 69,75 persen dan pada tahun 2020 sebesar 59,82 persen. Adanya tren ini menunjukkan adanya pergeseran usia perkawinan muda di Indonesia. Selain itu, terdapat 6,33 persen pemuda yang menjadi KRT (Kepala Rumah Tangga) dalam rumah tangganya. Sebanyak 74,32 persen pemuda tinggal bersama dengan keluarga (Badan Pusat Statistik, 2024).

1.3 PENGUKURAN CAPAIAN PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya.

Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

a. Lapisan Pembangunan Individu

Pembangunan individu merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan individu dalam menjalani kehidupan. Dalam Indeks Pembangunan Pemuda, lapisan pembangunan individu mencakup domain pendidikan dan domain kesehatan, dan kesejahteraan, yang merupakan dua pilar utama dalam memenuhi kebutuhan dasar pemuda.

Pendidikan berperan sebagai fondasi dalam membangun kapasitas intelektual dan keterampilan individu. Dengan akses yang memadai terhadap Pendidikan yang berkualitas, pemuda dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pendidikan, pemuda juga dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan berpikir kritis yang penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Domain Pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah, dan angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi.

Kesehatan juga menjadi aspek penting dalam pembangunan individu. Kesehatan yang baik memungkinkan pemuda untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Dukungan terhadap akses kesehatan yang merata dan terjangkau membantu pemuda untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka. Selain itu, lingkungan publik yang aman juga berkontribusi pada kesejahteraan individu dengan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai tujuan hidup tanpa gangguan dari lingkungan sekitar. Adapun domain kesehatan dan kesejahteraan mencakup pada 4 (empat) indikator, yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil.



Sumber Gambar : presidenri.go.id

b. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan pemuda menjadi aspek penting dalam memperkuat pondasi masa depan suatu bangsa. Perlu dipahami bahwa pemuda merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kualitas penghidupan dan kesejahteraan pemuda dilihat dari meningkatnya akses terhadap lapangan kerja dan kesempatan kerja. Lapangan kerja yang memadai tidak hanya mencakup pada jumlah lapangan kerja yang ada, namun mencakup kualitas pekerjaan serta upah yang layak. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang merata menjadi aspek penting karena dapat membuka kesempatan kerja bagi pemuda dari berbagai latar belakang.

Pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu aspek penting dari strategi pembangunan lapangan kerja bagi pemuda. Hal ini dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara. Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berisi satu domain yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja. Ada dua indikator yang diambil dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas untuk melihat domain ini, yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Pengangguran terbuka terjadi apabila pemuda yang memiliki kemampuan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau preferensinya. Dalam hal ini, wirausaha kerah putih dapat mengambil peran untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan kerja baru.

c. Lapisan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Pemuda merupakan agen perubahan yang potensial dalam masyarakat. Partisipasi pemuda mencakup berbagai aktivitas, seperti kegiatan sosial, politik, hingga ekonomi. Ketika pemuda dapat berpartisipasi secara aktif, mereka dapat membawa energi positif, gagasan serta perspektif baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Sebagai lapisan terluar dalam kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), terdapat dua domain yaitu partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai bidang kegiatan dapat menjadi satu tolok ukur pembangunan. Partisipasi pemuda mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran akan isu-isu masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam suatu organisasi, seperti organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok sukarela dapat memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kolaborasi, dan komunikasi. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat.

Kesenjangan gender dapat menghambat perkembangan kualitas pemuda secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan secara adil dan setara terhadap setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Diskriminasi dapat menghambat partisipasi pemuda, terutama bagi mereka yang menghadapi stereotip atau hambatan berbasis gender. Kesetaraan gender harus mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan. Dalam domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator, yaitu angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Tabel 1.1 Ringkasan Metadata Indikator IPP

DOMAIN	NO	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
Pendidikan	X1	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Susenas Kor, BPS
	X2	APK Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	Susenas Kor, BPS
	X3	APK Perguruan Tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	Susenas Kor, BPS
Kesehatan dan Kesejahteraan	X4	Angka Kesakitan Pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Susenas Kor, BPS
	X5	Persentase Korban Kejahatan	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Susenas Kor, BPS
	X6	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Susenas Kor, BPS
	X7	Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun	Susenas Kor, BPS
Lapangan dan Kesempatan Kerja	X8	Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan keras putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun	Sakernas, BPS
	X9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16–30 tahun	Sakernas, BPS

Tabel 1.1 Ringkasan Metadata Indikator IPP (Lanjutan)

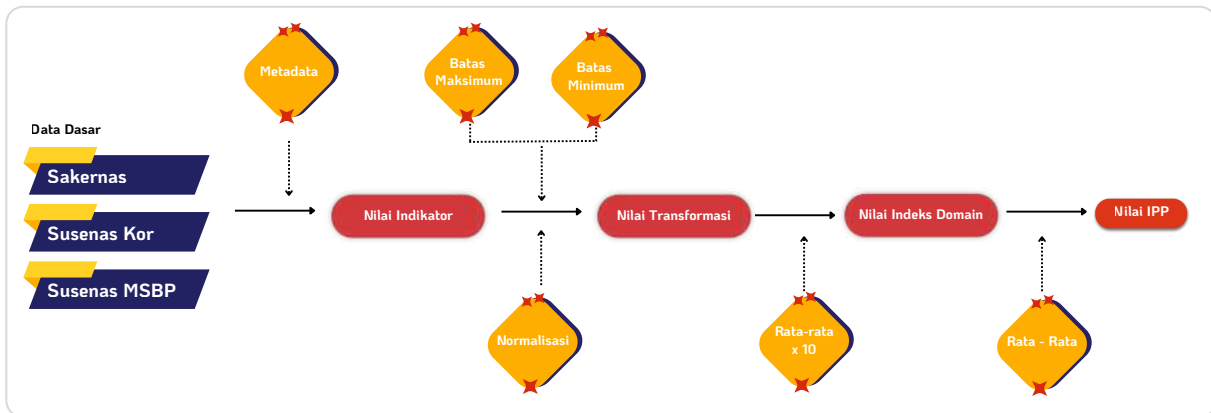
DOMAIN	NO	INDIKATOR	DEFINISI	SUMBER DATA
Partisipasi dan Kepemimpinan	X10	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP, BPS
	X11	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP, BPS
	X12	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan Pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Susenas MSBP, BPS
Gender dan Diskriminasi	X13	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	Susenas Kor, BPS
	X14	Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Susenas Kor, BPS
	X15	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Sakernas, BPS



Sumber Gambar : canva.com

1.4 ALUR PROSES PERHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Secara umum, proses perhitungan IPP dilakukan dengan mengikuti langkah langkah seperti terlihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut :



Gambar 1.3 Alur proses perhitungan IPP

a. Menetapkan Nilai Transformasi Indikator

Untuk menghitung nilai IPP, langkah pertama setelah mendapatkan data dasar sesuai metadatanya adalah nilai setiap indikator perlu dinormalkan dan distandarkan dengan mengubah nilai indikator menjadi nilai skor indikator. Konversi ini dilakukan dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum yang telah ditetapkan. Dalam menentukan nilai batas maksimal/minimal ini, digunakan standar resmi batas maksimal dan minimal pada beberapa indikator, seperti indikator rata-rata lama sekolah yang ditargetkan oleh PBB yang mencapai angka 15 tahun (bersekolah hingga lulus SMA/ sederajat).

Sementara itu, untuk indikator yang tidak memiliki standar, penentuan nilai batas maksimal/minimal dilakukan dengan menggunakan nilai maksimal/ minimal data empiris (sebaran data setiap provinsi) yang ditambahkan dengan dua kali nilai standar deviasi. Khusus untuk data TPT, penentuan nilai batas dilakukan dengan mengacu pada nilai TPT pemuda Arab Saudi yang merupakan negara dengan TPT tertinggi di dunia pada 2015. Tabel 1.2 menampilkan nilai batas maksimal dan minimal untuk setiap indikator penyusun IPP, termasuk sumber penentuan standar tersebut.



Sumber Gambar : canva.com

Tabel 1.2 Batas Minimum dan Batas Maksimum Indikator IPP

NO	INDIKATOR	BATAS MINIMUM	BATAS MAKSIMUM	DASAR PENENTUAN BATAS MIN & MAKS
1	Rata-rata Lama Sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM
2	APK Sekolah Menengah	0	100 (target)	Standar
3	APK Perguruan Tinggi	0	100 (target)	Standar
4	Angka Kesakitan Pemuda	0 (target)	20	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
5	Persentase Korban Kejahatan	0 (target)	3	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
6	Persentase Pemuda yang Merokok	0 (target)	36	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
7	Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil	0 (target)	45	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi 2015
10	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
11	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	0	45 (target)	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
12	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	0	25 (target)	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	33	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi
14	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas	25	100 (target)	Standar
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai Maksimum + 2 standar deviasi

Sumber : Laporan IPP 2019

Nilai maksimal untuk indikator yang semakin tinggi nilainya maka semakin baik (bersifat positif) atau sebaliknya nilai minimal untuk indikator yang semakin kecil nilainya maka semakin baik (bersifat negatif) merupakan sasaran yang harus dicapai agar nilai IPP mendekati angka ideal, yaitu 100.

Dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum, nilai indikator penyusun IPP dinormalkan dan distandarkan untuk menghasilkan nilai transformasi indikator. Melalui metode ini, setiap nilai indikator diubah sehingga memiliki skala antara 0 hingga 1, yang relatif terhadap keseluruhan set data (batas minimum dan batas maksimum). Proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat positif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Skor Indikator}_{ji} = \frac{\text{Nilai Indikator}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}{\text{Batas Maksimum}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}$$

Sedangkan proses normalisasi untuk indikator (i) yang bersifat negatif pada domain (j) dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Skor Indikator}_{ji} = 1 - \frac{\text{Nilai Indikator}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}{\text{Batas Maksimum}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}$$

Proses ini kemudian dilanjutkan dengan mengubah nilai indikator dalam bentuk desil untuk mendapatkan nilai indikator transformasi. Dengan kata lain, skor indikator yang merupakan nilai *continuous* diubah menjadi nilai diskrit dalam 10 kelompok nilai (terendah=1 dan tertinggi=10). Secara umum jarak antara dua kelompok desil dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$\Delta D = \frac{\text{Batas Maksimum}_{ji} - \text{Batas Minimum}_{ji}}{10}$$

Sebagai contoh pada indikator TPT pemuda, maka jarak antara dua kelompok desilnya adalah 2,8 persen [(28-0)/10]. Oleh karena indikator TPT pemuda bersifat negatif sehingga nilai 0 s.d kurang dari 2,8 memiliki nilai transformasi 10 dan seterusnya. Contoh lain, untuk indikator persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas, memiliki jarak antar desil sebesar 7,5 [(100-25)/10]. Oleh karena indikator tersebut bersifat positif maka nilai 25 s.d kurang dari 32,5 memiliki nilai transformasi 0, dan seterusnya.

b. Menghitung Nilai Indeks Domain

Setelah mendapatkan nilai transformasi indikator, maka proses berikutnya adalah menghitung nilai indeks domain. Nilai indeks domain j dapat dihitung berdasarkan rata-rata nilai transformasi indikator (NTI) pada domain j lalu dikalikan 10 sehingga menghasilkan nilai indeks domain antara 10-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:

$$\text{Indeks Domain}_j = \frac{\text{NTI}_1 + \text{NTI}_2 + \dots + \text{NTI}_n}{n} \times 10$$

dengan n merupakan jumlah indikator setiap domain

Dalam perhitungan nilai indeks domain, persamaan di atas menggunakan metode pembobotan yang seimbang (*equal weighting*). Hal ini karena dapat menjawab semua argumen secara etika atau moral di masa yang akan datang tentang penentuan aspek yang lebih penting untuk pembangunan pemuda di Indonesia.



Sumber Gambar : canva.com

c. Menghitung Nilai Indeks Pembangunan Pemuda

Langkah terakhir adalah menghitung nilai IPP berdasarkan rata-rata nilai seluruh indeks domain sehingga menghasilkan nilai IPP antara 10-100, atau sesuai dengan persamaan berikut:

$$IPP = \frac{\text{Indeks Domain}_1 + \text{Indeks Domain}_2 + \dots + \text{Indeks Domain}_5}{5}$$

Seperti pada perhitungan nilai indeks domain, perhitungan nilai IPP juga menggunakan metode pembobotan seimbang. Penyusunan laporan IPP metode lama belum meliputi 38 provinsi. IPP metode lama tahun 2024 masih hanya mencakup 34 provinsi saja. Hal tersebut dilakukan mengingat keterbatasan data dari provinsi yang baru.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan IPP 2025 ini terdiri dari lima bab. Bab 1 memberikan gambaran kondisi pembangunan pemuda Indonesia, demografi dan sebaran pemuda, serta metadata dan metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda. Bab 2 membahas dinamika capaian pemuda secara nasional sepanjang tahun 2015 hingga 2024, gambaran umum capaian IPP provinsi serta tantangan pencapaian IPP. Bab 3 membahas deskripsi profil Indeks Pembangunan Pemuda di masing-masing provinsi. Bab 4 membahas Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru dan hasil capaian tahun 2024. Bab 5 adalah penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi terkait arah ke depan terkait dengan pembangunan pemuda Indonesia.



Sumber Gambar : canva.com



Sumber Gambar : AI Gemini



BAB 2

DINAMIKA CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

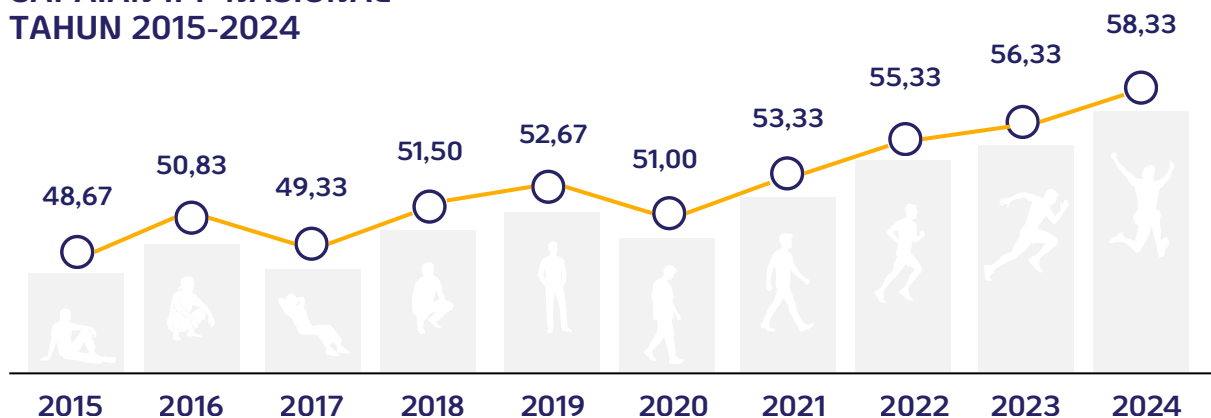
Bab ini membahas perkembangan capaian Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Pemuda di 34 Provinsi Tahun 2024, dan tantangan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda



2.1 PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA INDONESIA

Indeks Pembangunan Pemuda di Indonesia tahun 2024 sebesar 58,33 dan terjadi peningkatan 2 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 56,33. Hasil tersebut memperpanjang tren pencapaian IPP yang selalu meningkat selama 1 (satu) periode pembangunan 2020-2024. Secara umum IPP memang mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 48,67 menjadi 58,33 di tahun 2024 (Gambar 2.1), terdapat kenaikan sebesar 9,66 selama 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa selama 10 tahun tersebut peningkatan IPP hanya kurang dari 1 poin yang menandakan bahwa peningkatan IPP tidak cukup signifikan.

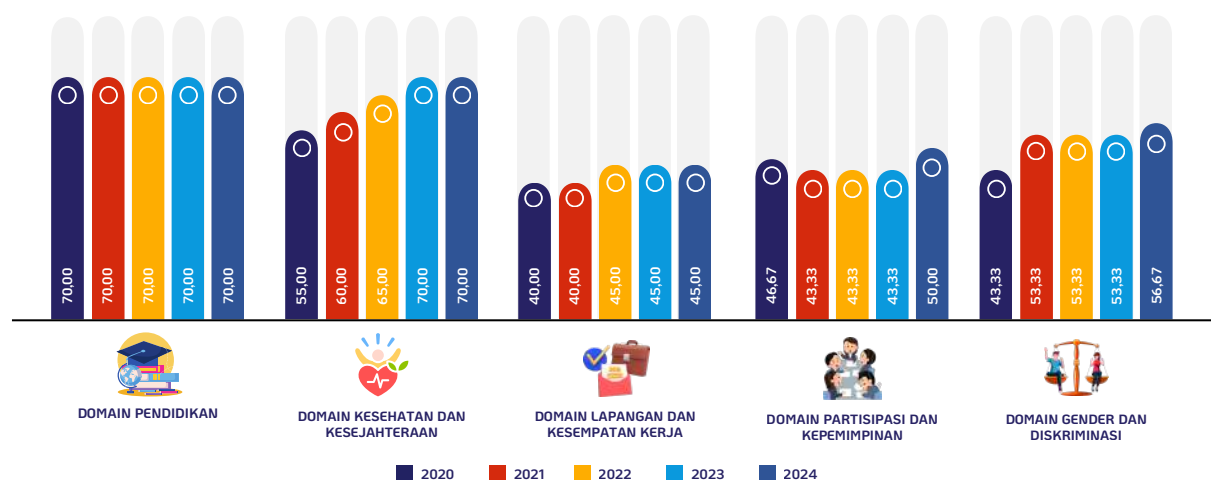
CAPAIAN IPP NASIONAL TAHUN 2015-2024



Gambar 2.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda 2015-2024

Peningkatan IPP yang cenderung lambat terlihat dari dinamika masing-masing domain. Pada tahun 2024 peningkatan IPP hanya disumbangkan oleh adanya kenaikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang meningkat dari 43,33 di tahun 2023 menjadi 50,0 di tahun 2024 serta domain gender dan diskriminasi yang meningkat 3,33 poin dari 53,33 di tahun 2023 menjadi 56,67 di tahun 2024. Sedangkan domain lainnya yakni domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.

Apabila diperhatikan lebih jauh, maka selama lima tahun terakhir dapat diamati bahwa dari lima domain terdapat empat yang secara umum terdapat kenaikan tren. Terutama pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang meningkat 15 poin dari tahun 2020 dan juga domain domain gender dan diskriminasi yang meningkat 13,34 poin dari tahun 2020, sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja meningkat 5 poin dari tahun 2020 dan domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat 6,67 poin (Gambar 2.2).



Gambar 2.2 Perkembangan Domain Indeks Pembangunan Pemuda

Jika dibandingkan dengan domain lain, domain pendidikan merupakan domain yang memiliki nilai terbesar, namun selama lima tahun terakhir mengalami stagnasi dengan nilai sebesar 70. Meskipun mengalami stagnasi, akan tetapi jika dilihat dari indikator rata-rata lama anak sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, nilai rata-rata lama anak sekolah nasional sebesar 11,11 naik 0,07 dari tahun 2022 dengan nilai 11,04. Pada domain pendidikan, indikator APK anak sekolah menengah pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022, APK anak Sekolah menengah mengalami penurunan menjadi 88,76 dari 88,89 pada tahun 2021. Pada tahun 2023 dan 2024, APK anak sekolah menengah kembali mengalami kenaikan menjadi 89,71. Meskipun mengalami fluktuasi, indikator APK anak sekolah menengah nasional dapat dikategorikan baik.

Dua faktor yang dapat menyebabkan naiknya nilai APK anak sekolah menengah yaitu, semakin banyaknya jumlah SMA/Sederajat di Indonesia dan naiknya anggaran pendidikan nasional (Mukhaiyar & dkk., 2022). Temuan penelitian Mukhaiyar dkk mengungkapkan bahwa jumlah sekolah SMA/Sederajat berpengaruh positif terhadap naiknya nilai APK anak sekolah. Pada tahun 2023/2024 jumlah sekolah SMA Negeri dan Swasta berjumlah 14.445 bertambah sebanyak 209 sekolah jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2022/2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu data menyebutkan anggaran pendidikan tahun 2024 sebesar 665,02 Triliun mengalami peningkatan 7 persen jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar 655 Triliun yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap kenaikan APK anak sekolah menengah.

Tantangan pada domain pendidikan adalah pada indikator APK perguruan tinggi. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun nilai indikator APK perguruan tinggi masih tergolong rendah. Pada tahun 2024, nilai indikator APK perguruan tinggi nasional sebesar 32. Angka ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu target APK PT pada 2024 adalah 37,63 persen. Faktor penyebab rendahnya nilai APK perguruan tinggi diantaranya keterbatasan akses hingga peluang kerja bagi para lulusan, biaya kuliah yang tinggi ini menjadi kesulitan bagi keluarga dengan pendapatan rendah dan di sisi lain adanya keterbatasan beasiswa yang memadai, kualitas pendidikan menengah kurang baik, masih ada anggapan langsung terjun di dunia kerja lebih berharga ketimbang menjalani pendidikan akademik, minimnya variasi program studi hingga minimnya relevansi kurikulum pendidikan tinggi yang sesuai kebutuhan pasar kerja, demografi struktur penduduk, ketidakadilan sosial seperti perbedaan gender dan sosioekonomi dan peluang kerja yang berkaitan dengan ketidakpastian ekonomi dalam pasar kerja (Satria, 2023).



Intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai indikator APK perguruan tinggi diantaranya melalui program penguatan dan transformasi Universitas Terbuka, peningkatan kapasitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kemudian penguatan dan perluasan teknologi untuk pendidikan, serta beasiswa berkeadilan dan tepat sasaran khususnya untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) – Kuliah dan beasiswa afirmasi.

Program-program untuk meningkatkan nilai domain pendidikan diantaranya peningkatan akses dan bantuan finansial pendidikan untuk memastikan pemuda dari berbagai latar belakang ekonomi dapat mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti Wajib Belajar 13 Tahun untuk menjamin pendidikan dasar dan menengah (hingga SMA/SMK/MA) dapat diakses oleh semua pemuda, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa bantuan biaya pendidikan (bebas biaya kuliah) dan bantuan biaya hidup bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Beasiswa Unggulan berupa Beasiswa untuk jenjang Sarjana, Magister, dan Doktorat bagi masyarakat berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dan lain-lain.

Domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda merupakan satu-satunya domain yang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 namun stagnan di tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda sebesar 70, tidak berbeda dengan tahun 2023. Baiknya domain kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh capaian angka kesakitan pemuda pada tahun 2023 dan 2024 yang berada pada posisi 6,24 persen dan 6,80 persen, meskipun ada kenaikan di tahun 2024, namun merupakan capaian yang cukup baik selama 10 tahun terakhir. Adapun capaian terburuk terjadi pada tahun 2021 sebesar 10,223, ketika pandemi *Covid-19* melanda.

Pada indikator persentase korban kejahatan secara umum mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,47 persen berkurang 0,67 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 1,14 persen. Selanjutnya tantangan pada domain kesehatan dan kesejahteraan adalah pada indikator persentase pemuda yang merokok terjadi penurunan di tahun 2020-2022 dari 25,70 persen menjadi 24,36 persen dan menjadi capaian terbaik selama tahun 2015-2024, namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 24,75 persen dan menjadi 25,09 persen pada tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Tanpa Asap Rokok.

Penyebab masih tingginya pemuda merokok di Indonesia diantaranya masih rendahnya kesadaran pemuda perokok untuk menghentikan kegiatan merokok (Almaidah & dkk., 2021). Sebagian besar pemuda sudah mengetahui bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan terutama kesehatan paru-paru dan jantung, Namun pada kenyataannya, mereka banyak mengabaikan bahaya tersebut. Sebagian besar pemuda beralih bahwa merokok merupakan cara untuk meredakan stress dan memperoleh perasaan tenang, sehingga mengabaikan bahaya akan dampak rokok.



Sumber Gambar : canva.com

Adapun intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai indikator persentase pemuda merokok adalah meningkatkan pajak dan harga produk tembakau, melarang untuk seluruh bentuk iklan, promosi, dan sponsor untuk produk tembakau, menerapkan kawasan tanpa asap rokok, dan melakukan kampanye bahaya produk tembakau. Indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil menunjukkan penurunan yang signifikan, yakni dari 18,22 persen pada 2020 menjadi 10,77 persen pada 2024, yang merupakan capaian terbaik selama sepuluh tahun terakhir.

Program-program untuk meningkatkan nilai domain kesehatan dan kesejahteraan diantaranya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat yakni inisiatif yang diintegrasikan dalam program kesehatan remaja untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis terkait kesehatan diri, seperti kesehatan reproduksi, gizi remaja, dan bahaya rokok/narkoba. Layanan Konseling dan Dukungan Sekolah/Komunitas melalui layanan konseling dan Dukungan Sekolah/Komunitas dan Pembentukan *Support Group* atau inisiatif teman sebaya untuk membantu teman yang mengalami kesulitan psikologis.

Domain lapangan dan kesempatan kerja pada tiga tahun terakhir mengalami stagnasi dengan nilai sebesar 45. Domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan nilai IPP nasional. Terdapat penurunan 0,06 persen pada tahun 2023 sebesar 0,53 menjadi 0,47 di tahun 2024 sehingga target nasional sebesar 0,55 pada Rencana Kerja Pembangunan tahun 2024 tidak tercapai.

Indikator lainnya TPT terbuka, meskipun nilainya menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 12,24 menurun 1,17, tetapi tergolong masih tinggi. Penyebab rendahnya persentase pemuda wirausaha kerah putih terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah muncul rasa gengsi, tidak percaya diri, dan malas untuk menarik pelanggan. Pemuda merasa jika menjalankan wirausaha kurang menarik jika dibandingkan dengan bekerja di sektor swasta. Faktor eksternal diantaranya adalah terbatasnya modal dan terbatasnya akses pemasaran produk (Mardatilah & Hermanzoni, 2020).

Adapun intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan domain lapangan dan kesempatan kerja adalah komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan pengembangan kewirausahaan pemuda, penguatan koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan pemuda, membuat regulasi daerah yang mengatur kewirausahaan pemuda, melakukan kerja sama dengan pihak nonpemerintah yang terencana dan dituangkan dalam dokumen perencanaan, dan mengembangkan kewirausahaan pemuda berdasarkan potensi daerah. Selain meningkatkan nilai indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih, intervensi yang dilakukan juga dapat menurunkan angka TPT terbuka.

Program-program untuk meningkatkan nilai domain lapangan dan kesempatan kerja diantaranya peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja melalui pelatihan vokasi gratis di berbagai kejuruan seperti teknologi informasi, teknik listrik, fashion, otomotif, hingga bisnis dan manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal maupun global. Penciptaan ekosistem kerja yang inklusif melalui program seperti Akselerator Global untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, mengembangkan keterampilan modern, dan mendorong inklusi ketenagakerjaan (termasuk untuk pemuda disabilitas).



Sumber Gambar : kemenpora.go.id

Domain partisipasi dan kepemimpinan menunjukkan bahwa dari tiga indikator seluruhnya meningkat di tahun 2024, hal ini terjadi karena seiring berakhirnya pandemi covid-19 yang cukup berdampak signifikan pada partisipasi pemuda dalam berbagai hal. Tantangan pada domain ini adalah masih rendahnya nilai indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan pendapat dalam rapat. Pada tahun 2024, nilai indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi hanya sebesar 6,16 persen, sedangkan nilai indikator persentase pemuda yang memberikan pendapat dalam rapat hanya sebesar 8,66 persen.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda menurut Sunarti dan Slamet dalam (Purwandari & Mussadun, 2015) terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kondisi sosiologi seseorang seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Kemudian faktor ekonomi seperti jenis pekerjaan dan jumlah penghasilan juga berpengaruh terhadap partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial. Faktor eksternal diantaranya intensitas sosialisasi, stimulus dari pihak terkait, kapasitas dan kapabilitas pemimpin, serta pengaruh dari masyarakat sekitar.

Adapun intervensi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai domain partisipasi dan kepemimpinan diantaranya melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat daerah provinsi maupun kabupaten. Kemudian melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

Program-program untuk meningkatkan nilai domain partisipasi dan kepemimpinan diantaranya berfokus pada pelatihan kader, peningkatan wawasan politik dan kebangsaan, serta penyediaan platform untuk keterlibatan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan melalui Pengembangan kader dan Kapasitas Kepemimpinan, Pendidikan politik, dan lain-lain



Domain gender dan diskriminasi selama tahun 2021-2023 mengalami stagnasi dengan nilai 53,33 persen dan meningkat di tahun 2024 menjadi 56,67. Setiap indikator mengalami tren positif. Nilai indikator angka perkawinan usia anak, setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024 nilai indikator angka pernikahan usia anak sebesar 5,90 persen turun sebesar 4,45 persen dari tahun 2020 dengan nilai sebesar 10,35. Penurunan ini bernilai positif karena mampu menekan angka perkawinan usia anak.

Adapun dua indikator lain yaitu persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai indikator. Pada tahun 2024, nilai indikator persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas sebesar 42,28 naik sebesar 3,51 dari tahun 2020 sebesar 39,37. Sedangkan nilai indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal pada tahun 2024 sebesar 26,41 naik sebesar 4,10 dari tahun 2020 sebesar 22,31.

Faktor yang menyebabkan rendahnya pemuda perempuan bekerja di sektor formal diantaranya adanya anggapan dari institusi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pekerja perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki, adanya eksklusivitas pekerjaan tertentu yang dianggap kurang layak dimasuki oleh pekerja perempuan, serta stigma yang masih sering melekat bahwa perempuan kurang produktif dibandingkan pekerja laki-laki (Nuraeni & Suryono, 2021). Selain itu penyebab lainnya adalah kondisi kultur/sosial karena masih menganut konsep patriarki di beberapa daerah Indonesia, tuntutan kepada perempuan untuk mengasuh anak dan mengurus keluarga jauh lebih penting dibandingkan mencari nafkah, pola asuh orang tua terhadap anak perempuan, serta ekspektasi sosial untuk tidak masuk ke dunia kerja.

Adapun intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai domain gender dan diskriminasi diantaranya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Kemudian pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota.

Program-program sebagai contoh baik untuk meningkatkan nilai domain gender dan diskriminasi diantaranya penguatan kesetaraan gender melalui dukungan partisipasi aktif wanita dalam pembangunan desa, Pemuda berperan aktif dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi desa, serta memastikan suara perempuan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan lokal dan program yang memastikan fasilitas pendidikan ramah anak, ramah penyandang disabilitas, dan inklusif gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti-kekerasan, dan efektif bagi semua pemuda.

2.2 INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA TAHUN 2024 DI 34 PROVINSI

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 di 34 provinsi mayoritas mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPP terjadi di mayoritas provinsi yaitu sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi sedangkan 1 provinsi memiliki nilai sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP. Provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Pada tahun 2024, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki IPP di bawah IPP nasional. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat 27 provinsi yang memiliki IPP di bawah IPP nasional. Selain itu, terdapat 7 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional.

Tabel 2.1 IPP 34 Provinsi Tahun 2023 dan 2024

PROVINSI	IPP 2023	IPP 2024	KET	PROVINSI	IPP 2023	IPP 2024	KET
Aceh	60,00	58,00	2,00 ▼	Nusa Tenggara Barat	53,67	55,50	1,83 ▲
Sumatera Utara	56,33	59,33	3,00 ▲	Nusa Tenggara Timur	55,33	57,17	1,83 ▲
Sumatera Barat	55,67	55,33	0,33 ▼	Kalimantan Barat	53,33	53,33	0,00 =
Riau	55,17	55,00	0,17 ▼	Kalimantan Tengah	54,83	56,83	2,00 ▲
Jambi	56,83	56,00	0,83 ▼	Kalimantan Selatan	54,67	55,83	1,17 ▲
Sumatera Selatan	54,00	53,67	0,33 ▼	Kalimantan Timur	59,17	58,00	1,17 ▼
Bengkulu	57,33	57,17	0,17 ▼	Kalimantan Utara	51,17	55,33	4,17 ▲
Lampung	53,17	55,67	2,50 ▲	Sulawesi Utara	54,83	56,33	1,50 ▲
Kepulauan Bangka Belitung	52,67	55,67	3,00 ▲	Sulawesi Tengah	60,00	57,33	2,67 ▼
Kepulauan Riau	55,33	60,83	5,50 ▲	Sulawesi Selatan	56,67	57,67	1,00 ▲
DKI Jakarta	52,50	57,50	5,00 ▲	Sulawesi Tenggara	56,67	58,67	2,00 ▲
Jawa Barat	51,17	53,83	2,67 ▲	Gorontalo	57,83	56,17	1,67 ▼
Jawa Tengah	55,50	57,50	2,00 ▲	Sulawesi Barat	55,50	56,50	1,00 ▲
DI Yogyakarta	73,33	74,83	1,50 ▲	Maluku	54,33	54,67	0,33 ▲
Jawa Timur	56,50	61,00	4,50 ▲	Maluku Utara	58,83	58,00	0,83 ▼
Banten	53,33	54,83	1,50 ▲	Papua Barat	57,17	60,17	3,00 ▲
Bali	62,67	68,00	5,33 ▲	Papua	52,17	55,33	3,17 ▲



a. Domain Pendidikan

Secara nasional, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada domain pendidikan tidak tersentral pada zona atau kawasan tertentu tetapi relatif tersebar pada seluruh pulau di Indonesia. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi dengan nilai IPP Domain Pendidikan tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 76,67. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan IPP domain pendidikan tertinggi baik di Pulau Jawa maupun di Indonesia dengan nilai sebesar 90,00. Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara juga menjadi provinsi dengan IPP domain pendidikan yang relatif tinggi dengan 76,67 sedangkan yang terendah adalah di Provinsi Papua sebesar 56,67.

Secara umum, hanya ada dua provinsi yang memiliki keunggulan pada domain pendidikan yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi capaian nasionalnya. Sedangkan provinsi yang menurun dan lebih rendah atau sama dari capaian nasional yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Barat.

b. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Pada domain kesehatan dan kesejahteraan, Provinsi Papua dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan nilai domain kesehatan dan kesejahteraan tertinggi yaitu sebesar 85 dan 82,5. Provinsi lain di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah dengan IPP domain kesehatan dan kesejahteraan yang relatif tinggi berada di Provinsi Maluku Utara (80,0), Provinsi Kalimantan Timur (80,0), dan Provinsi Sulawesi Tenggara (80,0). Secara umum, terdapat tiga belas provinsi yang memiliki keunggulan pada domain kesehatan dan kesejahteraan yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi capaian nasionalnya



c. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain yang paling perlu menjadi fokus bersama karena mayoritas sebanyak sembilan belas provinsi mengalami stagnasi atau penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan lebih rendah dari capaian nasional. Hanya terdapat empat provinsi yang dinilai memiliki keunggulan pada domain ini yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang memiliki nilai tertinggi yaitu Provinsi Papua dari sisi nilai terendah diantaranya Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Maluku.

d. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Pemetaan domain partisipasi dan kepemimpinan 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa persebaran nilai domain tersebut yang dominan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur. Domain partisipasi dan kepemimpinan tertinggi ada di Provinsi DI Yogyakarta dan terendah ada di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, terdapat sembilan provinsi yang memiliki keunggulan pada domain partisipasi dan kepemimpinan yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi capaian nasionalnya. Sedangkan provinsi yang menurun dan lebih rendah atau sama dari capaian nasional terdapat delapan provinsi yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara.

e. Domain Gender dan Diskriminasi

Secara umum, hanya terdapat tiga provinsi yang memiliki keunggulan pada domain gender dan diskriminasi yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Bali, hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi capaian nasionalnya. Sedangkan provinsi yang menurun dan lebih rendah atau sama dari capaian nasional terdapat tujuh belas provinsi yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat.

Tabel 2.2 Capaian Domain IPP pada 34 Provinsi

PROVINSI	D1	D2	D3	D4	D5	PROVINSI	D1	D2	D3	D4	D5
Aceh	76,67	75,00	35,00	46,67	56,67	NTB	73,33	57,50	50,00	53,33	43,33
Sumatera Utara	73,33	75,00	45,00	43,33	60,00	NTT	70,00	67,50	45,00	53,33	50,00
Sumatera Barat	76,67	60,00	40,00	43,33	56,67	Kalimantan Barat	63,33	75,00	45,00	40,00	43,33
Riau	73,33	60,00	45,00	43,33	53,33	Kalimantan Tengah	66,67	77,50	50,00	40,00	50,00
Jambi	70,00	65,00	45,00	43,33	50,00	Kalimantan Selatan	66,67	77,50	45,00	36,67	53,33
Sumatera Selatan	66,67	70,00	45,00	40,00	46,67	Kalimantan Timur	76,67	80,00	40,00	33,33	60,00
Bengkulu	73,33	62,50	50,00	43,33	56,67	Kalimantan Utara	70,00	65,00	45,00	40,00	56,67
Lampung	70,00	70,00	45,00	43,33	50,00	Sulawesi Utara	70,00	75,00	30,00	53,33	53,33
Kepulauan Bangka Belitung	66,67	80,00	45,00	36,67	50,00	Sulawesi Tengah	73,33	70,00	50,00	43,33	50,00
Kepulauan Riau	73,33	82,50	45,00	36,67	66,67	Sulawesi Selatan	73,33	75,00	50,00	36,67	53,33
DKI Jakarta	76,67	57,50	50,00	36,67	66,67	Sulawesi Tenggara	73,33	80,00	50,00	36,67	53,33
Jawa Barat	66,67	67,50	35,00	46,67	53,33	Gorontalo	66,67	67,50	50,00	46,67	50,00
Jawa Tengah	66,67	62,50	45,00	56,67	56,67	Sulawesi Barat	66,67	72,50	50,00	50,00	43,33
DI Yogyakarta	90,00	67,50	60,00	83,33	73,33	Maluku	76,67	60,00	30,00	53,33	53,33
Jawa Timur	73,33	65,00	60,00	53,33	53,33	Maluku Utara	76,67	80,00	40,00	46,67	46,67
Banten	70,00	77,50	30,00	43,33	53,33	Papua Barat	73,33	77,50	40,00	60,00	50,00
Bali	73,33	80,00	60,00	56,67	70,00	Papua	56,67	85,00	45,00	53,33	36,67
INDONESIA							70,00	70,00	45,00	50,00	56,67

2.3 TANTANGAN PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA

Pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Indonesia hingga tahun 2024 menunjukkan kemajuan yang berarti, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Meskipun tren peningkatan nilai IPP terus terjadi dari tahun ke tahun, laju pertumbuhannya masih tergolong lambat dan belum merata di seluruh wilayah. Hal ini menandakan bahwa kualitas pembangunan pemuda belum berkembang secara seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Salah satu tantangan yang paling nyata adalah masih besarnya ketimpangan capaian IPP antarwilayah. Provinsi-provinsi dengan infrastruktur dan akses pendidikan yang baik, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta, menunjukkan nilai IPP yang tinggi. Sebaliknya, beberapa provinsi di wilayah timur Indonesia masih tertinggal akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan sarana partisipasi sosial. Ketimpangan ini menggambarkan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan sumber daya manusia muda di tingkat nasional.

Tantangan utama lainnya adalah lemahnya tata kelola koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan. Isu kepemudaan bersifat multidimensi dan menyentuh berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, serta partisipasi sosial-politik. Namun dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan pada bidang-bidang tersebut masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan kepemudaan yang komprehensif. Kementerian/Lembaga dan perangkat daerah seringkali melaksanakan program pemuda secara parsial, tanpa sinergi lintas sektor dan tanpa indikator capaian yang seragam berbasis IPP.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tata kelola koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Forum koordinasi lintas sektor yang telah dibentuk, seperti tim koordinasi pembangunan kepemudaan, masih terkendala oleh lemahnya mekanisme komunikasi antarinstansi, perbedaan prioritas program, serta belum adanya sistem pemantauan dan evaluasi bersama. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan dan program sering tumpang tindih, tidak efisien, dan kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pemuda.

Di daerah, koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (RAD-PK) juga menghadapi kendala serupa. Belum semua daerah memiliki struktur kelembagaan atau unit kerja yang kuat untuk mengoordinasikan isu kepemudaan lintas sektor. Sebagian besar inisiatif masih bergantung pada dinas teknis tertentu, tanpa dukungan koordinatif dari Bappeda sebagai lembaga perencanaan daerah. Akibatnya, pembangunan kepemudaan belum menjadi gerakan bersama seluruh sektor, melainkan hanya tanggung jawab satu atau dua instansi saja.

Tantangan tata kelola koordinasi lintas sektor ini memerlukan penguatan kelembagaan dan regulasi yang lebih jelas, baik melalui peraturan daerah maupun pedoman nasional yang mengatur sinergi antarinstansi. Penguatan kapasitas koordinasi, sistem monitoring bersama, serta perumusan indikator kinerja lintas sektor berbasis IPP menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara terarah dan terukur dalam pembangunan kepemudaan.



Sumber Gambar : AI ChatGPT

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan anggaran pembangunan kepemudaan. Di banyak daerah, program-program kepemudaan masih dianggap bersifat tambahan, bukan prioritas strategis. Alokasi dana yang minim membuat kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda tidak berjalan maksimal. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya koordinasi antarlembaga di daerah, sehingga berbagai program kepemudaan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan yang lebih mendasar muncul dari rendahnya political will dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan pemuda. Banyak kepala daerah yang belum menempatkan isu kepemudaan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun dalam penganggaran tahunan. Akibatnya, pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan di sejumlah daerah belum berjalan efektif, bahkan ada yang belum disusun sama sekali. Pembangunan pemuda kerap hanya dijadikan kegiatan simbolik, bukan agenda strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda. Padahal, tanpa dukungan politik dan komitmen dari pimpinan daerah, upaya peningkatan IPP di tingkat daerah akan sulit mengalami percepatan yang signifikan.

Berbagai tantangan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan IPP tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada konsistensi komitmen politik, koordinasi lintas sektor, dan perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif terhadap pemuda. Pembangunan pemuda harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, bukan sekadar program sektoral. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci dalam mempercepat peningkatan kualitas dan peran strategis generasi muda Indonesia.



BAB 3

PROFIL INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA DI 34 PROVINSI

Bab ini membahas statistik capaian Indeks Pembangunan pemuda secara umum, domain dan indikator pembentuk IPP Metode Lama pada 34 Provinsi di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan perbandingan capaian setiap provinsi dengan nilai nasional

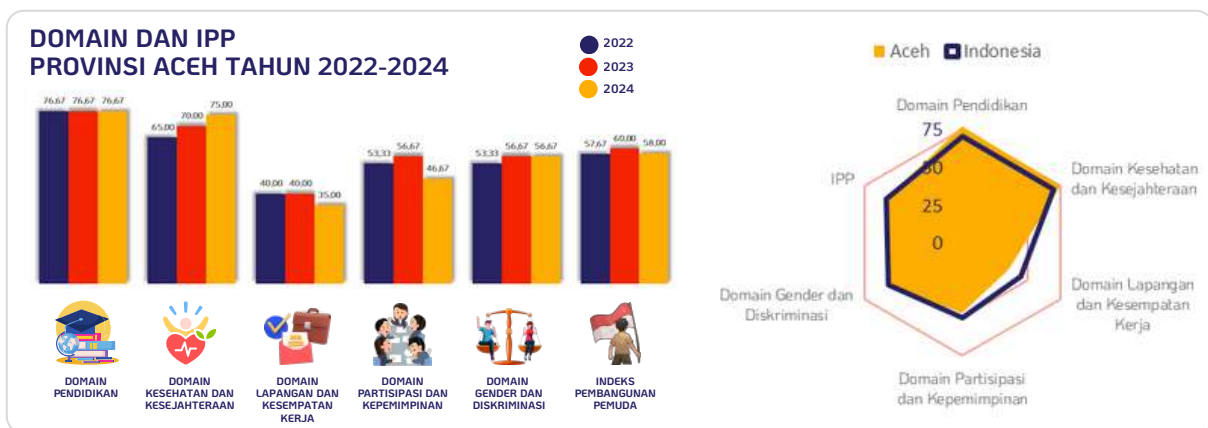


3.1 PROVINSI ACEH



Pada tahun 2024, Provinsi Aceh memiliki persentase pemuda sebesar 24,63 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Aceh mengalami penurunan nilai IPP sebesar 2 poin menjadi 58 dari tahun sebelumnya 60 (Gambar 3.1). Penurunan nilai IPP selaras dengan penurunan nilai domain lapangan dan kesempatan kerja dari 40 menjadi 35 serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 56,67 menjadi 46,67. Di sisi lain, domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan sebesar 5 poin dari 70 menjadi 75. Dua domain lainnya mengalami stagnasi, yaitu domain pendidikan 76,67 dan domain gender dan diskriminasi 56,67.

Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1. Capaian IPP Provinsi Aceh sebesar 58 sedikit berada di bawah capaian nasional yaitu 58,33.



Gambar 3.1 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Aceh Tahun 2022-2024

Tabel 3.1

Keunggulan dan Kelemahan pada indikator IPP pada Provinsi Aceh

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X2 : APK Sekolah Menengah dari 94,63 menjadi 95,48
	X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 8,04 menjadi 6,68 X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 9,04 menjadi 7,50
	X10 : Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat dari 85,42 menjadi 86,21
	X13 : Angka Perkawinan Usia Anak dari 3,16 menjadi 2,62
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X8 : Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih dari 0,50 menjadi 0,35
	X11 : Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 6,01 menjadi 6,00

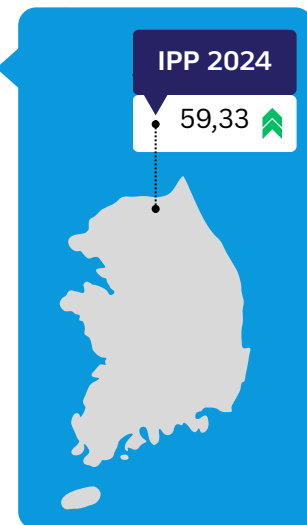


Domain pendidikan (76,67), domain kesehatan dan kesejahteraan (75), keduanya memiliki nilai indeks lebih besar dari nilai nasional (Gambar 3.1). Sedangkan, nilai indeks domain gender dan diskriminasi memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional yaitu 56,67. Domain lapangan dan kesempatan kerja (35) lebih rendah dari capaian nasional (45). Begitu pula dengan domain partisipasi dan kepemimpinan (46,67) lebih rendah dari nilai nasional (50).

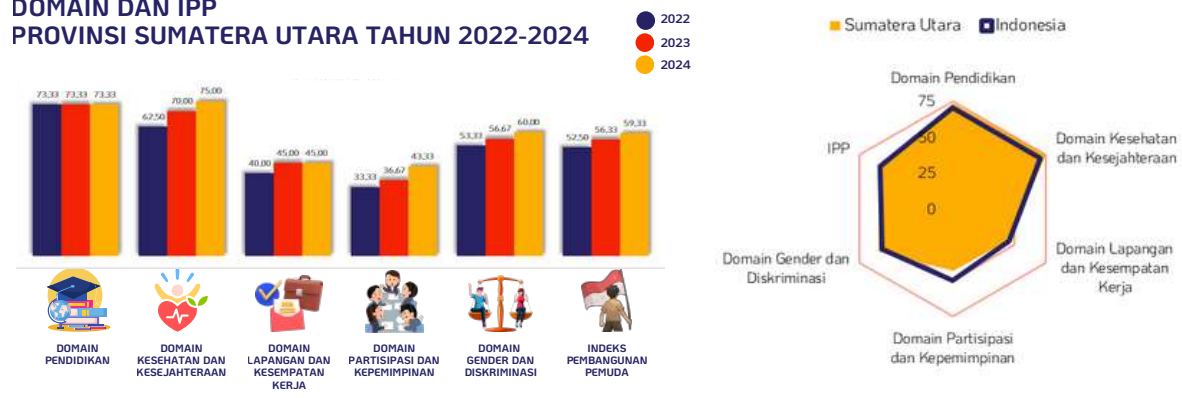
Berdasarkan Tabel 3.1, keunggulan Provinsi Aceh berada pada lima indikator yaitu APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat dan angka perkawinan usia anak. Sedangkan kelemahannya ada dua indikator yaitu persentase pemuda wirausaha keras putih dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi.

3.2 PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara memiliki persentase pemuda sebesar 24,26 persen (Badan Pusat Statistik, 2024) dan mengalami peningkatan nilai IPP menjadi 59,33 dari tahun sebelumnya 56,33 (Gambar 3.2). Peningkatan nilai indeks ini didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan dari 36,67 pada 2023 menjadi 43,33 pada 2024. Selain itu, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan juga meningkat dari 70 menjadi 75. Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi yang meningkat dari 56,67 menjadi 60. Dua domain lainnya mengalami stagnasi, yaitu domain pendidikan (73,33) dan domain lapangan dan kesempatan kerja (45). Capaian IPP Provinsi Sumatera Utara (59,33) lebih tinggi dari IPP nasional (58,33). Jika dibandingkan dengan nilai indeks domain di tingkat nasional, capaian indeks domain di Provinsi Sumatera Utara relatif baik.



**DOMAIN DAN IPP
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022-2024**



Gambar 3.2 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024

Domain pendidikan (73,33), domain kesehatan dan kesejahteraan (75), serta domain gender dan diskriminasi (60), ketiganya memiliki nilai indeks lebih besar dari nilai nasional (Gambar 3.2). Sedangkan, nilai indeks domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional yaitu 45. Hanya indeks domain partisipasi dan kepemimpinan yang memiliki capaian lebih rendah daripada capaian nasional yaitu dengan capaian 43,33 (nasional 50).

Provinsi Sumatera Utara memiliki keunggulan pada enam indikator yaitu rata-rata lama Sekolah, persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Di sisi lain masih terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu APK Perguruan Tinggi, serta persentase pemuda yang aktif berorganisasi.

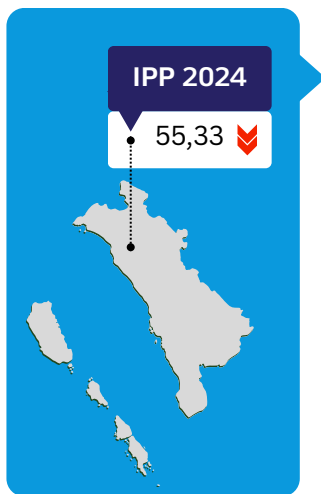
Tabel 3.2 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Utara

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,57 menjadi 11,58
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,62 menjadi 0,39 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 13,62 menjadi 10,36
	X9 : Tingkat Pengangguran Terbuka dari 12,62 menjadi 11,82
	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 2,38 menjadi 1,81 X14: Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dari 46,79 menjadi 47,21
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X3: APK Perguruan Tinggi dari 32,67 menjadi 31,63
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 6,01 menjadi 6,00

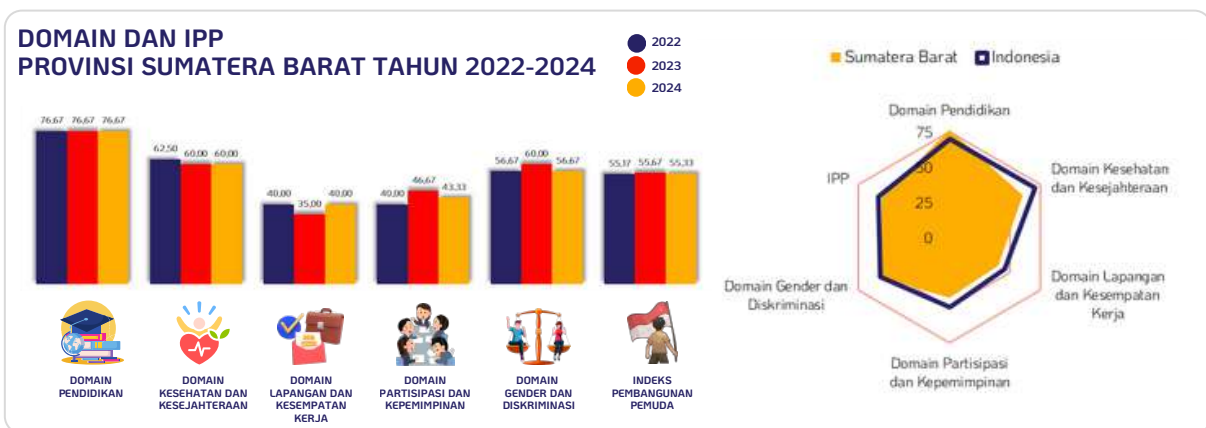


Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.3 PROVINSI SUMATERA BARAT



Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase pemuda sebesar 23,53 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan IPP sebesar 0,33 poin dari tahun sebelumnya 55,67 menjadi 55,33 (Gambar 3.3). Angka IPP tersebut juga lebih rendah 3 poin dibandingkan IPP nasional sebesar 58,33 persen. Terdapat dua domain yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan (43,33) serta domain gender dan diskriminasi (56,67). Hal tersebut berbanding terbalik dengan domain lapangan dan kesempatan kerja yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 35 menjadi 40. Sementara itu terdapat dua domain yang mengalami stagnasi yaitu domain pendidikan (76,67) dan domain kesehatan dan kesejahteraan (60).



Gambar 3.3 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatra Barat Tahun 2022-2024

Tabel 3.3 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Barat

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	PENDIDIKAN	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,51 menjadi 11,55 X2: APK Sekolah Menengah dari 92,34 menjadi 94,93 X3: APK Perguruan Tinggi dari 43,26 menjadi 43,29
	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 8,37 menjadi 9,75
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun /stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	GENDER DAN DISKRIMINASI	X13 : Angka Perkawinan Usia Anak dari 4 menjadi 3,49
	Kesehatan dan Kesejahteraan	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka Stagnan pada 14,26
	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 4,99 menjadi 3,67

Jika dibandingkan dengan nilai nasional (Gambar 3.3), hanya domain pendidikan yang lebih tinggi (76,67) dari nilai nasional (70). Domain gender dan diskriminasi memiliki nilai yang sama dengan nasional yaitu 56,67. Sedangkan domain lainnya lebih rendah daripada nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan 60 (nasional 70), domain lapangan dan kesempatan kerja 40 (nasional 45), serta domain partisipasi dan kepemimpinan 43,33 (nasional 50).

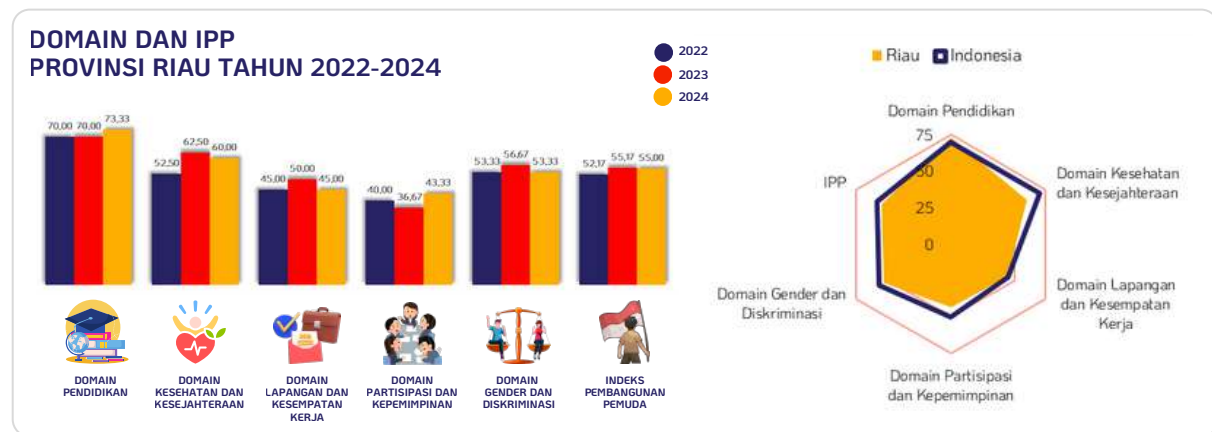
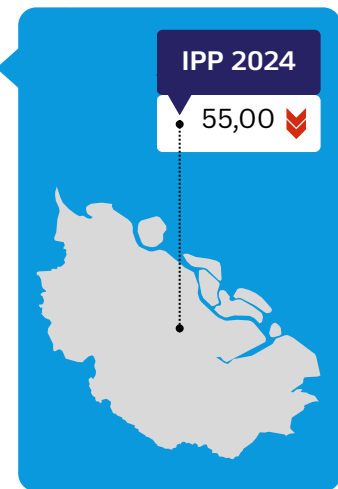
Provinsi Sumatera Barat memiliki keunggulan pada domain pendidikan karena semua indikator penyusunannya lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dan angka perkawinan usia anak juga menjadi salah satu keunggulan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, indikator angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang merokok, tingkat pengangguran terbuka dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi merupakan indikator yang menurun dari tahun sebelumnya dan masih di bawah capaian nasional.



3.4 PROVINSI RIAU

Pada tahun 2024, Provinsi Riau memiliki persentase pemuda sebesar 23,98 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Riau mengalami penurunan nilai IPP sebesar 0,17 poin menjadi 55 dari tahun sebelumnya 55,17 (Gambar 3.4). Penurunan nilai IPP selaras dengan penurunan nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dari 62,50 menjadi 60, domain lapangan dan kesempatan kerja dari 50 menjadi 45, serta domain gender dan diskriminasi dari 56,67 menjadi 53,33. Di sisi lain, domain pendidikan mengalami peningkatan dari 70 menjadi 73,33 serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 36,67 menjadi 43,33.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2024 sebesar 58,33, nilai IPP Provinsi Riau lebih rendah 3,33 poin. (Gambar 3.4).



Gambar 3.4 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Riau Tahun 2022-2024

Ada tiga domain yang memiliki capaian di bawah capaian nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 60 (nasional 70), domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 (nasional 50) serta domain gender dan diskriminasi 53,33 (nasional 56,67). Domain lapangan dan kesempatan kerja mendapatkan nilai yang sama dengan capaian nasional yaitu 45. Selanjutnya, hanya domain pendidikan yang memiliki nilai unggul di atas capaian nasional (70) yaitu 73,33.

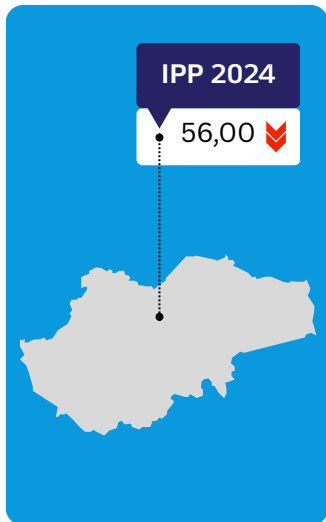
Berdasarkan Tabel 3.4, Provinsi Riau memiliki keunggulan pada indikator APK Sekolah menengah, persentase pemuda korban kejahatan dan tingkat pengangguran terbuka karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan capaian persentase remaja perempuan sedang hamil dan persentase pemuda wirausaha kerah putih menunjukkan penurunan capaian dan masih di bawah capaian nasional.

Tabel 3.4 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Riau

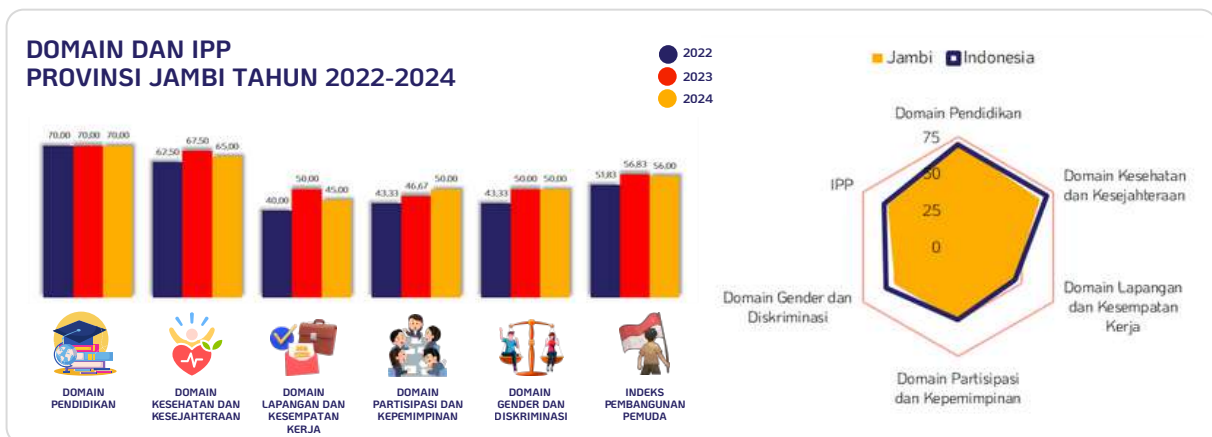
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
		X2: APK Sekolah Menengah dari 89,06 menjadi 90,18
		X5: Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,41 menjadi 0,33
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
		X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 10,87 menjadi 9,43
		X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 27,24 menjadi 32,61
		X8: Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,45 menjadi 0,34



3.5 PROVINSI JAMBI



Pada tahun 2024, persentase pemuda di Provinsi Jambi sebesar 22,57 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Jambi mengalami penurunan IPP sebesar 0,83 poin dari 56,83 pada 2023 menjadi 56 pada 2024 (Gambar 3.5). Hal tersebut berbanding terbalik dengan nilai domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 46,67 menjadi 50. Dua domain mengalami stagnasi yaitu domain pendidikan (70) serta domain gender dan diskriminasi (50). Sementara itu dua domain lainnya mengalami penurunan yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan (65) serta domain lapangan dan kesempatan kerja (45). Capaian IPP Provinsi Jambi (56) berada di bawah capaian nasional (58,33). Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Jambi dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

Tabel 3.5 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jambi

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun /stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
 X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,07 menjadi 11,20	 X6 : Persentase Pemuda yang Merokok dari 24,96 menjadi 25,87 X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 12,98 menjadi 14,69
 X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,31 menjadi 6,16 X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,6 menjadi 0,34	 X8: Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,52 menjadi 0,34
 X9 : Tingkat Pengangguran Terbuka dari 11,01 menjadi 10,63	 X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 7,65 menjadi 3,58
 X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat dari 71,27 menjadi 87,55 X12 : Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 9,54 menjadi 11,21	 X13 : Angka perkawinan usia anak dari 6,89 menjadi 7,8 X14: Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dari 42,10 menjadi 40,59 X15: Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 20,82 menjadi 20,00

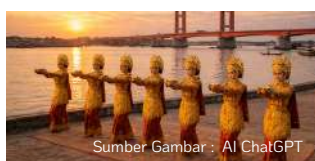
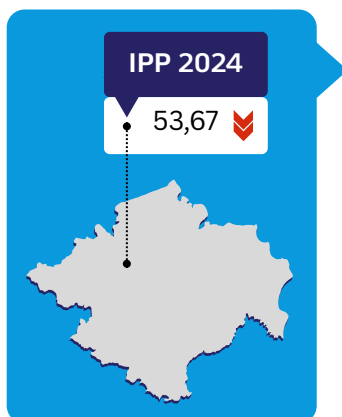
Terdapat dua domain yang nilainya berada dibawah capaian nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65 (nasional 70) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 50 (nasional 56,67). Sedangkan domain lainnya lebih memiliki capaian yang sama dengan capaian nasional, yaitu domain pendidikan (70), domain lapangan dan kesempatan kerja (45), serta domain partisipasi dan kepemimpinan (50).

Berdasarkan Tabel 3.5, terdapat enam indikator yang menjadi keunggulan dan tujuh indikator yang menjadi kelemahan Provinsi Jambi. Indikator yang menjadi keunggulan adalah rata-rata lama sekolah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, serta persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Sementara itu, persentase pemuda merokok, persentase remaja perempuan sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, serta seluruh indikator pada domain gender dan diskriminasi memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian nasional dan mengalami penurunan/stagnasi dibandingkan capaian sebelumnya.



Sumber Gambar : AI ChatGPT

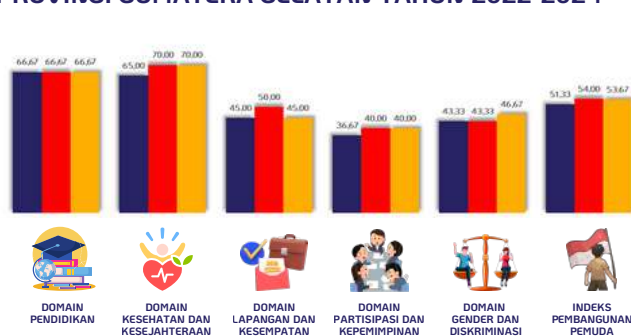
3.6 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Selatan memiliki persentase pemuda sebesar 23,11 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami penurunan nilai IPP sebesar 0,33 poin, dari 54 pada tahun sebelumnya menjadi 53,67. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya nilai domain kesempatan dan lapangan kerja dari 50 menjadi 45. Sementara itu, domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, serta partisipasi dan kepemimpinan mengalami stagnasi masing-masing di angka 66,67, 70, dan 40. Di sisi lain, domain gender dan diskriminasi menunjukkan peningkatan dari 43,33 menjadi 46,67, menandakan adanya perbaikan dalam aspek kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda.

Meskipun demikian, capaian IPP Provinsi Sumatera Selatan (53,67) masih berada di bawah capaian IPP nasional (58,33), dan tantangan utama tetap berada pada domain lapangan dan kesempatan kerja.

DOMAIN DAN IPP PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022-2024



Gambar 3.6 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024

Tabel 3.6 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sumatera Selatan

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 11,11 menjadi 8,23
	X8 : Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,40 menjadi 0,55
	X13 : Angka perkawinan usia anak dari 11,41 menjadi 8,45
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X2 : APK Sekolah Menengah dari 86,09 menjadi 85,33 X3 : APK Perguruan Tinggi dari 27,26 menjadi 26,41
	X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,41 menjadi 0,65 X6 : Persentase Pemuda yang Merokok dari 27,02 menjadi 27,5
	X15 : Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 22,11 menjadi 21,46

Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Sumatera Selatan dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.6. Domain pendidikan (66,67), domain partisipasi dan kepemimpinan (40), serta domain gender dan diskriminasi (46,67) memiliki nilai indeks lebih rendah dari capaian nasional masing-masing yaitu 70, 50, dan 56,67. Sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan (70) serta domain kesempatan dan lapangan kerja (45) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional.

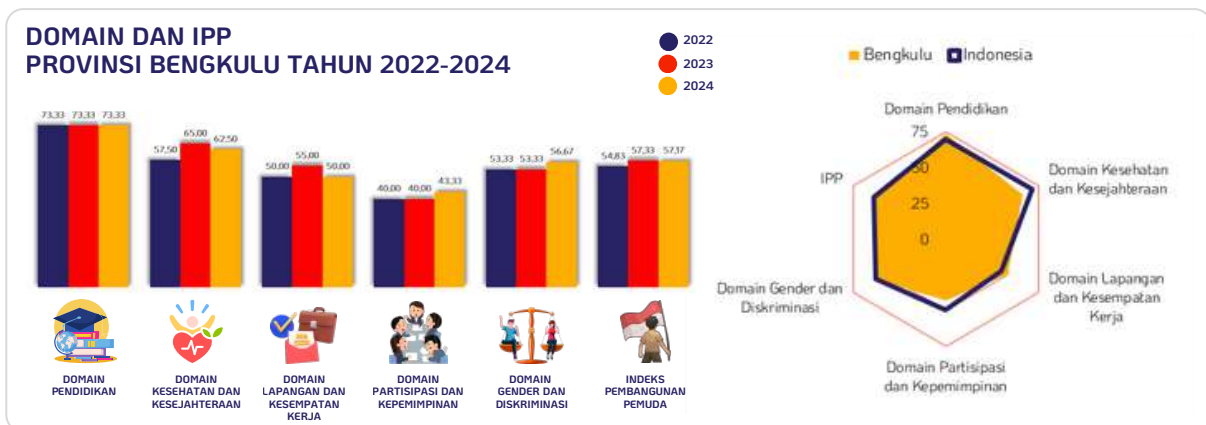
Berdasarkan tabel 3.6, keunggulan Provinsi Sumatera Selatan berada pada tiga indikator yaitu persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih serta angka perkawinan usia anak. Sedangkan kelemahannya ada lima indikator yaitu APK Sekolah Menengah, APK Perguruan Tinggi, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok dan Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

3.7 PROVINSI BENGKULU

Pada tahun 2024, Provinsi Bengkulu memiliki persentase pemuda sebesar 23,08 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami penurunan nilai IPP sebesar 0,16 poin, dari 57,33 pada tahun sebelumnya menjadi 57,17. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya nilai domain lapangan dan kesempatan kerja dari 55 menjadi 50 serta domain kesehatan dan kesejahteraan dari 65 menjadi 62,50. Sementara itu, domain pendidikan mengalami stagnasi di angka 73,33, namun di sisi lain domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat dari 40 menjadi 43,33, serta domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan dari 53,33 menjadi 56,67, menandakan adanya perbaikan dalam keterlibatan sosial dan kesetaraan pemuda.



Meskipun terdapat kemajuan di beberapa aspek, capaian IPP Bengkulu masih berada di bawah capaian IPP nasional, dan tantangan utama tetap berada pada aspek ketenagakerjaan serta kesehatan pemuda. Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Bengkulu dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2024

Domain pendidikan (73,33) dan domain lapangan dan kesempatan kerja (50) memiliki nilai indeks lebih tinggi dari capaian nasional masing-masing yaitu 70 dan 45. Sedangkan domain kesehatan dan kesejahteraan (62,50) serta domain partisipasi dan kepemimpinan (43,33) memiliki capaian lebih rendah dari nilai nasional yaitu 70 dan 50. Sementara itu, nilai indeks domain gender dan diskriminasi memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional yaitu 56,67.

Berdasarkan tabel 3.7, Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, persentase remaja perempuan yang sedang hamil dan tingkat pengangguran terbuka. Di sisi lain hanya ada tiga indikator yang perlu diperhatikan yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang merokok, dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi

Tabel 3.7 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Bengkulu

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,22 menjadi 11,28
		X2: APK Sekolah Menengah dari 93,85 menjadi 94,80
		X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 11,21 menjadi 10,07
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun /stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,39 menjadi 8,95
		X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,52 menjadi 9,34
		X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 27,12 menjadi 28,65
		X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 5,88 menjadi 5,78

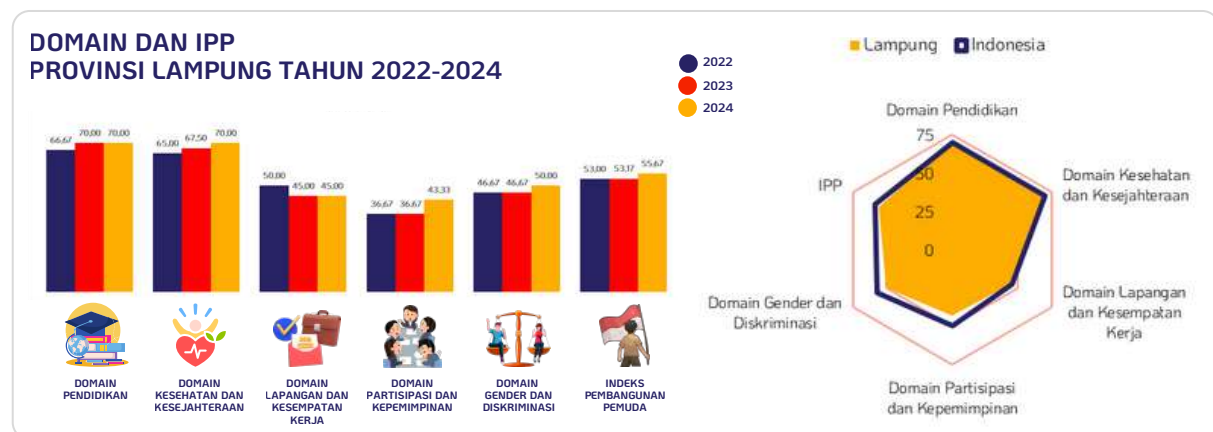


3.8 PROVINSI LAMPUNG

Pada tahun 2024, Provinsi Lampung memiliki persentase pemuda sebesar 22,71 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 2,5 poin, dari 53,17 pada tahun sebelumnya menjadi 55,67. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 67,50 menjadi 70, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 36,67 menjadi 43,33. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga menunjukkan perbaikan dari 46,67 menjadi 50, menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda. Sementara itu, domain pendidikan serta lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi masing-masing di angka 70 dan 45.



Meskipun tidak terdapat domain yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian IPP Provinsi Lampung masih berada 2,66 poin di bawah capaian nasional.



Gambar 3.8 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Lampung Tahun 2022-2024



Sumber Gambar : indonesiaikaya.com

Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Lampung dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.8. Domain pendidikan (70), domain kesehatan dan kesejahteraan (70), serta domain kesempatan dan lapangan kerja (45) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional. Sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan (43,33) lebih rendah dari nilai nasional (50). Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi (50) lebih rendah dari capaian nasional (56,67).

Berdasarkan tabel 3.8, keunggulan Provinsi Lampung berada pada empat indikator yaitu APK sekolah menengah, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan angka perkawinan usia anak. Meski begitu, masih terdapat tiga indikator yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dan berada di bawah capaian nasional, yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA.

Tabel 3.8 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Lampung

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X2: APK Sekolah Menengah dari 90,11 menjadi 90,19.
	X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 2,42 menjadi 1,66
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,39 menjadi 0,48.
	X13 : Angka perkawinan usia anak dari 7,11 menjadi 4,87
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 6,14 menjadi 7,49
	X11: Persentase pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 6,08 menjadi 4,33.
	X14: Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dari 38,64 menjadi 38,41

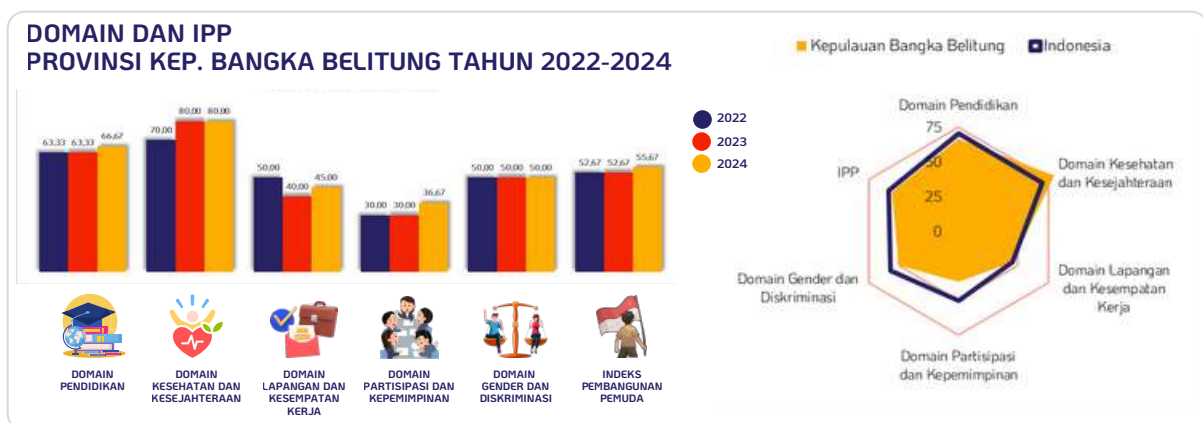


3.9 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase pemuda sebesar 22,97 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 3 poin, dari 52,67 pada tahun sebelumnya menjadi 55,67. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain pendidikan dari 63,33 menjadi 66,67, domain lapangan dan kesempatan kerja dari 40 menjadi 45, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 30 menjadi 36,67. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan tetap stabil di angka 80, menunjukkan capaian yang tinggi dan konsisten dalam aspek kesehatan pemuda.

Domain gender dan diskriminasi juga mengalami stagnasi di angka 50, menandakan belum adanya peningkatan signifikan dalam kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda. Secara keseluruhan, capaian IPP Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren positif, namun capaian IPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada 2,66 poin di bawah capaian nasional.



Gambar 3.9 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024

Tabel 3.9 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 5,61 menjadi 5,02	
X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,29 menjadi 0,25	
X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 3,13 menjadi 2,82	
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
X2 : APK Sekolah Menengah dari 88,39 menjadi 87,83.	

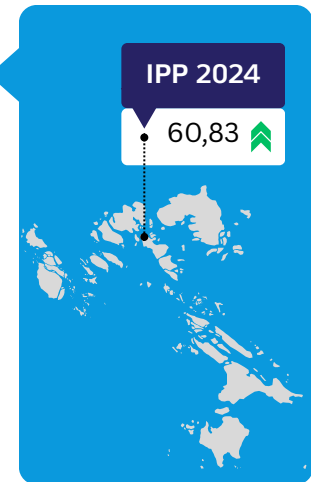


Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dapat dilihat pada Gambar. 3.9. Domain kesehatan dan kesejahteraan (80) memiliki nilai indeks lebih tinggi dari capaian nasional (70). Sedangkan domain pendidikan (66,67), domain partisipasi dan kepemimpinan (36,67), serta domain gender dan diskriminasi (50) memiliki capaian lebih rendah dari nilai nasional masing-masing yaitu 70, 50, dan 56,67. Sementara itu, domain kesempatan dan lapangan kerja (45) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional.

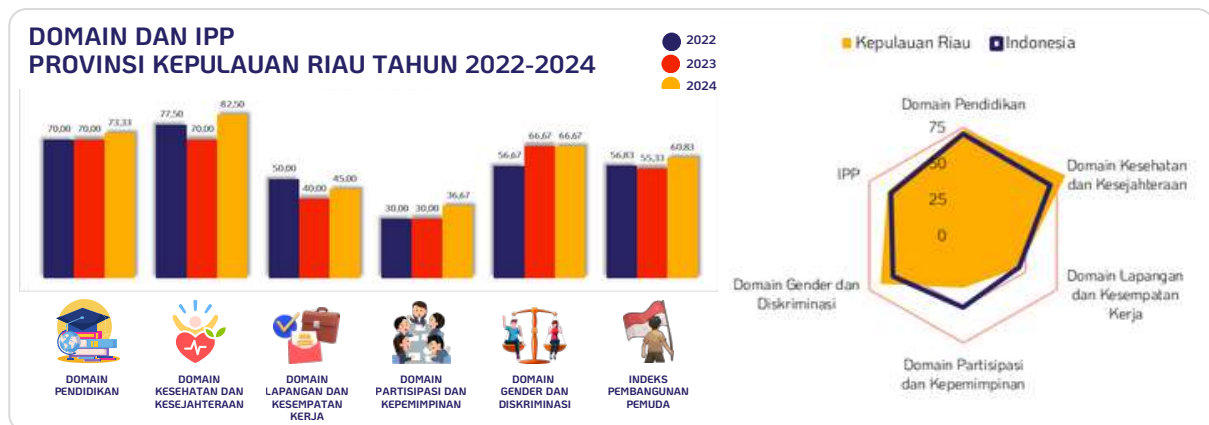
Berdasarkan Tabel 3.9, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan yang sedang hamil dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Namun provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam hal indikator APK sekolah menengah.

3.10 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau memiliki persentase pemuda sebesar 25,64 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 5,5 poin, dari 55,33 pada tahun sebelumnya menjadi 60,83. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain pendidikan dari 70 menjadi 73,33, domain kesehatan dan kesejahteraan dari 70 menjadi 82,50, serta domain lapangan dan kesempatan kerja dari 40 menjadi 45. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga mengalami peningkatan dari 30 menjadi 36,67, menunjukkan adanya perbaikan dalam keterlibatan sosial dan kepemudaan. Sementara itu, domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi di angka 66,67, menandakan belum adanya kemajuan signifikan dalam aspek kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda.



Secara keseluruhan, capaian IPP Kepulauan Riau menunjukkan tren positif dan berada di atas capaian nasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam memperkuat partisipasi sosial dan kesetaraan gender secara lebih merata.



Gambar 3.10 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Kepulauan Riau dan nasional dapat dilihat pada Gambar. Domain pendidikan (73,33) dan domain kesehatan dan kesejahteraan (82,50) memiliki nilai indeks lebih tinggi dari capaian nasional masing-masing yaitu 70 dan 70. Domain lapangan dan kesempatan kerja (45) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional. Sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan (36,67) lebih rendah dari nilai nasional (50). Begitu pula dengan domain gender dan diskriminasi (66,67) memiliki capaian lebih tinggi dari nilai nasional (56,67).

Tabel 3.10 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kepulauan Riau

+ LEBIH TINGGI DARI CAPAIAN NASIONAL DAN MENINGKAT DIBANDINGKAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA	PENDIDIKAN X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,58 menjadi 11,80 X2: APK Sekolah Menengah dari 91,59 menjadi 94,30
	KESAHATAN DAN KESEJAHTERAAN X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,36 menjadi 5,77 X5: Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 1,03 menjadi 0,09 X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 22,04 menjadi 20,52
	LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA X8: Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,32 menjadi 0,51
	GENDER DAN DISKRIMINASI X14: Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dari 41,43 menjadi 45,84
	LEBIH RENDAH DARI CAPAIAN NASIONAL DAN MENURUN/STAGNAN DIBANDINGKAN CAPAIAN SEBELUMNYA
	LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 12,2 menjadi 12,71
	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 4,63 menjadi 4,34

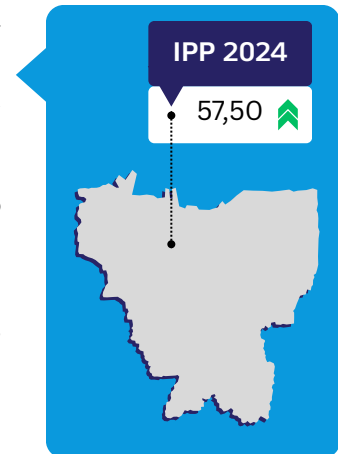
Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan performa positif pada tujuh indikator yaitu rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Meskipun demikian, masih terdapat dua indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu tingkat pengangguran terbuka dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi.



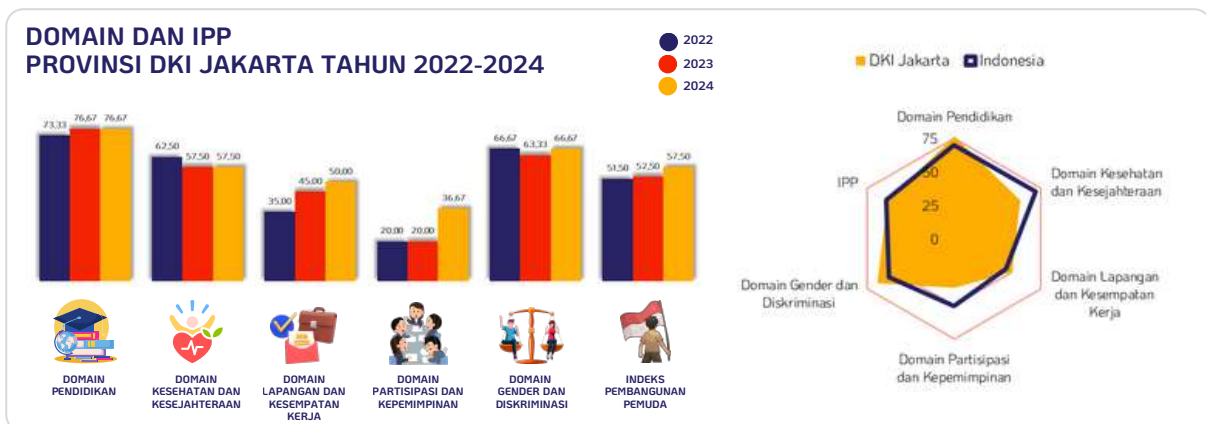
Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.11 PROVINSI DKI JAKARTA

Persentase pemuda di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 sebesar 23,36 persen dari seluruh jumlah penduduk DKI Jakarta (Badan Pusat Statistik, 2024). Tahun 2024, IPP Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 5 poin dari 52,5 pada tahun 2023 menjadi 57,5 dan menjadi capaian dan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Seperti pada Gambar 3.11, peningkatan nilai IPP Provinsi DKI Jakarta didukung domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari 20 di tahun 2023 menjadi 36,67 untuk tahun 2024. Di sisi lain, domain lapangan dan kesempatan kerja juga mengalami peningkatan 5 poin dan domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan 3,33 di tahun 2024.



Sedangkan domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami stagnasi berada di posisi nilai yang sama dengan tahun 2023 masing-masing 76,67 dan 57,5 poin. Capaian IPP Provinsi DKI Jakarta 0,83 poin lebih rendah dari nilai IPP nasional 58,33 (Gambar 3.11), terdapat tiga domain yang mendapatkan nilai di atas capaian nasional yaitu domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Kemudian dua domain yang memiliki nilai di bawah capaian nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain partisipasi dan kepemimpinan.



Gambar 3.11 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2024

Provinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan pada enam indikator yaitu rata-rata lama sekolah, APK perguruan tinggi, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda wirausaha kerah putih, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun memiliki kelemahan pada indikator persentase pemuda korban kejahatan dan persentase pemuda yang aktif berorganisasi yang menunjukkan penurunan capaian dan masih di bawah capaian nasional.

Tabel 3.11 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi DKI Jakarta

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
		X1 : Rata-Rata Lama Sekolah dari 12,36 menjadi 12,38 X3 : APK Perguruan Tinggi dari 40,05 menjadi 41,98
		X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 4,74 menjadi 4,5
		X8 : Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,78 menjadi 0,95
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
		X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,43 menjadi 0,8
		X11 : Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 3,96 menjadi 3,63



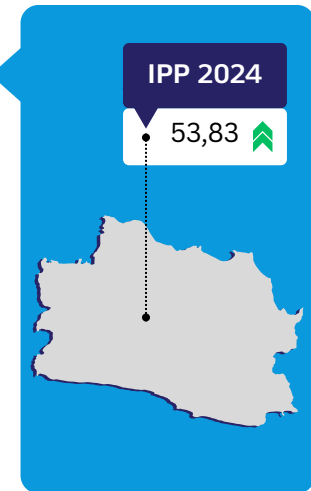
Sumber Gambar : AI ChatGPT



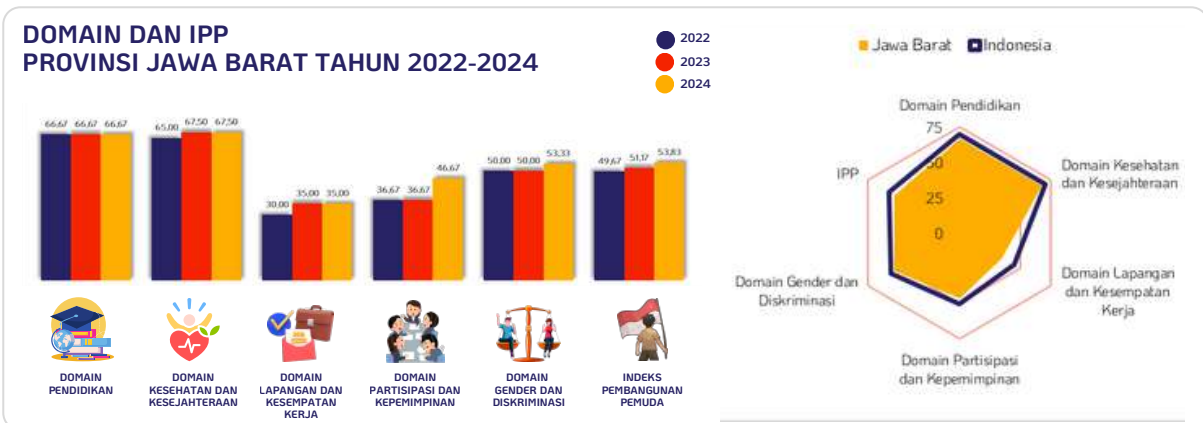
Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.12 PROVINSI JAWA BARAT

Persentase pemuda di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 sebesar 23,81 persen dari keseluruhan penduduk dari satu Provinsi (Badan Pusat Statistik, 2024), Provinsi Jawa Barat memiliki nilai IPP sebesar 53,83 naik sebesar 2,66 poin dibandingkan tahun 2023 (Gambar 3.12). Kenaikan IPP pada Provinsi Jawa Barat dikarenakan adanya kenaikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi dengan masing-masing kenaikan 10 poin dan 3,33 poin. Ketiga domain lainnya, yaitu domain pendidikan, domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki capaian 4,5 poin lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 58,33.



Hal ini dikarenakan semua nilai domain IPP berada di bawah capaian nasional (Gambar 3.12). Capaian domain pendidikan sebesar 66,67 berada di bawah capaian nasional yang sebesar 70. Selanjutnya domain kesehatan dan kesejahteraan memperoleh nilai 67,5 dan masih berada di bawah capaian nasional dengan besaran capaian 70. Capaian nasional untuk domain lapangan dan kesempatan kerja yaitu 45, berada jauh di atas capaian provinsi sebesar 35 dengan selisih 10 poin. Domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 46,67 dan nilai tersebut di bawah perolehan capaian nasional yaitu 50. Domain gender dan diskriminasi juga mendapatkan nilai di bawah capaian nasional yaitu 56,67 dengan selisih 3,33 poin.



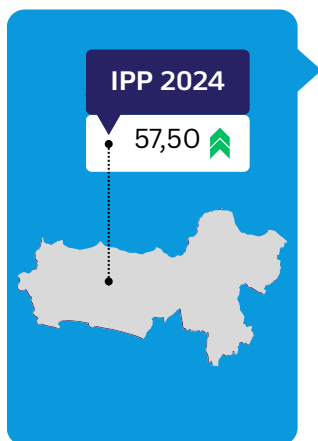
Gambar 3.12 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 3.12, Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan pada tiga indikator yaitu persentase remaja perempuan yang sedang hamil, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut tidak sejalan dengan capaian angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan dan persentase pemuda wirausaha kerah putih yang menunjukkan penurunan capaian dan masih di bawah capaian nasional.

Tabel 3.12 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Barat

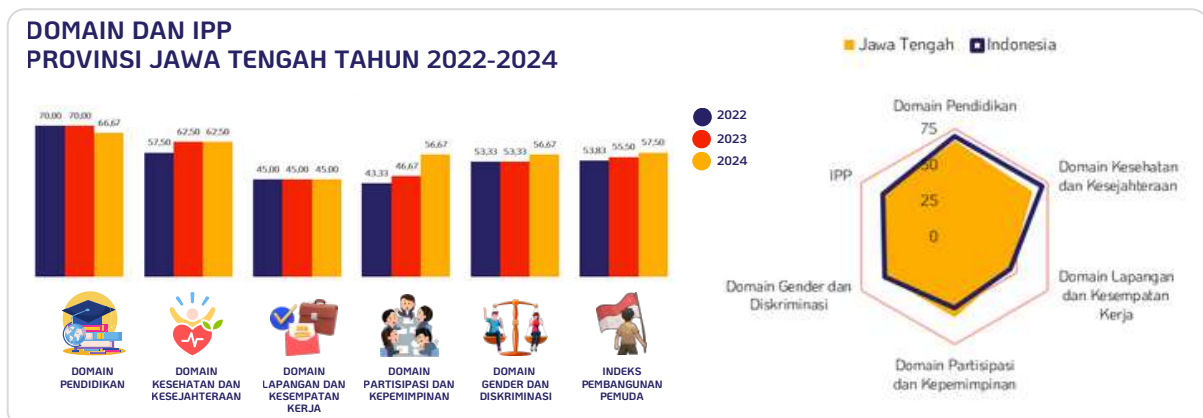
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
		X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 5,01 menjadi 4,26
		X13 : Angka perkawinan usia anak dari 6,79 menjadi 5,78 X15 : Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 24,74 menjadi 27,28
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
		X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 6,34 menjadi 7,69 X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,76 menjadi 0,81 X6 : Persentase Pemuda yang Merokok dari 28,67 menjadi 28,96
		X8 : Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,55 menjadi 0,36

3.13 PROVINSI JAWA TENGAH



Tahun 2024, persentase pemuda Provinsi Jawa Tengah sebesar 21,82 persen dari seluruh jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian IPP Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 57,5 meningkat 2 poin dari 55,5 di tahun 2023 (Gambar 3.13). Hal ini ditopang oleh domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami peningkatan sebesar 10 poin dibandingkan tahun 2023. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga mengalami kenaikan yaitu 56,67 di tahun 2024 (53,33 di tahun 2023). Domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi sedangkan domain pendidikan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 66,67 dibandingkan tahun 2023 sebesar 70. Hal ini harus menjadi perhatian lebih untuk pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki capaian IPP 0,83 poin lebih rendah dibandingkan capaian IPP nasional (Gambar 3.13). Domain yang memiliki nilai di bawah nasional yaitu domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan masing-masing yaitu 66,67 dan 62,50 sedangkan capaian nasional masing-masing sebesar 70 dan 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan mendapatkan nilai lebih tinggi yaitu 56,67 dibandingkan dengan capaian nasional hanya 50. Domain yang nilainya sama dengan capaian nasional yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi.



Gambar 3.13 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Tabel 3.13 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Tengah

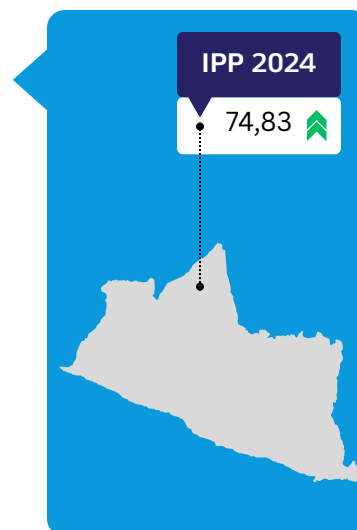
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
		X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,49 menjadi 0,34
		X10 : Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat dari 80,29 menjadi 86,35 X11 : Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 8,31 menjadi 10,16 X12 : Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/ Pendapat dalam Rapat dari 6,91 menjadi 12,39
		X15 : Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 30,15 menjadi 32,8
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/ stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
		X2 : APK Sekolah Menengah dari 89,06 menjadi 90,18
		X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 7,28 menjadi 8,48 X6 : Persentase Pemuda yang Merokok dari 26,37 menjadi 27,41

Berdasarkan Tabel 3.13, Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan pada lima indikator persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun memiliki kelemahan pada indikator APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, dan persentase pemuda merokok.

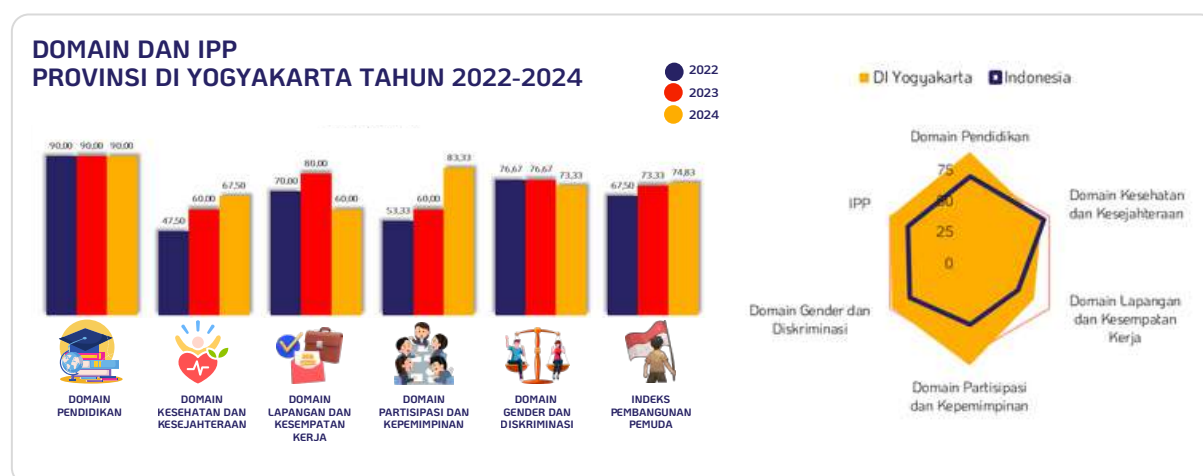


3.14 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun 2024, persentase pemuda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 22,83 persen (Badan Pusat Statistik, 2024), Capaian IPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,50 poin yaitu 74,83 dari 73,33 di tahun 2023. Peningkatan capaian IPP pada Provinsi DI Yogyakarta ditopang oleh domain partisipasi dan kepemimpinan yang meningkat sangat signifikan dengan selisih nilai 23,33 poin yaitu 60 pada tahun 2023 dan 83,33 pada tahun 2024. Selain itu, domain kesehatan dan kesejahteraan juga mengalami peningkatan yaitu 60 pada tahun 2023 meningkat 7,50 poin menjadi 67,50 di tahun 2024. Domain pendidikan mengalami stagnasi selama tahun 2022-2024 meskipun demikian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang memiliki capaian paling baik pada domain pendidikan.



Adapun domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai 80 pada tahun 2023 dan 60 pada tahun 2024. Hal ini juga terjadi penurunan pada domain gender dan diskriminasi dari 76,33 pada tahun 2023 menjadi 73,33 pada tahun 2024.



Gambar 3.14 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2022-2024

Nilai IPP DIY sebesar 74,83 jauh mengungguli nilai IPP nasional sebesar 58,33. Hal ini ditopang oleh hampir di semua domain kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan (Gambar 3.14). Domain yang memiliki nilai di atas capaian nasional adalah domain pendidikan sebesar 90, dibandingkan capaian nasional sebesar 70. Domain lain yang memiliki nilai di atas capaian nasional yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja dengan capaian nilai 60, domain partisipasi dan kepemimpinan 83,33 serta gender dan diskriminasi 73,33. Adapun pada domain kesehatan dan kesejahteraan capaian nasional lebih tinggi yaitu 70,00 dibandingkan dengan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 67,50.



Provinsi DI Yogyakarta memiliki keunggulan pada enam indikator yaitu APK sekolah menengah, persentase remaja perempuan sedang hamil, seluruh indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan dan angka perkawinan usia anak karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan indikator angka kesakitan pemuda dan persentase pemuda merokok menunjukkan penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dan masih di bawah capaian nasional.

Tabel 3.14 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi DI Yogyakarta

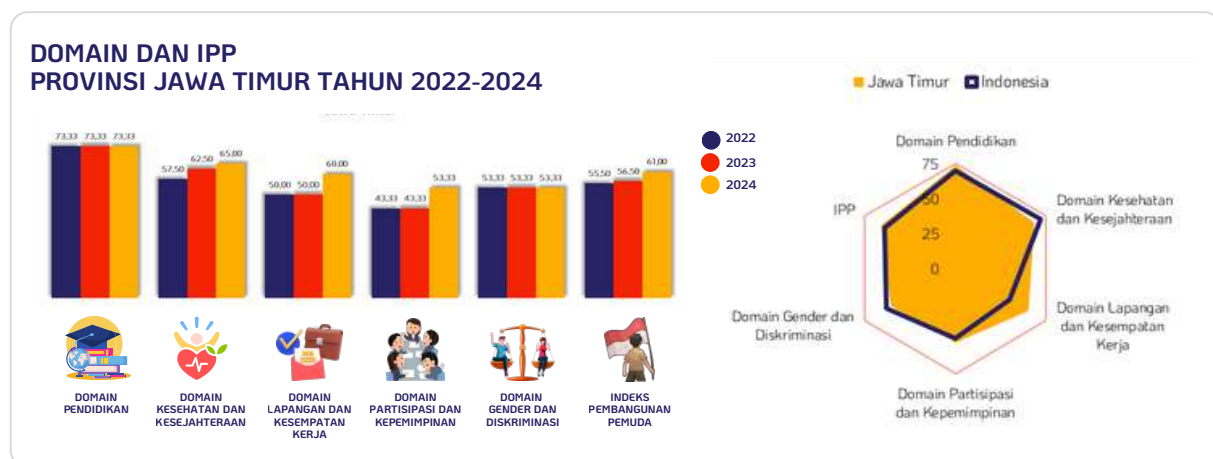
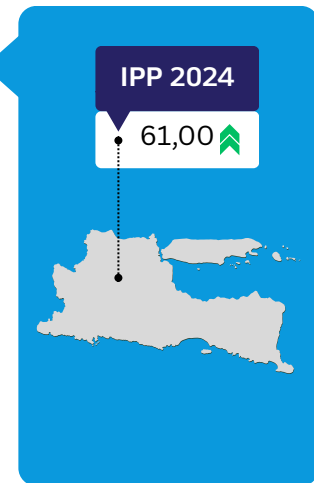
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X2 : APK Sekolah Menengah dari 92,55 menjadi 95,27
	X7 : Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 23,33 menjadi 7,35
	X10 : Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 76,31 menjadi 90,23 X11 : Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 11,84 menjadi 24,64 X12 : Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 15,04 menjadi 21,76
	X13 : Angka perkawinan usia anak dari 2,05 menjadi 0,64
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 6,39 menjadi 7,99 X6 : Persentase Pemuda yang Merokok dari 24,29 menjadi 25,77



Sumber Gambar : jogjapro.go.id

3.15 PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun 2024, persentase penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 20,87 persen dan termasuk provinsi dengan persentase terendah nasional (Badan Pusat Statistik, 2024). Dengan nilai IPP sebesar 61,0 di tahun 2024, Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 4,5 poin jika dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 56,50 (Gambar 3.15). Kenaikan IPP Jawa Timur disebabkan adanya peningkatan pada domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu dari 62,50 pada 2023 menjadi 65 di tahun 2024, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami kenaikan 10 poin dari 50,0 di tahun 2023 menjadi 60,0 di tahun 2024, serta domain partisipasi dan Kepemimpinan yang meningkat dari 43,33 di tahun 2023 menjadi 53,33 di tahun 2024. Selanjutnya, domain pendidikan, serta domain gender dan diskriminasi tidak mengalami perubahan nilai.



Gambar 3.15 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2022-2024

IPP Provinsi Jawa Timur memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan IPP secara nasional (Gambar 3.15). Domain yang memiliki skor lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu domain pendidikan dengan nilai 73,33 (nasional 70), domain lapangan dan kesempatan kerja dengan selisih 15 poin yaitu 60 dan 45 untuk skor nasional serta domain partisipasi dan kepemimpinan 53,33 (nasional 50). Domain gender dan diskriminasi memiliki capaian yang stagnasi dari tahun sebelumnya. Meskipun nilai domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan pada tahun 2024, namun pemerintah daerah Jawa Timur perlu memberikan perhatian khusus dikarenakan capaian tersebut masih di bawah capaian nasional yaitu 70.



Tabel 3.15 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Jawa Timur

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X5 : Persentase Pemuda Korban Kejahatan dari 0,4 menjadi 0,33
	X8 : Persentase pemuda wirausaha kerah putih dari 0,66 menjadi 0,81 X9 : Tingkat Pengangguran Terbuka dari 12,98 menjadi 11,08
	X10 : Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 76,85 menjadi 86,72 X11 : Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 5,76 menjadi 7,44 X12 : Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 7,24 menjadi 10,57
	X14 : Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dari 42,26 menjadi 42,95 X15 : Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal dari 25,45 menjadi 27,46
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/ stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X4 : Angka Kesakitan Pemuda dari 6,24 menjadi 6,99

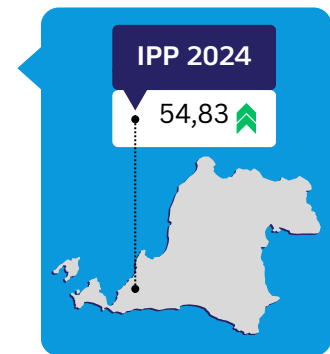
Berdasarkan Tabel 3.15, Provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan pada seluruh indikator domain lapangan dan kesempatan kerja dan domain partisipasi dan kepemimpinan selain itu juga pada indikator persentase pemuda korban kejahatan dan persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal karena memiliki capaian di atas capaian nasional dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya terdapat satu indikator yang menunjukkan penurunan capaian dan masih di bawah capaian nasional yakni angka kesakitan pemuda.



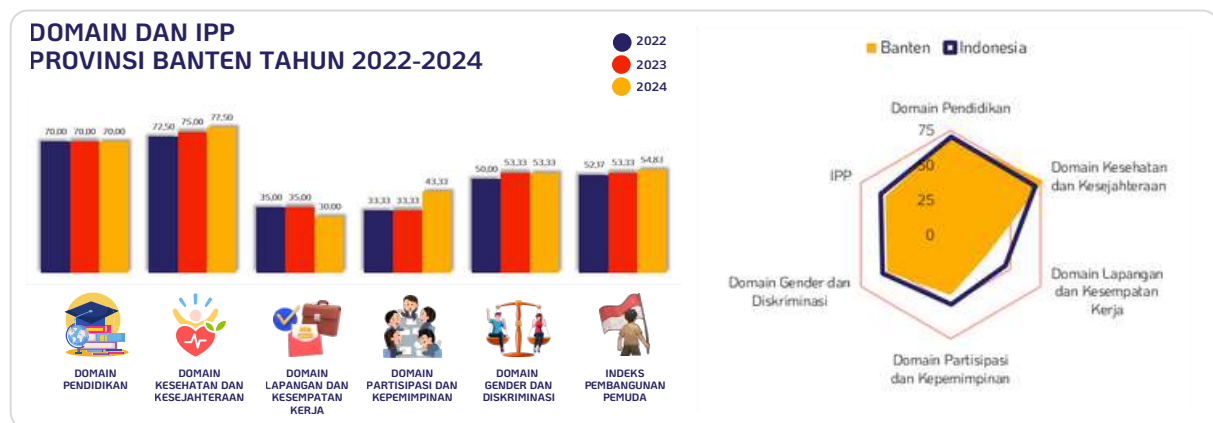
Sumber Gambar : AlBemini

3.16 PROVINSI BANTEN

Pada tahun 2024, Provinsi Banten memiliki persentase pemuda sebesar 23,52 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Banten mencapai 54,83 atau meningkat 1,50 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 53,33. Peningkatan IPP ini terutama dipengaruhi oleh naiknya nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dari 75 pada tahun 2023 menjadi 77,50 pada tahun 2024, serta domain partisipasi dan kepemimpinan yang meningkat dari 33,33 menjadi 43,33 pada periode yang sama.



Sementara itu, dua domain lainnya cenderung stagnan, yaitu domain pendidikan yang tetap berada pada angka 70 serta domain gender dan diskriminasi yang tidak berubah pada nilai 53,33. Namun demikian Provinsi Banten juga menghadapi tantangan pada domain lapangan dan kesempatan kerja yang mengalami penurunan sebesar 5 poin, dari 35 menjadi 30.



Gambar 3.16 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Banten Tahun 2022-2024

Provinsi Banten memiliki capaian IPP 3,50 poin lebih rendah dari capaian IPP nasional (Gambar 3.16). Provinsi Banten masih tertinggal pada domain lapangan dan kesempatan kerja (30 dibandingkan 45 nasional), domain partisipasi dan kepemimpinan (43,33 dibandingkan 50 nasional) dan domain gender dan diskriminasi (53,33 dibandingkan 56,67 nasional). Domain pendidikan (70) memiliki capaian yang sama dengan nasional. Adapun domain kesehatan dan kesejahteraan (77,50) lebih tinggi dibandingkan nasional.

Berdasarkan tabel 3.16, Provinsi Banten memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu APK perguruan tinggi, persentase pemuda korban kejahatan, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal, hal ini menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut memiliki capaian di atas capaian nasional dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kelemahannya ada tiga indikator yaitu rata-rata lama sekolah, persentase pemuda merokok, dan persentase pemuda wirausaha kerah putih.

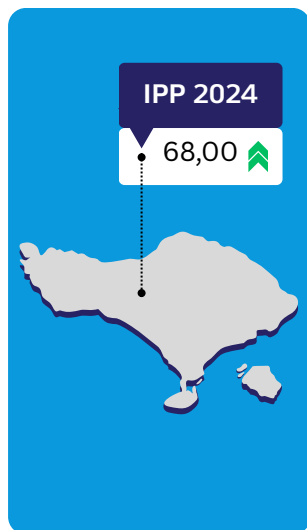
Tabel 3.16 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Banten

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X3: APK Perguruan Tinggi dari 32,31 menjadi 32,40
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,58 menjadi 0,20
	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 3,86 menjadi 3,37 X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dari 26,96 menjadi 29,92
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,12 menjadi 11,09
	X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 25,6 menjadi 27,25
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,66 menjadi 0,33

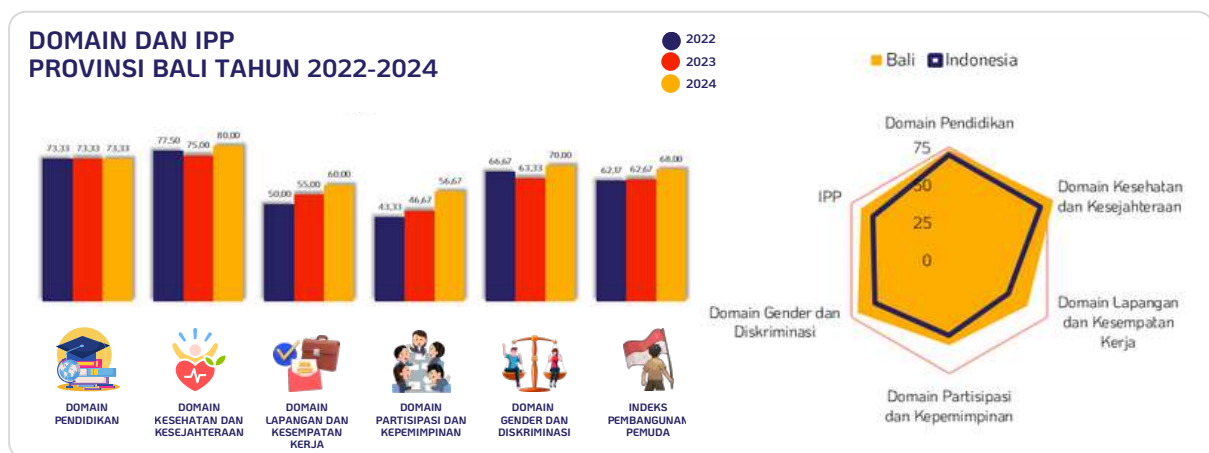


Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.17 PROVINSI BALI



Pada tahun 2024, Provinsi Bali memiliki persentase pemuda sebesar 22,74 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bali memiliki nilai 68, meningkat 5,33 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada pada angka 62,67. Kenaikan nilai ini didorong oleh membaiknya domain kesehatan dan kesejahteraan yang naik dari 75 pada tahun 2023 menjadi 80 pada tahun 2024, serta domain partisipasi dan kepemimpinan yang menjadi lebih baik dari 46,67 menjadi 56,67. Selain itu, domain lapangan dan kesempatan kerja juga mengalami peningkatan dari 55 menjadi 60, sedangkan domain gender dan diskriminasi juga memiliki nilai yang lebih baik dari 63,33 menjadi 70. Di sisi lain, domain pendidikan relatif tidak berubah karena tetap berada di angka 73,33 pada dua tahun tersebut.



Gambar 3.17 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Bali Tahun 2022-2024

Berdasarkan Gambar 3.17, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Bali tahun 2024 lebih tinggi 9,67 poin dibandingkan IPP nasional. Pada domain pendidikan, Bali mencapai 73,33, melampaui nilai nasional yang sebesar 70. Kondisi serupa terlihat pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan, dengan Bali mencatat angka 80, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional 70.



Sumber Gambar : AI ChatGPT

Selanjutnya, domain lapangan dan kesempatan kerja di Bali berada pada angka 60, lebih baik dibandingkan nasional yang hanya mencapai 45. Sementara itu, domain partisipasi dan kepemimpinan di Provinsi Bali sebesar 56,67, juga lebih baik dibandingkan nasional sebesar 50. Hal yang sama juga tampak pada domain gender dan diskriminasi, dengan capaian Bali 70, lebih baik daripada nilai nasional 56,67. Secara keseluruhan, capaian IPP Provinsi Bali tahun 2024 mencapai 68, lebih baik dibandingkan nilai IPP nasional yang tercatat sebesar 58,33.

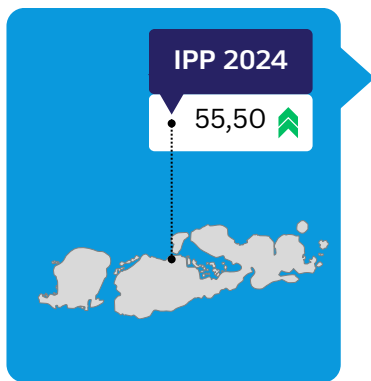
Berdasarkan tabel 3.17, Provinsi Bali memiliki keunggulan hampir pada semua indikator, yakni terdapat sepuluh indikator yang memiliki capaian yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dan melebihi capaian nasional, diantaranya yaitu APK perguruan tinggi, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, tingkat pengangguran terbuka, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, dan seluruh indikator pada domain gender dan diskriminasi. Sedangkan kelemahannya hanya ada satu indikator yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih.

Tabel 3.17 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Bali

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
 PENDIDIKAN	X3: APK Perguruan Tinggi dari 36,46 menjadi 38,15
 KESELAMATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,08 menjadi 5,36 X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,11 menjadi 0,04 X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 16,60 menjadi 15,42
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 6,24 menjadi 3,77
 PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 75,43 menjadi 82,84 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 4,79 menjadi 11,50
 GENDER DAN DISKRIMINASI	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 4,71 menjadi 3,37 X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 46,62 menjadi 49,11 X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dari 41,50 menjadi 44,36
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,55 menjadi 0,46

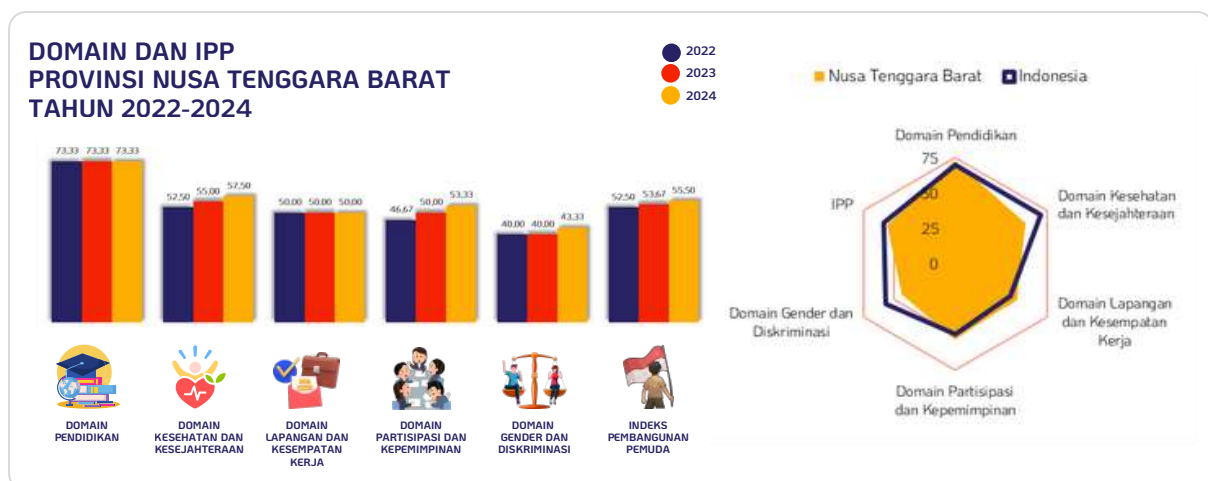


3.18 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Pada tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase pemuda sebesar 22,89 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 55,50, meningkat dari capaian tahun 2023 yang berada di angka 53,67. Peningkatan ini terutama terlihat pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yang naik dari 55 pada tahun 2023 menjadi 57,50 pada tahun 2024. Perbaikan juga terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan, dari 50 menjadi 53,33.

Sementara itu, domain pendidikan tetap stabil dengan capaian 73,33 pada dua tahun berturut-turut, begitu juga dengan domain lapangan dan kesempatan kerja yang tidak mengalami perubahan karena masih berada pada angka 50. Tantangan pada Provinsi NTB terdapat pada domain gender dan diskriminasi yang lebih tinggi dari 40 menjadi 43,33.



Gambar 3.18 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,83 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan IIPP nasional tahun 2024. Domain pendidikan di NTB (73,33) lebih tinggi dibandingkan capaian nasional (70). Pada domain lapangan dan kesempatan kerja, nilai NTB (50) lebih baik daripada nasional (45). Hal serupa terlihat pada domain partisipasi dan kepemimpinan, dengan NTB mencatat 53,33, lebih tinggi dibandingkan nasional 50. Sebaliknya, domain kesehatan dan kesejahteraan di NTB mencapai 57,50, masih di bawah capaian nasional 70. Pada domain gender dan diskriminasi, NTB hanya memperoleh 43,33, jauh lebih rendah dibandingkan nasional 56,67.

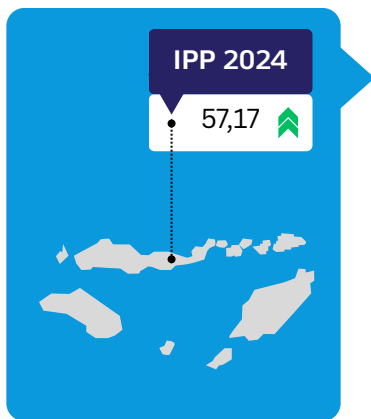
Berdasarkan tabel 3.18, provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunggulan pada delapan indikator yaitu seluruh indikator pada domain pendidikan, persentase remaja perempuan sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat sma ke atas. Sedangkan kelemahannya ada empat indikator yaitu persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Tabel 3.18 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi NTB

	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,49 menjadi 11,51 X2: APK Sekolah Menengah dari 93,27 menjadi 94,08 X3: APK Perguruan Tinggi dari 32,99 menjadi 34,80
	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 7,13 menjadi 6,16
	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 6,95 menjadi 5,96
	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 87,31 menjadi 91,84 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 9,72 menjadi 11,67
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 40,15 menjadi 44,55
	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,92 menjadi 1,07 X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 29,25 menjadi 30,04
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 7,11 menjadi 3,82
	X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dari 20,68 menjadi 20,10

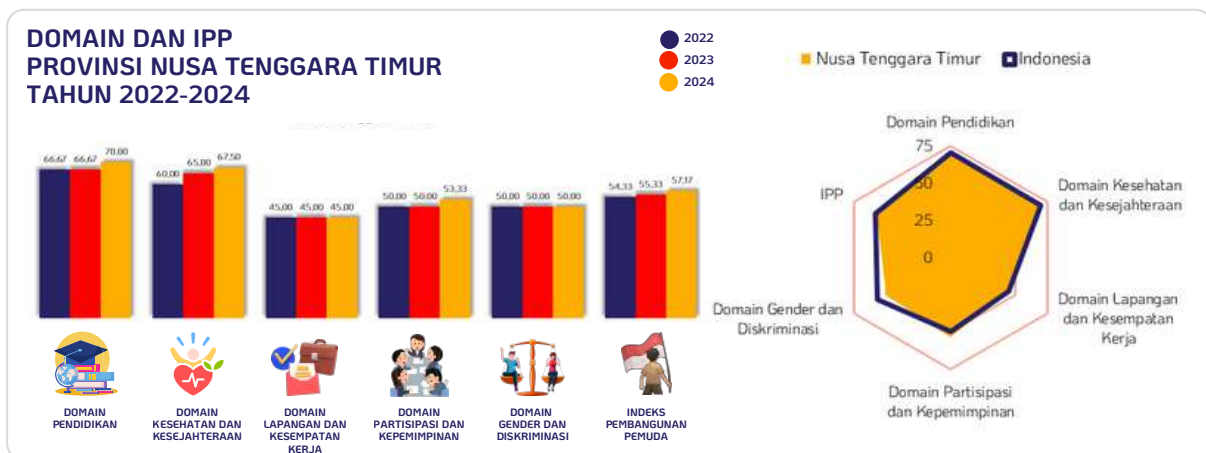


3.19 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Pada tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki persentase pemuda sebesar 24,00 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 57,17, naik sebesar 1,84 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada pada angka 55,33. Peningkatan ini terutama terlihat pada domain pendidikan, yang mengalami kenaikan dari 66,67 pada 2023 menjadi 70 pada 2024. Selain itu, domain kesehatan dan kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan dari 65 menjadi 67,50, serta domain partisipasi dan kepemimpinan yang meningkat dari 50 menjadi 53,33.

Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja tidak mengalami perubahan karena tetap berada pada angka 45. Hal yang sama juga terlihat pada domain gender dan diskriminasi yang stabil di angka 50 pada dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, kenaikan IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi pemuda.



Gambar 3.19 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024



Sumber Gambar : AI ChatGPT

Secara keseluruhan, nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi NTT juga masih di bawah capaian nasional, dengan angka 57,17 berbanding 58,33. atau 1,16 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan IPP nasional. Hal ini karena pada domain pendidikan di NTT berada tepat di angka 70, menyamai capaian nasional. Demikian pula, domain lapangan dan kesempatan kerja bagi NTT dan nasional sama-sama tercatat sebesar 45. Sementara itu, domain kesehatan dan kesejahteraan di NTT sedikit di bawah nilai nasional, yaitu 67,50 berbanding 70. Perbedaan yang lebih mencolok terlihat pada domain gender dan diskriminasi. Capaian NTT berada di angka 50, yang masih di bawah nilai nasional sebesar 56,67.

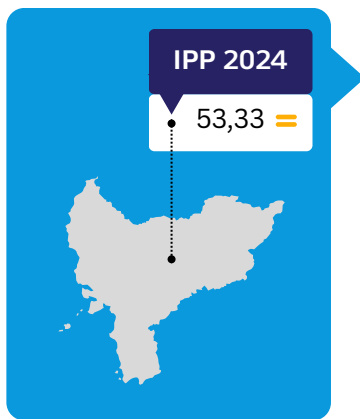
Berdasarkan Tabel 3.19, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keunggulan pada delapan indikator yaitu APK sekolah menengah, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, tingkat pengangguran terbuka, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Sedangkan terdapat dua indikator yaitu APK perguruan tinggi, dan persentase pemuda wirausaha kerah putih yang memiliki capaian di bawah capaian nasional sekaligus menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.19 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi NTT

+ Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
 PENDIDIKAN	X2: APK Sekolah Menengah dari 89,57 menjadi 90,49
 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,36 menjadi 0,24 X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 23,87 menjadi 23,72
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7,97 menjadi 7,42
 PARTISIPASI DAN KEMASYARAKATAN	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 83,14 menjadi 87,67 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 8,43 menjadi 10,95
 GENDER DAN DISKRIMINASI	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 4,97 menjadi 4,70 X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 43,03 menjadi 44,38
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
 PENDIDIKAN	X3: APK Perguruan Tinggi dari 32,65 menjadi 31,47
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,19 menjadi 0,14

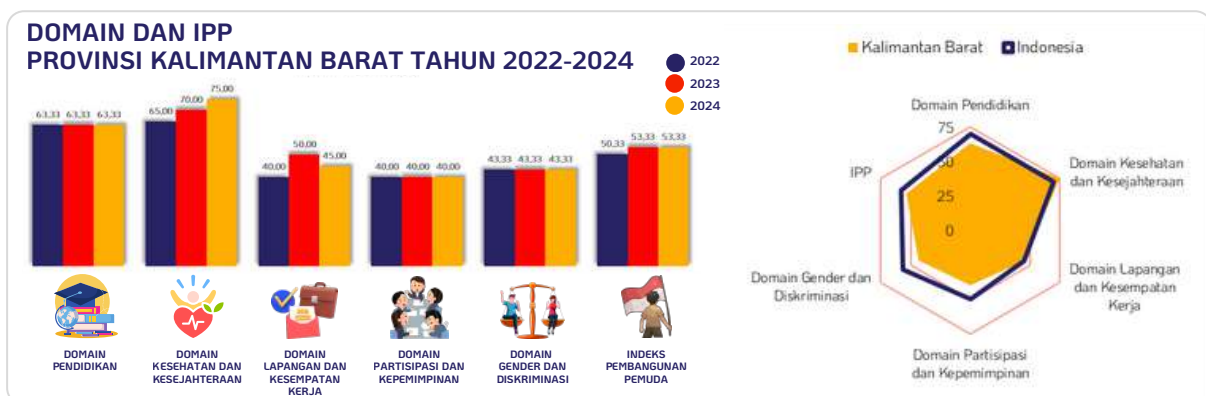


3.20 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Barat memiliki persentase pemuda sebesar 23,84 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Barat sebesar 53,33, sama dengan capaian pada tahun 2023. Meski secara total tidak mengalami peningkatan, terdapat dinamika pada beberapa domain penyusun. Domain kesehatan dan kesejahteraan menunjukkan perbaikan dari 70 pada 2023 menjadi 75 pada 2024, yang menjadi salah satu poin positif. Tantangan Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yang mengalami penurunan dari 50 menjadi 45.

Selain itu domain pendidikan tetap stabil di angka 63,33, demikian pula dengan domain partisipasi dan kepemimpinan yang bertahan di angka 40, serta domain gender dan diskriminasi yang tidak berubah pada nilai 43,33.



Gambar 3.20 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022-2024

Secara keseluruhan, hasil ini menempatkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Barat di angka 53,33, yang berada di bawah nilai IPP Nasional 58,33. Hal tersebut dikarenakan domain partisipasi dan kepemimpinan Provinsi Kalimantan Barat hanya mencapai 40, di bawah nilai nasional 50. Demikian pula untuk domain pendidikan, Kalimantan Barat mencatatkan angka 63,33, masih tertinggal dari skor nasional yang mencapai 70. Terakhir, domain gender dan diskriminasi juga menunjukkan selisih yang masih tinggi dengan capaian. 43,33, lebih rendah dibandingkan capaian nasional 56,67.

Tabel 3.20 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Barat

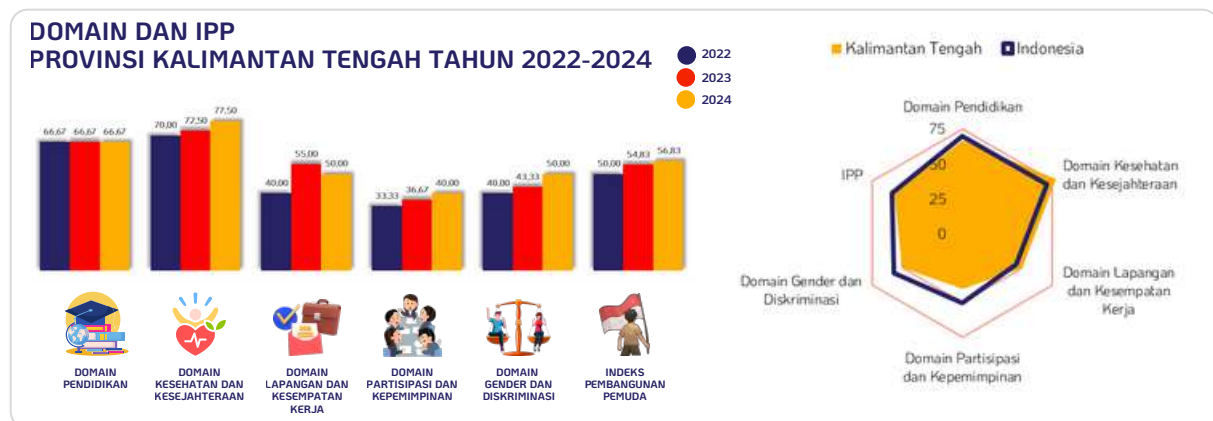
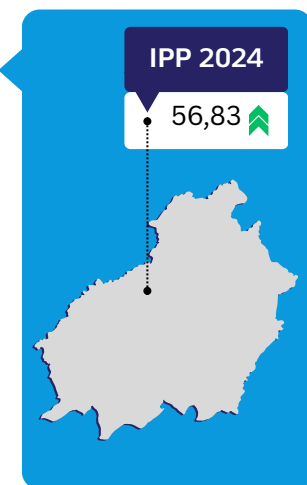
Berdasarkan Tabel 3.20, Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunggulan pada tiga indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan kelemahannya ada lima indikator yaitu APK sekolah menengah, APK perguruan tinggi, persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas.



+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,48 menjadi 5,36	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,41 menjadi 0,29
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X2: APK Sekolah Menengah dari 86,56 menjadi 85,15	
	X3: APK Perguruan Tinggi dari 25,74 menjadi 24,99	
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,46 menjadi 0,28	
	X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 8,54 menjadi 5,66	
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 39,91 menjadi 38,21	

3.21 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki persentase pemuda sebesar 23,02 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 2 poin dari 54,83 pada 2023 menjadi 56,83 pada tahun 2024 (Gambar 3.21). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 72,50 menjadi 77,50, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 36,67 menjadi 40. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga menunjukkan perbaikan dari 43,33 menjadi 50, menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan dan pengurangan diskriminasi terhadap pemuda. Sementara itu, domain pendidikan mengalami stagnasi di angka 66,67. Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki capaian IPP memiliki capaian 1,5 poin lebih rendah dari capaian IPP nasional. Hal ini karena domain pendidikan (66,67), memiliki nilai indeks lebih kecil dari nilai nasional (70), begitu pula domain partisipasi dan kepemimpinan (40) lebih rendah dari capaian nasional (50), serta domain gender dan diskriminasi (50) lebih rendah dari capaian nasional (56,67). Sedangkan, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan mencapai 77,50, lebih tinggi dibandingkan nilai nasional 70. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja (50) lebih tinggi dari capaian nasional (45)

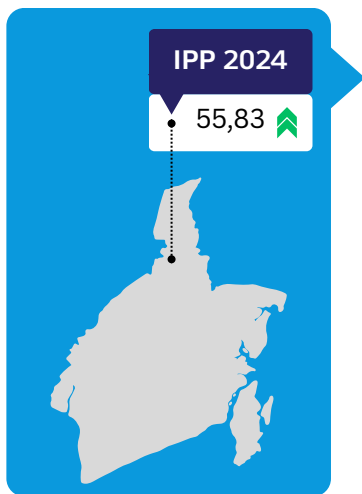
Tabel 3.21 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Tengah

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	PEPENDIDIKAN	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 10,99 menjadi 11,15
	Kesehatan dan Kesejahteraan	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 5,26 menjadi 3,10 X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,38 menjadi 0,17
	LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 10,17 menjadi 9,26
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 3,86 menjadi 2,23 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 5,89 menjadi 5,46

Berdasarkan Tabel 3.21, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu rata-rata lama sekolah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan kelemahannya ada dua indikator yaitu persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

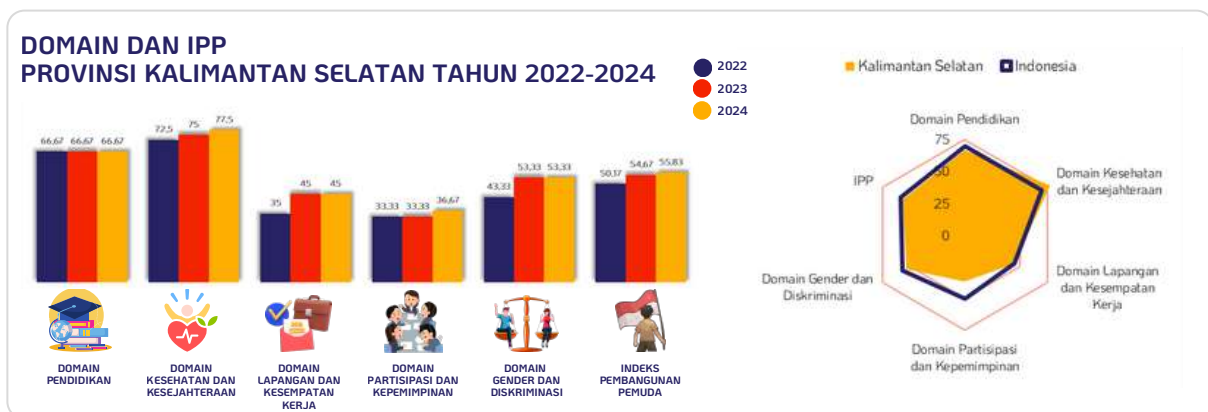


3.22 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki persentase pemuda sebesar 22,73 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan nilai IPP sebesar 1,17 poin, dari 54,67 pada tahun sebelumnya menjadi 55,83 (Gambar 3.22). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 75 menjadi 77,50, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 33,33 menjadi 36,67. Di sisi lain, domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, dan gender dan diskriminasi mengalami stagnasi masing-masing di angka (66,67), (45) dan (53,33).

Capaian IPP Provinsi Kalimantan Selatan 2,50 poin lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPP nasional sebesar 58,33.



Gambar 3.22 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

Tabel 3.22 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Selatan

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,42 menjadi 0,24 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 10,96 menjadi 9,78
	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 10,89 menjadi 9,99
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X3: APK Perguruan Tinggi dari 28,10 menjadi 28,06
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Usia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 41,61 menjadi 41,08

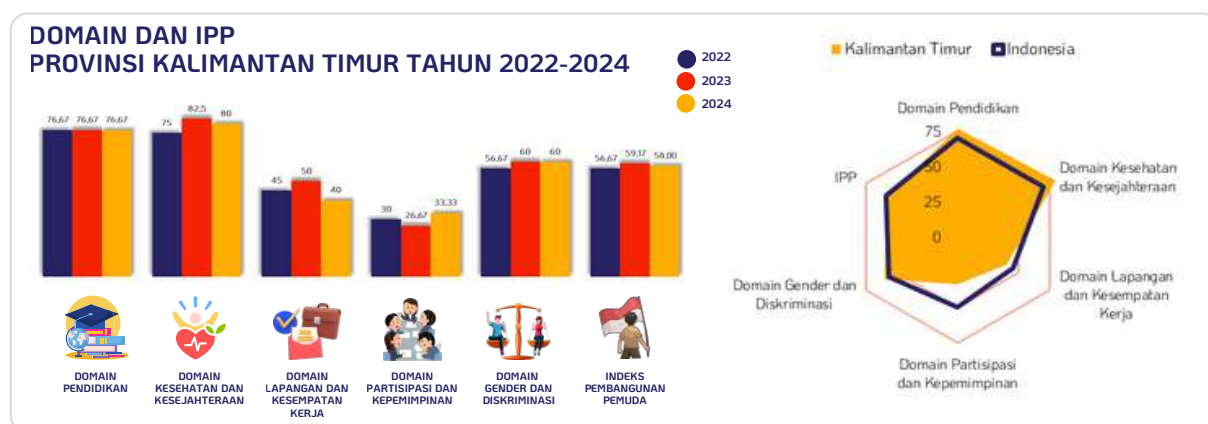
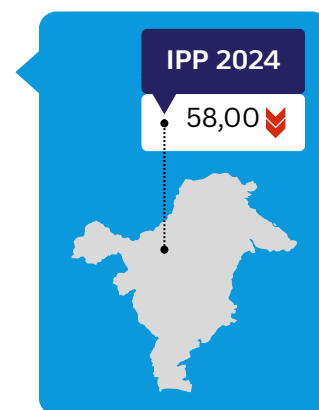
Domain pendidikan (66,67), memiliki nilai indeks lebih kecil dari nilai nasional (70). Sedangkan, nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki capaian (77,50) yang lebih tinggi dari nilai nasional (70). Sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki nilai yang sama dengan capaian nasional yaitu sebesar 45. Di sisi lain, domain partisipasi dan kepemimpinan (33,67) dan domain gender dan diskriminasi (53,33) memiliki nilai yang lebih kecil dari capaian nasional masing-masing dengan nilai (50) dan (56,67).

Berdasarkan Tabel 3.22, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Di sisi lain masih ada dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu APK perguruan tinggi, serta persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas.



3.23 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada tahun 2024, Provinsi Kepulauan Kalimantan Timur memiliki persentase pemuda sebesar 23,36 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Provinsi ini mengalami penurunan IPP sebesar 1,7 poin dari 59,17 pada tahun sebelumnya menjadi 58. (Gambar 3.23). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh capaian domain lapangan dan kesempatan kerja yang menurun 10 poin dan domain kesehatan dan kesejahteraan menurun 2,5 poin, meskipun domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat 6,66 poin. Sedangkan, domain pendidikan serta domain partisipasi dan gender dan diskriminasi Provinsi Kalimantan Timur mengalami stagnasi masing-masing di angka 76,67 dan 60.



Gambar 3.23 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024

Capaian IPP Provinsi Kalimantan Timur 0,33 poin lebih rendah dari capaian nasional. Domain pendidikan (76,67), kesehatan dan kesejahteraan (80), serta gender dan diskriminasi (60) memiliki nilai indeks lebih besar dari nilai nasional masing-masing sebesar 70, 70, dan 56,67. Sedangkan domain lapangan dan kesempatan kerja (40) lebih rendah dari capaian nasional yaitu (45), begitu pula domain partisipasi dan kepemimpinan (33,33) lebih rendah dari capaian nasional (50).

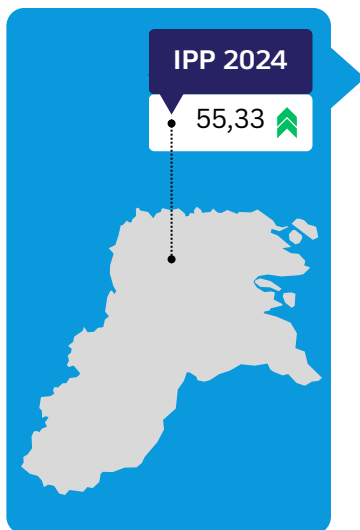
Berdasarkan Tabel 3.23, Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan pada delapan indikator yaitu rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan berusia 16-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Meski begitu, masih terdapat satu indikator yang menunjukkan penurunan dan di bawah capaian nasional, yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih.

Tabel 3.23 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Timur

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,57 menjadi 11,61 X2: APK Sekolah Menengah dari 93,74 menjadi 95,37
		X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 5,59 menjadi 4,07 X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,20 menjadi 0,13 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 7,80 menjadi 5,31
		X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 11,95 menjadi 11,87
		X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 6,30 menjadi 4,29 X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 48,34 menjadi 49,71
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,72 menjadi 0,31

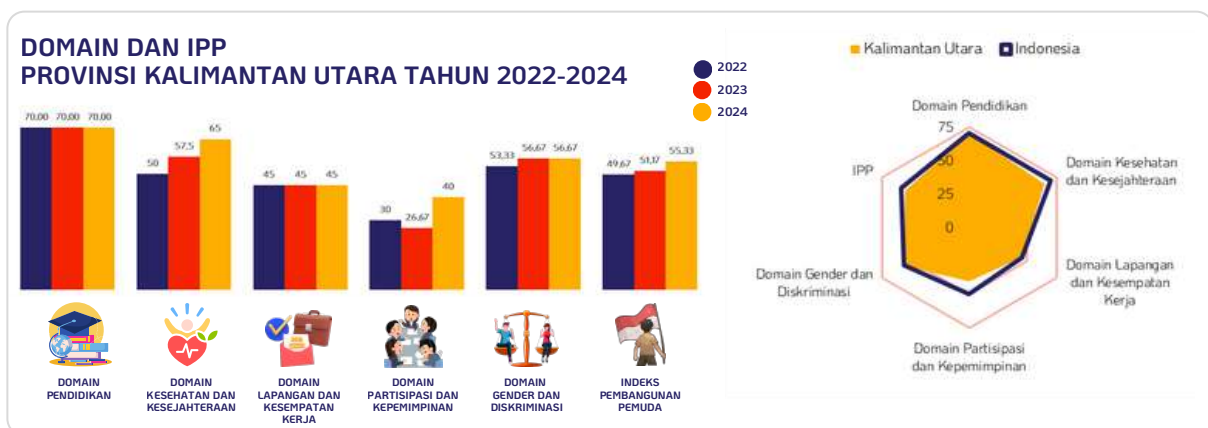


3.24 PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Pada tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara memiliki persentase pemuda sebesar 24,03 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Provinsi ini mengalami kenaikan IPP sebesar 4,17 poin dari 51,17 pada tahun sebelumnya menjadi 55,33. (Gambar 3.24). Kenaikan yang cukup tinggi berasal dari domain partisipasi dan kepemimpinan sebanyak 13,33 poin. Domain kesehatan dan kesejahteraan juga mengalami kenaikan dari 57,50 menjadi 65. Sementara itu, tiga domain lain yaitu domain pendidikan, lapangan dan kesempatan kerja, serta gender dan diskriminasi mengalami stagnasi masing-masing dengan poin 70, 45 dan 56,67.

Capaian IPP Provinsi Kalimantan Utara 3 poin lebih rendah dari capaian nasional 58,33 (Gambar 3.24)



Gambar 3.24 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2024

Tabel 3.24 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Kalimantan Utara

	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,40 menjadi 4,73 X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,63 menjadi 0,30
	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,96 menjadi 9,78
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 3,78 menjadi 7,58

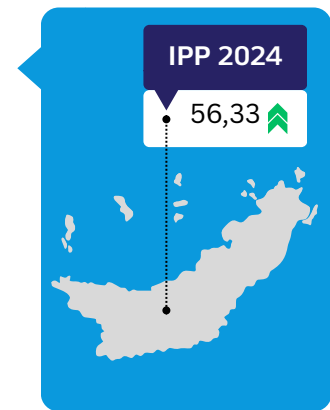


Hal ini dipengaruhi oleh domain kesehatan dan kesejahteraan (65) memiliki nilai yang lebih rendah dari capaian nasional, kemudian domain partisipasi dan kepemimpinan (40) memiliki nilai capaian yang lebih rendah dari capaian nasional. Sedangkan untuk domain pendidikan (70), lapangan dan kesempatan kerja (45) serta gender dan diskriminasi (56,67) memiliki capaian yang sama dengan nilai nasional.

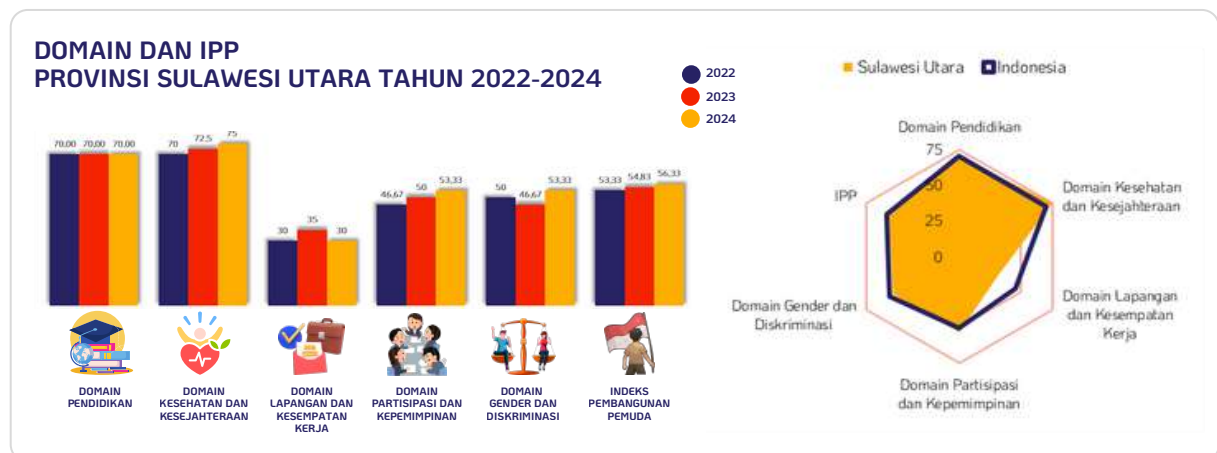
Berdasarkan Tabel 3.24, Provinsi Kalimantan Utara memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, tingkat pengangguran terbuka dan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi. Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki indikator yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan di bawah capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang menjadi kelemahan di Provinsi Kalimantan Utara namun demikian tetap perlu memperhatikan dan mempertahankan indikator secara keseluruhan.

3.25 PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase pemuda sebesar 21,94 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan nilai IPP sekitar 1,5 poin dari tahun sebelumnya yaitu 54,83 menjadi 56,33 (Gambar 3.25). Peningkatan nilai IPP ini terutama didorong oleh kenaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan dari 72,50 menjadi 75, serta domain partisipasi dan kepemimpinan dari 50 menjadi 53,33. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga mengalami perbaikan dari 46,67 menjadi 53,33. Meskipun demikian, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami penurunan dari 35 pada 2023 menjadi 30 pada 2024.



Sementara itu, domain pendidikan cenderung stagnan dengan nilai tetap sebesar 70 dalam tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan pada tiga domain utama berhasil mengimbangi penurunan di domain lapangan dan kesempatan kerja, sehingga IPP Sulawesi Utara menunjukkan tren positif meskipun masih berada 2 poin lebih rendah dari IPP nasional.



Gambar 3.25 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024

Perbandingan nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Utara dan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.25. Domain pendidikan (70) dan domain kesehatan dan kesejahteraan (75) di Sulawesi Utara memiliki capaian sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional (70). Domain partisipasi dan kepemimpinan (53,33) juga lebih unggul dibandingkan capaian nasional (50). Sementara itu, domain gender dan diskriminasi (53,33) relatif seimbang dengan capaian nasional (56,67). Namun, domain lapangan dan kesempatan kerja (30) di Sulawesi Utara masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan nilai nasional (45).



Tabel 3.25 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Utara

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,32 menjadi 11,49
	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,53 menjadi 5,57 X6: Persentase Korban Kejahatan dari 22,70 menjadi 21,14 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 11,92 menjadi 10,52
	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 82,42 menjadi 87,88 X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 12,79 menjadi 17,84
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 40,97 menjadi 43,12
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X2: APK Sekolah Menengah dari 88,10 menjadi 87,72
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,49 menjadi 0,37 X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 17,05 menjadi 17,38

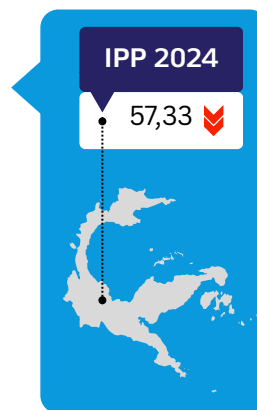
Berdasarkan Tabel 3.25, Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan performa positif pada tujuh indikator yaitu rata-rata lama sekolah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase remaja perempuan sedang hamil, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Meskipun demikian, masih terdapat tiga indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu APK sekolah menengah, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka.



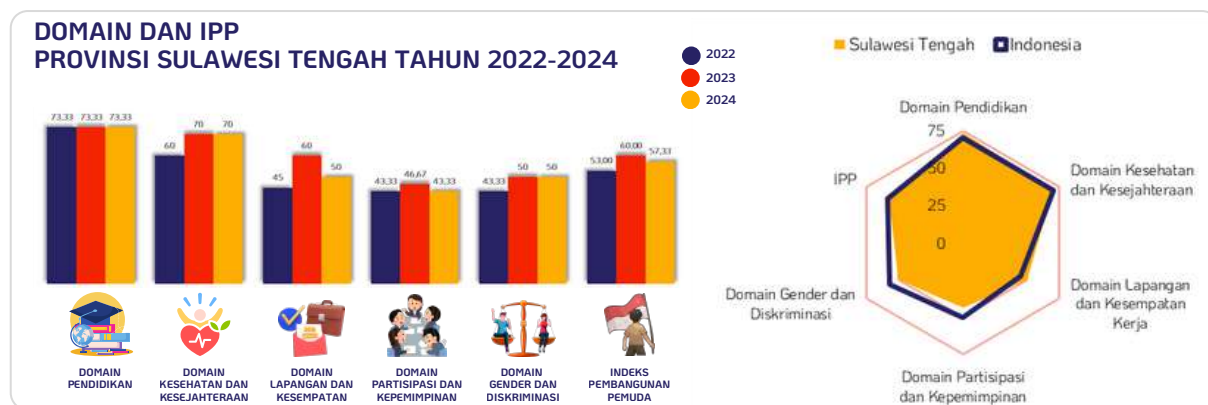
Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.26 PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada tahun 2024, persentase pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 23,21 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan nilai IPP dari 60 pada tahun 2023 menjadi 57,33 (Gambar 3.26). Penurunan IPP tersebut dipengaruhi oleh penurunan domain lapangan dan kesempatan kerja yang turun dari 60 menjadi 50, serta domain partisipasi dan kepemimpinan yang menurun dari 46,67 menjadi 43,33. Sementara itu, tiga domain lainnya relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu domain pendidikan (73,33), domain kesehatan dan kesejahteraan (70), serta domain gender dan diskriminasi (50). Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 57,33 masih berada di bawah capaian nasional sebesar 58,33.



Terdapat dua domain dengan capaian di bawah capaian nasional, yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 (nasional 50) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 50 (nasional 56,67). Sementara itu, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan sama dengan nasional, yaitu sebesar 70. Adapun dua domain lainnya menunjukkan capaian di atas capaian nasional, yakni domain pendidikan sebesar 73,33 (nasional 70) dan domain lapangan serta kesempatan kerja sebesar 50 (nasional 45).



Gambar 3.26 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2024

Berdasarkan Tabel 3.26, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki keunggulan pada tiga indikator yaitu APK perguruan tinggi, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam enam indikator hal ini karena adanya penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berada di bawah capaian nasional yakni indikator APK sekolah menengah, persentase remaja perempuan sedang hamil, persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat dan angka perkawinan usia anak.

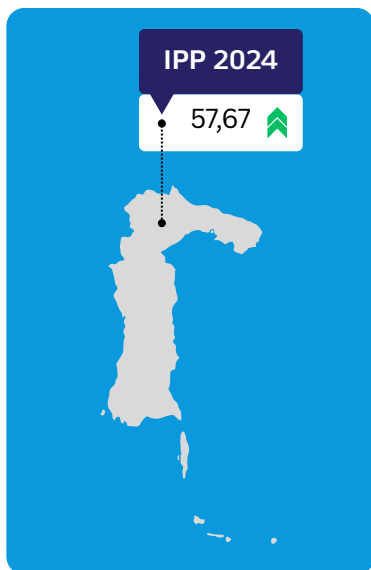


Sumber Gambar : AI ChatGPT

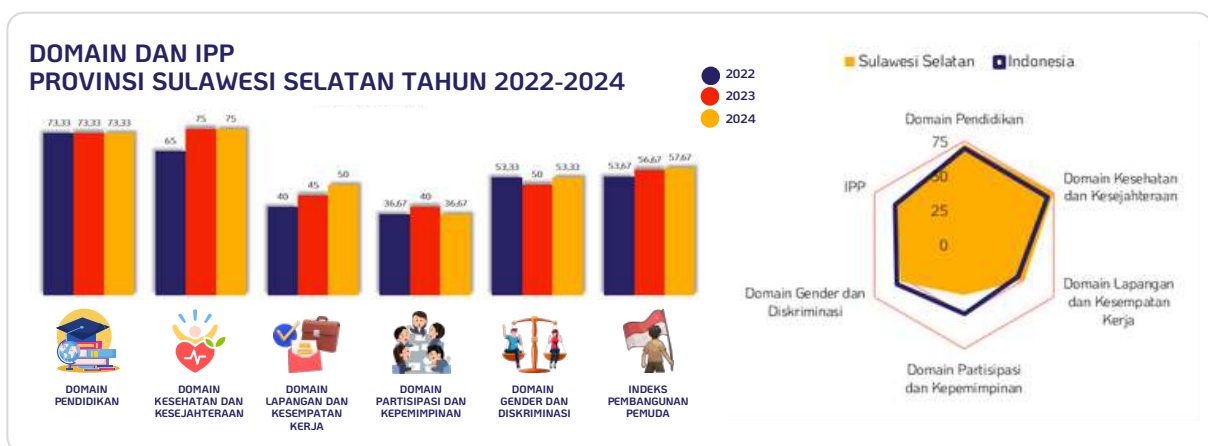
Tabel 3.26 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Tengah

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X3: APK Perguruan Tinggi	dari 39,71 menjadi 40,38
	X5: Persentase Korban Kejahatan	dari 0,60 menjadi 0,41
-	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	dari 68,71 menjadi 85,61
	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X2: APK Sekolah Menengah	dari 90,82 menjadi 89,49
	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil	dari 13,14 menjadi 13,37
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	dari 0,65 menjadi 0,30
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	dari 9,10 menjadi 5,59
	X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	dari 8,64 menjadi 4,88
	X13: Angka Perkawinan Usia Anak	dari 8,91 menjadi 9,06

3.27 PROVINSI SULAWESI SELATAN



Pada tahun 2024, persentase pemuda di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 22,70 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar 57,67, meningkat 1 poin jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 56,67. Peningkatan IPP tersebut ditopang oleh peningkatan pada domain lapangan dan kesempatan kerja, yang naik dari 45 pada tahun 2023 menjadi 50 pada tahun 2024. Selain itu, domain gender dan diskriminasi juga menunjukkan peningkatan dari 50 pada tahun 2023 menjadi 53,33 pada tahun 2024. Sebaliknya, domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan dari 40 pada tahun 2023 menjadi 36,37 pada tahun 2024. Adapun dua domain lainnya relatif stabil dibanding tahun sebelumnya yaitu domain pendidikan (73,33) dan domain kesehatan dan kesejahteraan (75).



Gambar 3.27 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024



Sumber Gambar : AI ChatGPT

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 57,67 masih berada di bawah capaian nasional yang mencapai 58,33 (Gambar 3.27). Terdapat dua domain dengan capaian di bawah capaian nasional, yaitu domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 36,67 (nasional 50) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 (nasional 56,67). Sementara itu, capaian tiga domain lainnya berada di atas capaian nasional yaitu domain pendidikan sebesar 73,33 (nasional 70), domain kesehatan dan kesejahteraan 75 (nasional 70) serta domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 50 (nasional 45).

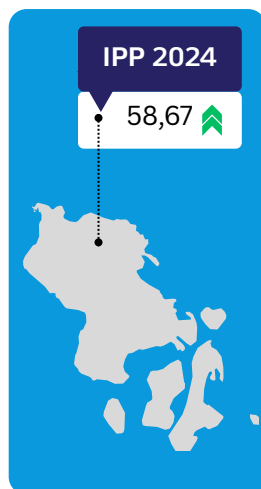
Tabel 3.27 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Selatan

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,25 menjadi 0,16 X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 20,82 menjadi 20,72
	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,70 menjadi 9,22
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 44,92 menjadi 50,95
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 13,54 menjadi 14,64
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 5,63 menjadi 3,28 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 6,38 menjadi 4,02
	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 7,48 menjadi 8,09 X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dari 20,69 menjadi 20,44

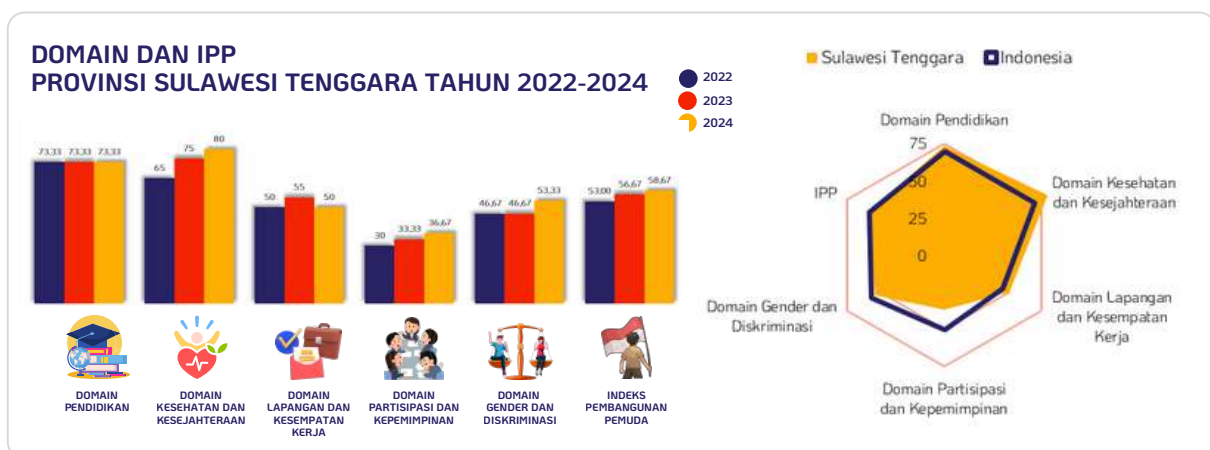
Berdasarkan tabel 3.27, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan pada empat indikator yaitu persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, tingkat pengangguran terbuka dan Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas. Namun provinsi ini masih menghadapi tantangan dalam lima indikator yang menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan berada di bawah capaian nasional yakni indikator persentase remaja perempuan sedang hamil, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat, angka perkawinan usia anak dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.



3.28 PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Persentase pemuda di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 tercatat sebesar 24,69 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar 58,67, meningkat 2 poin dibandingkan tahun 2023 sebesar 56,67. Peningkatan IPP tersebut terutama ditopang oleh perbaikan pada domain kesehatan dan kesejahteraan, yang naik dari 75 pada tahun 2023 menjadi 80 pada tahun 2024. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga menunjukkan peningkatan dari 33,33 pada tahun 2023 menjadi 36,67 pada tahun 2024, serta domain gender dan diskriminasi yang meningkat dari 46,67 menjadi 53,33. Sebaliknya, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami penurunan dari 55 poin pada tahun 2023 menjadi 50 poin pada tahun 2024, sementara domain pendidikan relatif stabil pada angka 73,33.



Gambar 3.28 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024



Capaian IPP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 sebesar 58,67 berada di atas capaian nasional sebesar 58,33. Kondisi ini sejalan dengan capaian tiga domain penyusunnya yang berada di atas capaian nasional yaitu domain pendidikan sebesar 73,33 (nasional 70), domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 80 (nasional 70), serta domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 50 (nasional 45). Sementara itu, dua domain lainnya masih berada di bawah capaian nasional yakni domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 36,67 (nasional 50) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 (nasional 56,67)

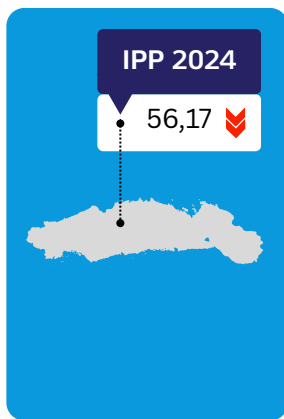
Tabel 3.28 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Tabel 3.28, Provinsi Sulawesi Tenggara unggul dalam empat indikator yaitu persentase korban kejahatan, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka, dan persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Sementara itu, terdapat tiga indikator yang capaiannya lebih rendah dari capaian nasional dan menurun dibandingkan capaian sebelumnya. Indikator tersebut adalah persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, serta persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.

	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,41 menjadi 0,20 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 9,86 menjadi 8,89
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7,48 menjadi 7,17
 GENDER DAN DISKRIMINASI	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 47,29 menjadi 47,62
	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
 LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,42 menjadi 0,31
 PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 3,45 menjadi 1,91 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 5,50 menjadi 3,31

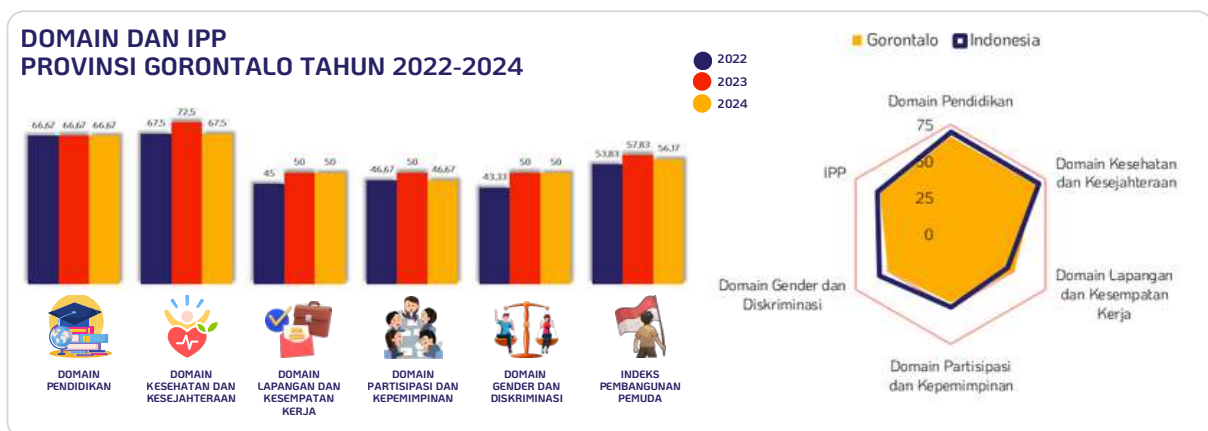


3.29 PROVINSI GORONTALO



Persentase pemuda di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 sebesar 23,75 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 56,17, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 57,83. Hal tersebut ditopang oleh penurunan domain kesehatan dan kesejahteraan dari 72,50 pada tahun 2023 menjadi 67,50 pada tahun 2024. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga menunjukkan penurunan dari 50 pada tahun 2023 menjadi 46,67 pada tahun 2024. Sementara tiga domain relatif stabil dari tahun sebelumnya yaitu domain pendidikan (66,67), domain lapangan dan kesempatan kerja (50), serta domain gender dan diskriminasi (50).

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 56,17 berada di bawah capaian nasional sebesar 58,33 (Gambar 3.29). Terdapat empat domain dengan capaian di bawah capaian nasional, yaitu domain pendidikan sebesar 66,67 (nasional 70), domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 67,5 (nasional 70) domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 46,67 (nasional 50) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 50 (nasional 56,67). Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja mencatatkan capaian di atas nasional, yaitu sebesar 50 dibandingkan capaian nasional 45.



Gambar 3.29 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024

Tabel 3.29 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Gorontalo

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X7: Kesehatan dan Kesejahteraan	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 6,47 menjadi 4,35
	X9: Lapangan dan Kesempatan Kerja	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka dari 7,99 menjadi 7,91
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X4: Kesehatan dan Kesejahteraan	X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 9,55 menjadi 11,63
	X6: Kesehatan dan Kesejahteraan	X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 24,42 menjadi 25,53
	X12: Partisipasi dan Kepemimpinan	X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 10,30 menjadi 6,18
	X15: Gender dan Diskriminasi	X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal dari 23,81 menjadi 22,54

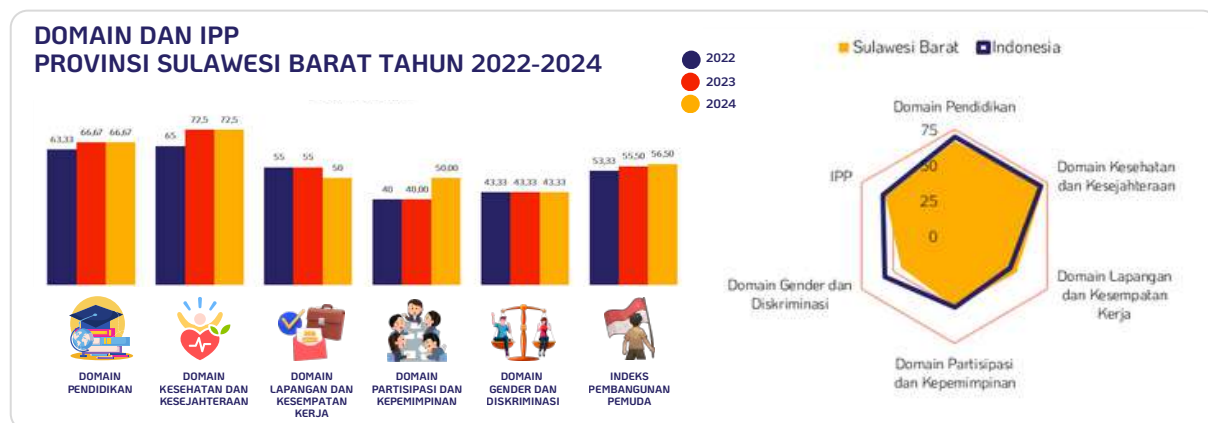
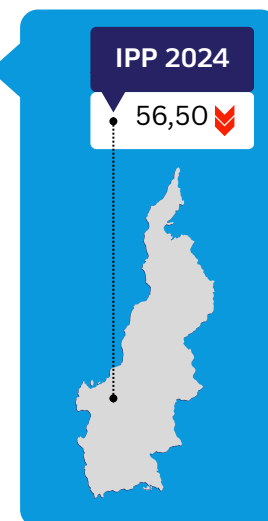
Berdasarkan Tabel 3.29, Provinsi Gorontalo unggul pada dua indikator yaitu, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, serta tingkat pengangguran terbuka. Di sisi lain terdapat empat indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu APK sekolah menengah, persentase pemuda yang merokok, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.



Sumber Gambar : AI ChatGPT

3.30 PROVINSI SULAWESI BARAT

Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Barat memiliki persentase pemuda sebesar 24,19 persen (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Provinsi ini mengalami peningkatan IPP sebesar 1 poin dari 55,50 pada tahun sebelumnya menjadi 56,50. (Gambar 3.30). Kenaikan tersebut selaras dengan kenaikan pada domain partisipasi dan kepemimpinan dengan capaian 40 pada tahun 2023 menjadi 50 di tahun 2024. Sedangkan tiga domain lainnya mengalami stagnasi dari tahun 2023 dan 2024 yaitu domain pendidikan (66,67), domain kesehatan dan kesejahteraan (72,50) dan domain gender dan diskriminasi (43,33). Namun demikian, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami penurunan sebesar 5 poin dari 55 pada tahun 2023 menjadi 50 di tahun 2024. Capaian IPP Provinsi Sulawesi Barat 1,83 poin lebih kecil, jika dibandingkan dengan capaian IPP nasional. Terdapat 2 domain yang berada di atas capaian nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan dengan nilai 72,5, sedangkan capaian nilai nasional hanya 70.



Gambar 3.30 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024

Kemudian domain lapangan dan kesempatan kerja lebih tinggi dengan nilai capaian 50, dibandingkan nilai nasional yaitu 45. Domain pendidikan sebesar 66,67 lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan juga memiliki nilai yang sama dengan nasional yaitu 50. Sedangkan selisih capaian domain gender dan diskriminasi dengan capaian nasional mencapai 13,33 poin lebih rendah.

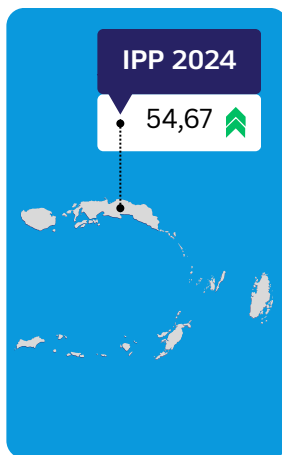
Berdasarkan Tabel 3.30, Provinsi Sulawesi Barat unggul dalam tiga indikator karena capaiannya lebih tinggi dari capaian nasional serta meningkat dibanding tahun sebelumnya. Ketiga indikator tersebut adalah persentase remaja perempuan yang sedang hamil, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, serta persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas. Di sisi lain terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu APK sekolah menengah dan persentase pemuda wirausaha kerah putih.

Tabel 3.30 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Sulawesi Barat

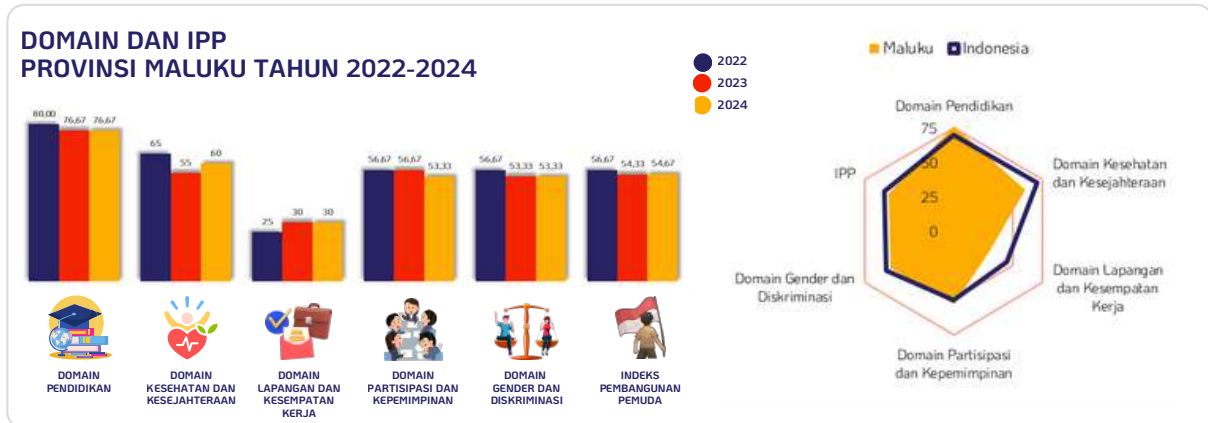
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 11,29 menjadi 10,75
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi dari 7,73 menjadi 9,59
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X14: Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke atas dari 42,61 menjadi 43,72
	X2: APK Sekolah Menengah dari 87,10 menjadi 84,12
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,29 menjadi 0,16



3.31 PROVINSI MALUKU



Pada tahun 2024, Provinsi Maluku memiliki persentase pemuda sebesar 25,06 persen (Badan Pusat Statistik, 2024) dan mengalami sedikit peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi 54,67 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 54,33 (Gambar 3.31). Peningkatan tersebut ditopang oleh capaian domain kesehatan dan kesejahteraan, yang meningkat dari 50 pada tahun 2023 menjadi 60 pada tahun 2024. Sementara itu, terdapat tiga domain yang mengalami stagnasi sejak tahun 2023, yaitu domain pendidikan (76,67), domain lapangan dan kesempatan kerja (30), serta domain gender dan diskriminasi (53,33). Di sisi lain, domain partisipasi dan kepemimpinan justru mengalami penurunan dari 56,67 pada tahun 2023 menjadi 53,33 pada tahun 2024.



Gambar 3.31 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Maluku sebesar 54,67 berada di bawah capaian nasional yang mencapai 58,33 (Gambar 3.31). Terdapat tiga domain dengan capaian di bawah nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 60 (nasional 70), domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 30 (nasional 45), serta domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 (nasional 56,67). Selanjutnya, terdapat dua domain yang memiliki capaian di atas capaian nasional, yaitu domain pendidikan sebesar 76,67 (nasional 70) serta domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 53,33 (nasional 50).

Tabel 3.31 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Maluku

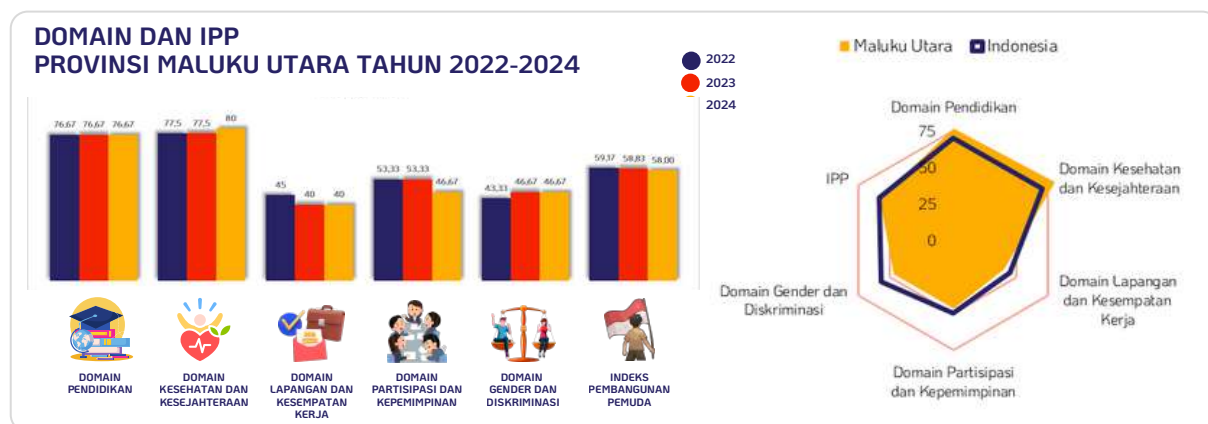
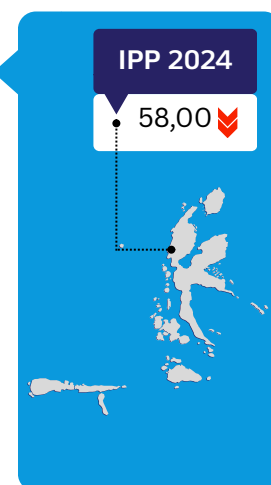
+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
		X1: Rata-rata Lama Sekolah dari 11,65 menjadi 11,76
		X4: Angka Kesakitan Pemuda dari 6,02 menjadi 3,66
		X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 82,04 menjadi 86,11
-		X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 5,11 menjadi 4,82
		X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 8,22 menjadi 7,26

Berdasarkan Tabel 3.31, terdapat empat indikator yang menjadi keunggulan dan satu indikator yang perlu jadi perhatian oleh Provinsi Maluku. Indikator yang menjadi keunggulan adalah rata-rata lama sekolah, angka kesakitan pemuda, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, serta angka perkawinan usia anak. Sementara itu, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian nasional dan mengalami penurunan dibandingkan capaian sebelumnya.



3.32 PROVINSI MALUKU UTARA

Pada tahun 2024, Provinsi Maluku Utara memiliki persentase pemuda sebesar 24,69 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Maluku Utara pada tahun 2024 sebesar 58, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 mencapai 58,83 (Gambar 3.32). Hal ini ditopang oleh domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami penurunan dari 53,33 menjadi 46,67. Sementara itu, tiga domain lainnya cenderung stagnan, yaitu domain pendidikan sebesar 76,67, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 40, serta domain gender dan diskriminasi sebesar 46,67. Adapun pada domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami peningkatan dari 77,5 menjadi 80 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, capaian IPP Maluku Utara tahun 2024 masih berada di bawah capaian nasional, yaitu 58,33.



Gambar 3.32 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024

Gambar 3.32 memperlihatkan bahwa terdapat dua domain dengan nilai di atas capaian nasional, yaitu domain pendidikan sebesar 76,67 (nasional 70) dan domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 80 (nasional 70). Namun demikian, masih terdapat tiga domain yang berada di bawah capaian nasional, yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 40 (nasional 45), domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 46,67 (nasional 50), serta domain gender dan diskriminasi sebesar 46,67 (nasional 56,67).

Berdasarkan Tabel 3.32, Provinsi Maluku utara memiliki enam indikator yang menjadi keunggulan, yaitu rata-rata lama sekolah, angka kesakitan pemuda, persentase korban kejahatan, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, tingkat pengangguran terbuka serta persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Di sisi lain terdapat tiga indikator yang perlu jadi perhatian yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

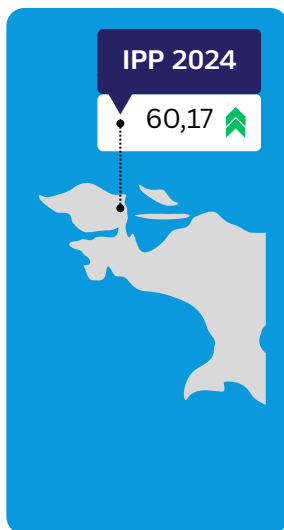
Tabel 3.32 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Maluku Utara

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya	
	X1: Rata-rata Lama Sekolah	dari 11,55 menjadi 11,59
	X4: Angka Kesakitan Pemuda	dari 4,43 menjadi 3,25
	X5: Persentase Korban Kejahatan	dari 0,57 menjadi 0,38
	X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil	dari 1,92 menjadi 1,80
	X9: Tingkat Pengangguran Terbuka	dari 12,04 menjadi 11,01
	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	dari 74,89 menjadi 82,85
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya	
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	dari 0,34 menjadi 0,10
	X11: Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	dari 9,25 menjadi 2,27
	X15: Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal	dari 16,63 menjadi 15,85

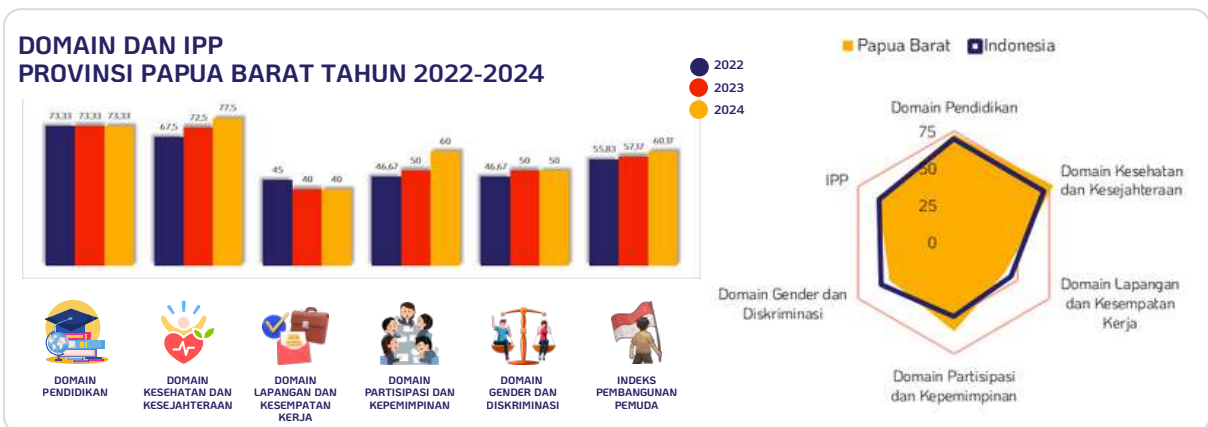


Sumber Gambar: AI ChatGPT

3.33 PROVINSI PAPUA BARAT



Pada tahun 2024, Provinsi Papua memiliki persentase pemuda sebesar 24,71 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Papua pada tahun 2024 tercatat sebesar 55,33, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 52,17 (Gambar 3.34). Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya capaian pada empat domain, yaitu domain pendidikan yang meningkat dari 53,33 pada tahun 2023 menjadi 56,67 pada tahun 2024, domain kesehatan dan kesejahteraan juga meningkat dari 82,5 pada tahun 2023 menjadi 85 pada tahun 2024, domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat dari 50 pada tahun 2023 menjadi 53,33 pada tahun 2024, yang terakhir domain gender dan diskriminasi meningkat dari 30 pada tahun 2023 menjadi 36,67 pada tahun 2024. Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45.



Gambar 3.33 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2024



Sumber Gambar : wartapalaindonesia.com

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Papua sebesar 55,33 berada di bawah capaian nasional yang mencapai 58,33 (Gambar 3.34). Terdapat dua domain dengan capaian di bawah nasional, yaitu domain pendidikan sebesar 56,67 (nasional 70) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 36,67 (nasional 56,67). Sementara itu, terdapat dua domain dengan capaian di atas nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 85 (nasional 70) dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 53,33 (nasional 50). Ada satu domain yang memiliki capaian sama dengan capaian nasional sebesar 45, yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja.

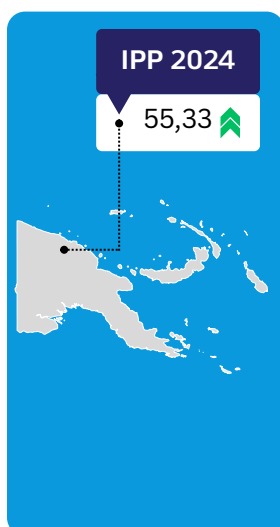
Tabel 3.33 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Papua Barat

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 21,39 menjadi 19,28
	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dari 75,31 menjadi 82,39 X12: Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat dari 7,86 menjadi 15,47
	X13: Angka Perkawinan Usia Anak dari 7,86 menjadi 4,13
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,40 menjadi 0,47
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih dari 0,30 menjadi 0,22

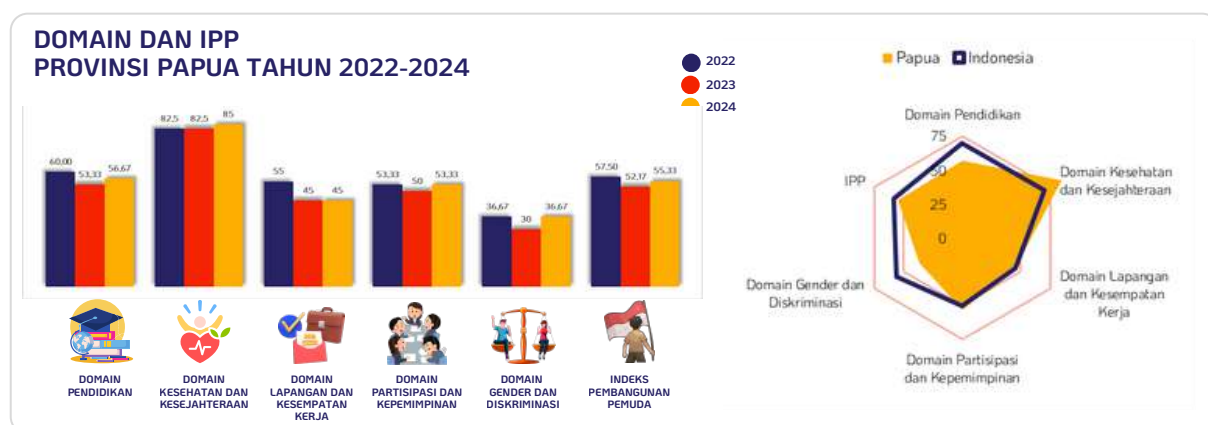
Berdasarkan Tabel 3.33, terdapat empat indikator yang menjadi keunggulan dan empat indikator yang menjadi kelemahan Provinsi Papua Barat. Indikator yang menjadi keunggulan adalah persentase pemuda yang merokok, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat, serta angka perkawinan usia anak. Sementara itu, persentase korban kejahatan dan persentase pemuda wirausaha kerah putih, memiliki capaian yang lebih rendah dari capaian nasional dan mengalami penurunan dibandingkan capaian sebelumnya.



3.34 PROVINSI PAPUA



Pada tahun 2024, Provinsi Papua memiliki persentase pemuda sebesar 24,71 persen (Badan Pusat Statistik, 2024). Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Papua pada tahun 2024 sebesar 55,33, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 52,17 (Gambar 3.34). Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya capaian pada empat domain, yaitu domain pendidikan yang meningkat dari 53,33 pada tahun 2023 menjadi 56,67 pada tahun 2024, domain kesehatan dan kesejahteraan juga meningkat dari 82,5 pada tahun 2023 menjadi 85 pada tahun 2024, domain partisipasi dan kepemimpinan meningkat dari 50 pada tahun 2023 menjadi 53,33 pada tahun 2024, yang terakhir domain gender dan diskriminasi meningkat dari 30 pada tahun 2023 menjadi 36,67 pada tahun 2024. Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45.



Gambar 3.34 Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Papua Tahun 2022-2024

Tabel 3.34 Keunggulan dan Kelemahan pada Indikator IPP di Provinsi Papua

+	Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
	X6: Persentase Pemuda yang Merokok dari 16,73 menjadi 15,18 X7: Persentase Remaja Perempuan yang sedang Hamil dari 5,86 menjadi 3,91
	X10: Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat dari 79,27 menjadi 87,89
-	Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun/stagnan dibandingkan capaian sebelumnya
	X2: APK Sekolah Menengah dari 77,88 menjadi 76,84
	X5: Persentase Korban Kejahatan dari 0,43 menjadi 0,47
	X8: Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih dari 0,14 menjadi 0,06



Sumber Gambar : AI ChatGPT

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IPP Provinsi Papua sebesar 55,33 berada di bawah capaian nasional yang mencapai 58,33 (Gambar 3.34). Terdapat dua domain dengan capaian di bawah nasional, yaitu domain pendidikan sebesar 56,67 (nasional 70) serta domain gender dan diskriminasi sebesar 36,67 (nasional 56,67). Sementara itu, terdapat dua domain dengan capaian di atas nasional, yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 85 (nasional 70) dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 53,33 (nasional 50). Ada satu domain yang memiliki capaian sama dengan capaian nasional sebesar 45, yaitu domain lapangan dan kesempatan kerja.

Berdasarkan Tabel 3.34, Provinsi Papua memiliki keunggulan pada tiga indikator yaitu persentase pemuda yang merokok, persentase remaja perempuan yang sedang hamil, serta persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Di sisi lain terdapat tiga indikator juga yang perlu mendapat perhatian yaitu APK sekolah menengah, persentase korban kejahatan, dan persentase pemuda wirausaha keras putih.



BAB 4

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA METODE BARU

Bab ini membahas sekilas tentang Indeks Pembangunan Pemuda metode baru dan capaian Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru di tingkat nasional, di 38 provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun 2024



4.1 SEKILAS TENTANG IPP METODE BARU

IPP Metode Lama digunakan sebagai tolok ukur Pembangunan pemuda dalam periode **RPJMN 2020-2024**. Pada 2025, Indonesia memasuki periode perencanaan pembangunan baru, yaitu periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan RPJMN 2025-2029 sebagai tahapan pertama dari empat rencana pembangunan jangka menengah untuk mewujudkan tujuan RPJPN 2025-2045. Mengingat kerangka kebijakan pembangunan pemuda pada periode pembangunan baru ini memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan periode pembangunan sebelumnya, dilakukan peninjauan ulang terhadap IPP untuk memastikan bahwa IPP mampu merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda yang menjadi arahan di dalam kerangka kebijakan pembangunan ke depan dan menangkap dinamika situasi pemuda terkini. Dalam hal, IPP Metode Baru telah ditetapkan sebagai indikator Prioritas Nasional (PN) keempat yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta **Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**.

Secara umum, **perbedaan antara IPP Metode Lama dan IPP Metode Baru terletak pada struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya**. IPP Metode Baru memungkinkan disagregasi data IPP hingga tingkat kabupaten/kota, yang sebelumnya hanya terbatas pada tingkat nasional dan provinsi. Perbedaan ini berimplikasi terhadap perbedaan nilai IPP yang dihitung menggunakan metode lama dan metode baru, sehingga **perlu menjadi catatan keduanya tidak bisa diperbandingkan**.

Lebih spesifik, IPP Metode Baru dikelompokkan ke dalam tiga lapisan yaitu lapisan penguatan individu pemuda, lapisan penghidupan dan kesejahteraan, serta lapisan partisipasi di berbagai bidang kehidupan. Ketiga lapisan tersebut terdiri atas lima domain pembangunan pemuda, yaitu: 1) domain pendidikan dan pelatihan; 2) domain kesehatan; 3) ketenagakerjaan layak; 4) domain partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) domain inklusivitas dan kesetaraan gender. Dua domain pertama ditujukan untuk menilai capaian upaya penguatan individu pemuda (lapisan 1). Domain ketiga, ketenagakerjaan layak, ditujukan untuk meninjau situasi penghidupan dan kesejahteraan pemuda; sementara domain keempat terkait partisipasi dan Kepemimpinan ditujukan untuk mengamati situasi partisipasi pemuda di berbagai bidang kehidupan.



Sumber Gambar : AI Gemini

Adapun daftar indikator yang menjadi penyusun IPP Metode Baru dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Domain dan Indikator IPP metode baru

Domain	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
Pendidikan dan Pelatihan (Bobot = 0,21)	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat (Bobot = 0,33)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Sakernas
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi (Bobot = 0,34)	Persentase pemuda umur 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/SMK sederajat (termasuk pendidikan tinggi), terhadap seluruh pemuda umur 19–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK (Bobot = 0,33)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Kor
Kesehatan (Bobot = 0,20)	Angka kesakitan pemuda (Bobot = 0,26)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang merokok (Bobot = 0,23)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang berolahraga (Bobot = 0,26)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang melakukan olahraga dalam seminggu terakhir, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil (Bobot = 0,25)	Persentase remaja perempuan pernah kawin umur 15–18 tahun yang sedang hamil, terhadap seluruh remaja perempuan pernah kawin umur 15–18 tahun	Susenas Kor
Ketenagakerjaan layak (Bobot = 0,20)	Persentase pemuda NEET (Bobot = 0,35)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Sakernas
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh (Bobot = 0,32)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun yang bekerja	Sakernas
	Rasio kewirausahaan pemuda (Bobot = 0,33)	Proporsi pemuda umur 16–30 tahun yang bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda umur 16–30 tahun dikalikan 100	Sakernas

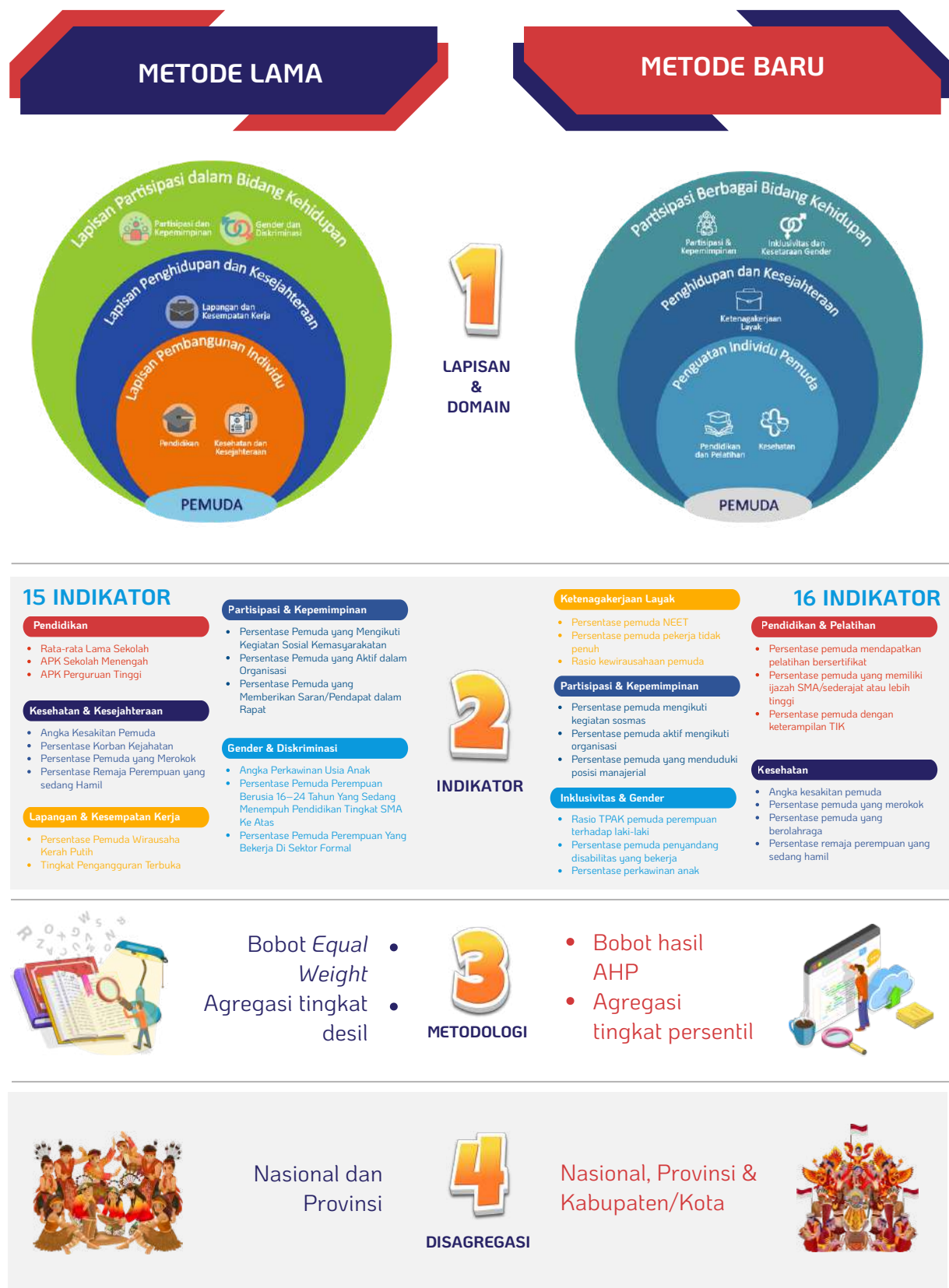


Sumber Gambar : Al Gemini

Tabel 4.1 Domain dan Indikator IPP metode baru (lanjutan)

Domain	Indikator	Definisi Operasional	Sumber Data
Partisipasi dan Kepemimpinan (Bobot = 0,20)	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas (Bobot = 0,34)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi (Bobot = 0,33)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun	Susenas Modul
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial (Bobot = 0,33)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun yang bekerja dan menduduki posisi manajerial, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun yang bekerja	Sakernas
Inklusivitas dan kesetaraan gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki (Bobot = 0,33)	Proporsi tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda perempuan umur 16–30 tahun terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki umur 16–30 tahun dikali 100	Sakernas
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja (Bobot = 0,35)	Persentase pemuda umur 16–30 tahun penyandang disabilitas yang bekerja, terhadap seluruh pemuda umur 16–30 tahun penyandang disabilitas	Sakernas
	Persentase perkawinan anak (Bobot = 0,32)	Persentase perempuan pernah kawin umur 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun, terhadap seluruh perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun	Susenas Kor

Adapun perbedaan mendasar pada IPP metode baru dapat disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut :




Bobot *Equal Weight*

Agregasi tingkat desil

3

METODOLOGI

- Bobot hasil AHP
- Agregasi tingkat persentil




Nasional dan Provinsi

4

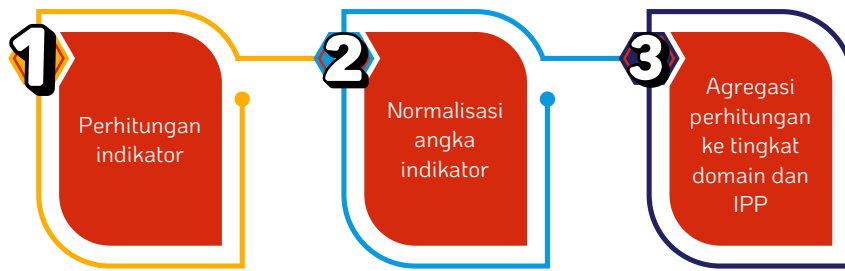
DISAGREGASI

Nasional, Provinsi & Kabupaten/Kota



Gambar 4.1 Perbedaan IPP Metode Lama dengan IPP Metode Baru

IPP dirancang sebagai alat ukur komprehensif yang menggambarkan kondisi pemuda Indonesia dalam berbagai aspek pembangunan pemuda. Adapun cara perhitungan IPP metode baru dapat dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3 berikut

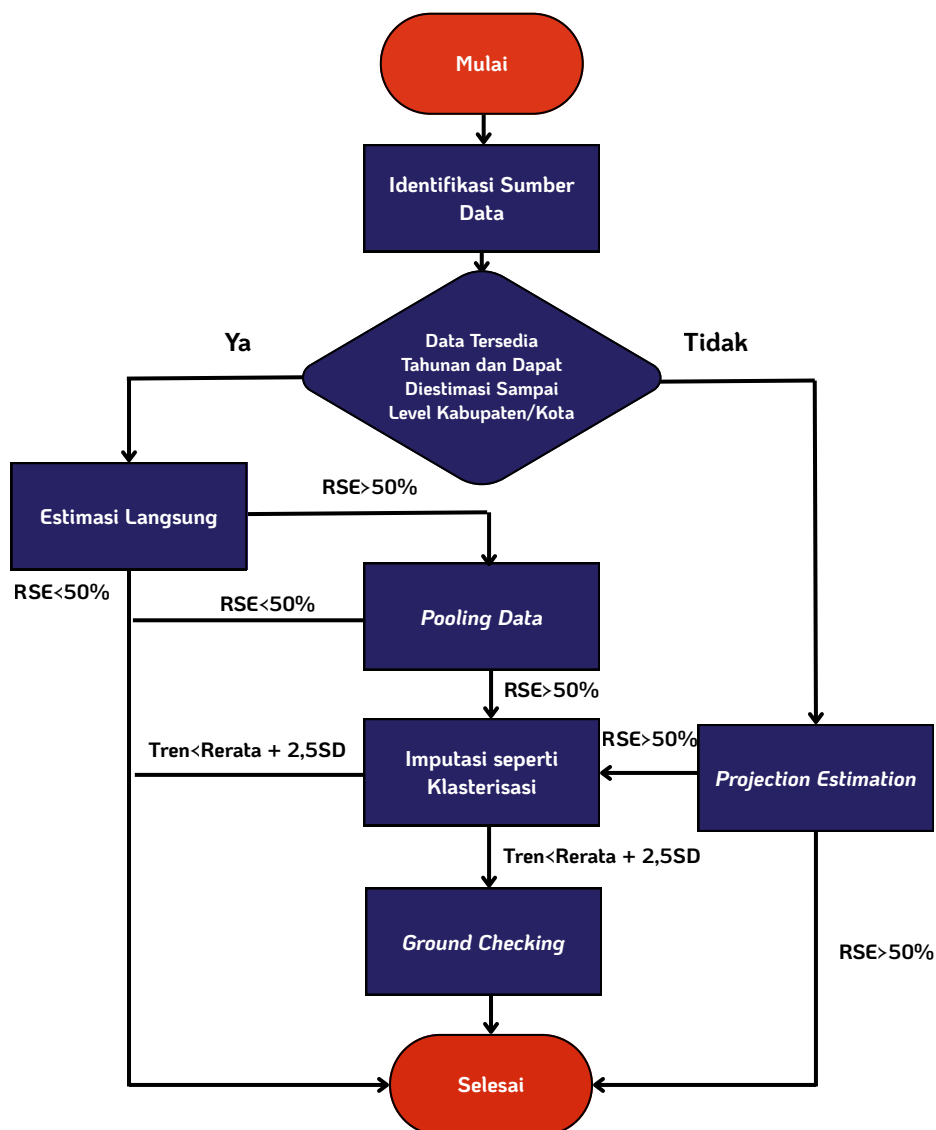


Gambar 4.2 Tahapan pengukuran IPP

Gambar 4.2 menunjukkan proses penghitungan IPP sehingga kita dapat memperoleh angka capaian pembangunan pemuda. Proses dimulai dengan melakukan penghitungan indikator-indikator pembentuk IPP. Selanjutnya, hasil penghitungan indikator akan distandardisasi dengan melakukan normalisasi angka. Terakhir, nilai masing-masing indikator selanjutnya disagregasi untuk menghasilkan angka domain dan angka IPP secara keseluruhan.

a. Tahap 1 : Memperoleh Data/angka Indikator

Penghitungan indikator pembentuk IPP mengacu pada metadata yang dijelaskan sebelumnya. Proses yang dilalui dalam menghitung indikator pembentuk IPP digambarkan pada Gambar 4.3 berikut



Gambar 4.3. SOP Penghitungan Estimasi Indikator Pembentuk IPP

Penghitungan indikator akan dimulai dengan mengidentifikasi apakah indikator IPP yang akan dihitung berasal dari data yang tersedia secara tahunan dan mampu menyediakan data hingga tingkat kabupaten/kota. Jika data tahunan tidak tersedia langkah yang diambil adalah melakukan estimasi proyeksi (*projection estimation*). Namun, jika data tersedia setiap tahun, maka proses dilanjutkan dengan menghitung indikator dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota serta melakukan pengecekan pada nilai relative standard error/kesalahan standar relatif (RSE). Jika provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki RSE kurang dari 50%, nilai indikator untuk daerah tersebut sudah siap digunakan. Akan tetapi, jika RSE lebih besar dari 50%, artinya data tidak cukup akurat, sehingga dilakukan intervensi statistik dengan menggunakan metode *pooling* data untuk meningkatkan akurasi data pada provinsi atau kabupaten/kota terkait. Setelah melakukan *pooling* data, indikator akan dihitung kembali. Selanjutnya, data hasil pooling data dan estimasi proyeksi akan kembali melakukan pengecekan nilai RSE. Jika RSE lebih kecil dari 50, data sudah dapat digunakan. Kalau nilai RSE lebih besar dari 50 langkah selanjutnya dalam penghitungan indikator pembentuk IPP adalah menggunakan metode klasterisasi, yang bertujuan untuk mengimputasi indikator berdasarkan kelompok daerah yang lebih homogen sehingga dapat meningkatkan kualitas data.



b. Tahap 2 : Normalisasi angka indikator

Dalam proses penyusunan indeks, normalisasi memiliki peran untuk menstandarisasi angka-angka setiap indikator atau domain. Hal ini dimaksudkan agar capaian indikator atau domain dapat saling diperbandingkan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi perbedaan sifat indikator, yaitu indikator positif dan negatif, sehingga semua indikator memiliki skala yang seragam. Berikut Adalah formula untuk menormalisasikan indikator

Indikator positif

$$X_{ij} = 100 \times \frac{X_{ijk} - X_{ij(\text{minimum})}}{X_{ij(\text{maksimum})} - X_{ij(\text{minimum})}}$$

Adapun untuk indikator negatif sebagai berikut

$$X_{ij} = 100 \times \frac{X_{ij(\text{minimum})} - X_{ijk}}{X_{ij(\text{minimum})} - X_{ij(\text{maksimum})}}$$

X_{ijk} merupakan angka atau nilai indikator yang sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh pada tahap 1

Tabel 4.2 Nilai Minimum dan Maksimum pada IPP Metode Baru

Domain	Indikator	Minimum	Maksimum
Pendidikan dan Pelatihan (Bobot = 0,21)	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat (Bobot = 0,33)	0,00	40,89
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi (Bobot = 0,34)	0,00	92,95
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK (Bobot = 0,33)	0,00	100
Kesehatan (Bobot = 0,20)	Angka kesakitan pemuda (Bobot = 0,26)	60,39	0,00
	Persentase pemuda yang merokok (Bobot = 0,23)	53,18	3,63
	Persentase pemuda yang berolahraga (Bobot = 0,26)	0,00	70,00
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil (Bobot = 0,25)	49,01	0,00
Ketenagakerjaan layak (Bobot = 0,20)	Persentase pemuda NEET (Bobot = 0,35)	53,00	10,00
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh (Bobot = 0,32)	76,00	20,00
	Rasio kewirausahaan pemuda (Bobot = 0,33)	0,00	2,50
Partisipasi dan Kepemimpinan (Bobot = 0,20)	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas (Bobot = 0,34)	0,00	100,00
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi (Bobot = 0,33)	0,00	18,50
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial (Bobot = 0,33)	0,00	4,00
Partisipasi dan Kepemimpinan (Bobot = 0,20)	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki (Bobot = 0,33)	0,00	100,00
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja (Bobot = 0,35)	0,00	58,0
	Persentase perkawinan anak (Bobot = 0,32)	68,99	0,00



c. Tahap 3 : Agregasi penghitungan domain dan IPP

Metode agregasi penghitungan yang dipakai adalah metode agregasi aritmetik. Nilai IPP tingkat domain dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai indikator yang telah melalui proses normalisasi. Formulasi yang digunakan untuk memperoleh nilai domain adalah sebagai berikut:



Sumber Gambar : AI Gemini

$$r_j = \sum_{i=1}^m w_{ij} X_{ij}$$

Dengan r_j = nilai indeks domain ke – j

w_{ij} = bobot pada masing-masing indikator ke-i pada domain ke-j

X_{ij} = nilai indikator ke-i pada domain ke-j yang telah dinormalisasi

m = banyaknya indikator pada domain ke-j

Setelah diperoleh seluruh indeks domain, selanjutnya IPP dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai indeks tingkat domain dikalikan dengan bobot masing-masing domain. Formulasi pada tingkat indeks adalah sebagai berikut:

$$IPP = \sum_{j=1}^5 wt_j r_j$$

Dengan

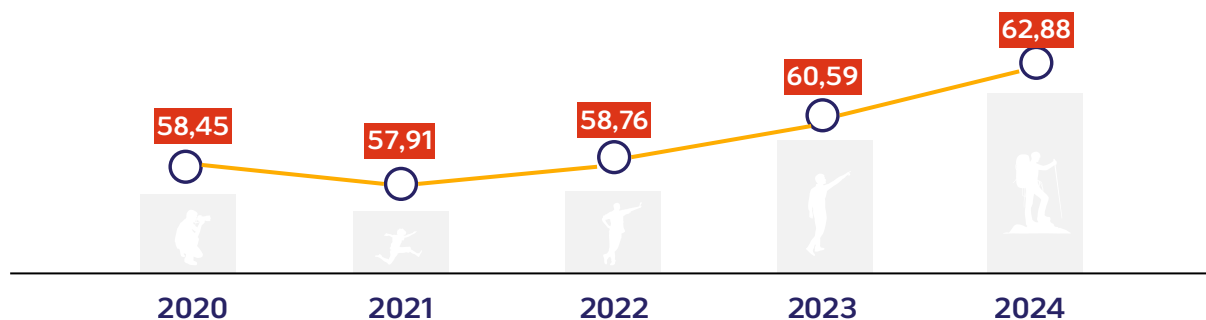
wt = bobot pada domain ke-j

r_j = nilai indeks domain ke - j

Seluruh data seluruh indikator pembentuk IPP pada tingkat nasional dan provinsi dipublikasikan oleh BPS secara terpusat begitu pula data indikator pada tingkat kabupaten/kota yang akan dirilis secara tersentralisasi berdasarkan proses pengumpulan data dan metode statistik yang telah dijelaskan di atas, sehingga seluruh proses perhitungan IPP dilaksanakan secara terpusat.

4.2 CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA METODE BARU

Indeks Pembangunan Pemuda metode baru secara nasional diperoleh berdasarkan pengukuran menggunakan indikator dan metode pengukuran yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hal tersebut diperoleh capaian Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2020-2024 sebagai berikut



Gambar 4.4 Capaian IPP Metode Baru Tahun 2020-2024

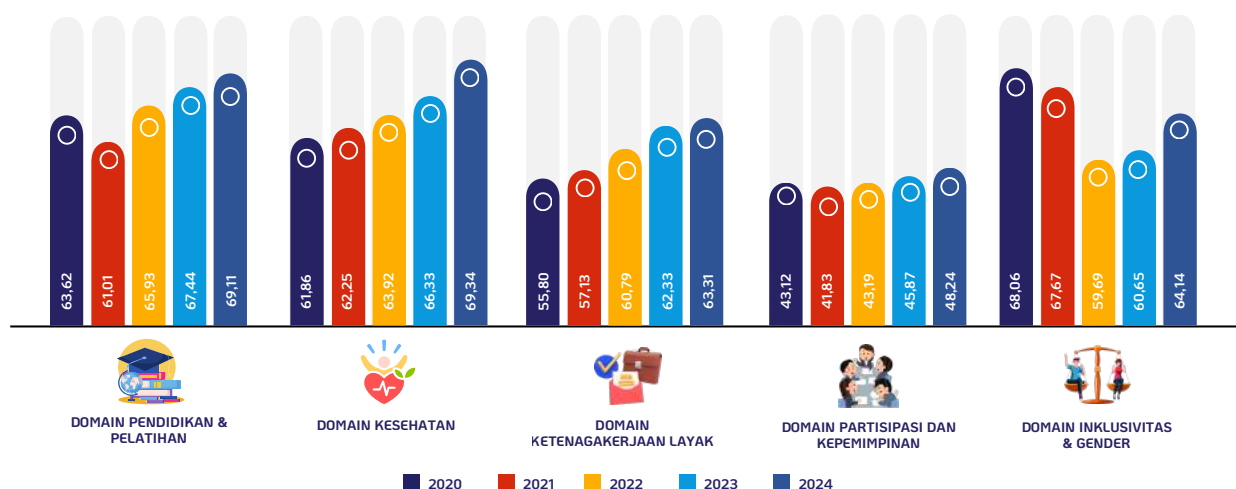
Secara umum, capaian IPP menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1 poin per tahun. Setelah sempat menurun sebesar 0,54 poin dari 58,45 pada 2020 menjadi 57,91 pada 2021, IPP kembali meningkat menjadi 58,76 pada 2022, kemudian naik menjadi 60,59 pada 2023 dan 62,88 pada 2024. Tren ini mengindikasikan adanya pemulihan kinerja pembangunan pemuda dan perbaikan dalam berbagai domain IPP setelah sempat mengalami penurunan capaian di awal periode.



Secara lebih spesifik pada domain pendidikan dan pelatihan secara umum terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 63,62 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 61,01 namun kembali meningkat di tahun 2022 hingga 2024 mencapai 69,11. Pada domain Kesehatan secara konsisten mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 61,86 hingga 2024 menjadi 69,34 dan menjadi domain yang memiliki pencapaian paling tinggi dibandingkan dengan domain lainnya.

Secara umum, capaian IPP menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1 poin per tahun. Setelah sempat menurun sebesar 0,54 poin dari 58,45 pada 2020 menjadi 57,91 pada 2021, IPP kembali meningkat menjadi 58,76 pada 2022, kemudian naik menjadi 60,59 pada 2023 dan 62,88 pada 2024. Tren ini mengindikasikan adanya pemulihan kinerja pembangunan pemuda dan perbaikan dalam berbagai domain IPP setelah sempat mengalami penurunan capaian di awal periode.

Secara lebih spesifik pada domain pendidikan dan pelatihan secara umum terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 63,62 dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 61,01 namun kembali meningkat di tahun 2022 hingga 2024 mencapai 69,11. Pada domain Kesehatan secara konsisten mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 61,86 hingga 2024 menjadi 69,34 dan menjadi domain yang memiliki pencapaian paling tinggi dibandingkan dengan domain lainnya.



Gambar 4.5 Perkembangan Domain Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru

Tabel 4.3 Capaian IPP Metode Baru Tahun 2024 per Provinsi

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DOMAIN KESEHATAN	DOMAIN KETENAGA KERJAAN LAYAK	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	IPP
1	Aceh	67,65	69,72	67,54	46,39	63,68	63,04
2	Sumatera Utara	71,07	69,49	61,57	48,13	68,23	63,73
3	Sumatera Barat	72,29	64,58	63,00	43,20	65,28	61,74
4	Riau	71,02	60,01	75,19	46,99	64,00	63,51
5	Jambi	66,40	68,20	64,85	43,64	71,99	62,96
6	Sumatera Selatan	67,42	66,93	53,04	41,04	58,46	57,47
7	Bengkulu	69,55	66,38	64,08	50,18	60,36	62,20
8	Lampung	65,56	70,51	57,15	42,03	57,96	58,72
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,35	76,31	69,96	38,72	71,06	65,27
10	Kepulauan Riau	79,63	80,88	62,82	46,74	78,10	69,65
11	DKI Jakarta	89,28	64,51	75,77	41,63	67,50	67,95
12	Jawa Barat	67,47	73,16	63,66	46,23	64,12	62,96
13	Jawa Tengah	66,05	66,93	53,04	41,04	67,18	63,72
14	DI Yogyakarta	86,02	66,93	53,04	41,04	65,86	73,66
15	Jawa Timur	69,83	65,18	63,03	52,04	64,17	62,91
16	Banten	69,55	77,94	62,95	45,38	60,97	63,44
17	Bali	87,91	73,13	81,93	58,18	77,02	75,75
18	Nusa Tenggara Barat	72,46	69,59	54,56	45,96	59,06	60,46
19	Nusa Tenggara Timur	58,76	62,25	44,69	48,40	66,20	55,98
20	Kalimantan Barat	61,91	69,66	56,79	36,63	55,76	56,21
21	Kalimantan Tengah	66,99	71,14	69,15	51,34	56,32	63,10
22	Kalimantan Selatan	75,17	72,45	59,51	42,38	63,36	62,69
23	Kalimantan Timur	78,41	78,39	66,20	40,33	51,79	63,29
24	Kalimantan Utara	68,85	61,77	67,41	45,51	55,55	59,95
25	Sulawesi Utara	71,31	68,17	54,99	87,08	53,18	67,13
26	Sulawesi Tengah	59,58	67,94	63,18	53,53	64,09	61,62
27	Sulawesi Selatan	68,47	68,31	69,43	41,70	61,44	61,94
28	Sulawesi Tenggara	69,08	73,23	60,95	34,85	61,52	60,00
29	Gorontalo	63,57	68,25	59,71	47,03	71,83	61,99
30	Sulawesi Barat	63,93	68,22	42,45	50,89	65,36	58,15
31	Maluku	65,90	56,29	44,20	67,16	60,38	58,84
32	Maluku Utara	62,01	76,26	43,80	42,74	61,86	57,33
33	Papua Barat	58,87	69,32	45,37	44,81	63,94	56,41
34	Papua Barat Daya	64,85	70,54	46,10	60,07	65,60	61,42
35	Papua	69,14	77,23	46,46	76,10	61,29	66,12

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	DOMAIN KESEHATAN	DOMAIN KETENAGAKERJAAN LAYAK	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	DOMAIN INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER	IPP
36	Papua Selatan	42,81	67,10	47,86	44,89	68,11	53,90
37	Papua Tengah	29,69	77,42	40,32	45,90	79,35	54,04
38	Papua Pegunungan	17,08	71,49	45,53	30,26	96,28	51,34
39	Indonesia	69,11	69,34	63,31	48,24	64,14	62,88

Keterangan :

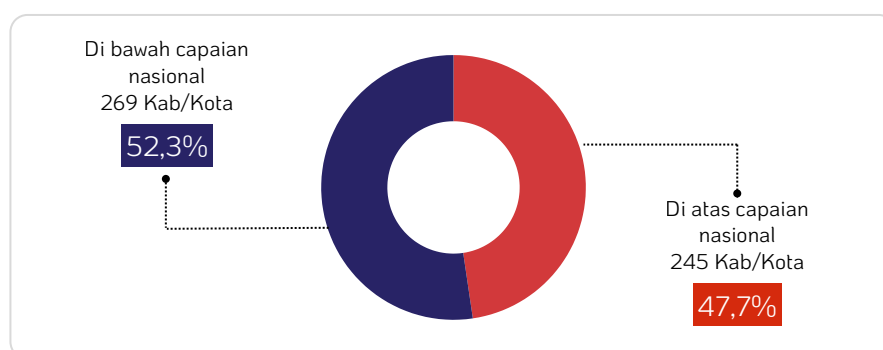
 : Di atas capaian nasional : Sama dengan capaian nasional : Di bawah capaian nasional

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui capaian IPP metode baru tahun 2024 pada setiap provinsi, diperoleh sebanyak 17 provinsi berada di atas capaian IPP nasional dan sebanyak 21 provinsi berada di bawah capaian nasional. Secara umum, daerah memiliki keunggulan pada domain kesehatan hal ini karena mayoritas provinsi berada di atas capaian nasional yaitu sebanyak 20 provinsi sedangkan 18 provinsi lainnya di bawah capaian nasional. Hal ini didorong oleh indikator angka kesakitan pemuda, sebanyak 28 provinsi memiliki capaian lebih baik dibandingkan capaian nasional dan sebanyak 10 provinsi lainnya masih di bawah capaian nasional.

Kelemahan daerah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni domain partisipasi dan kepemimpinan hal ini karena hanya 13 provinsi yang berada di atas capaian nasional dan 25 provinsi di bawah capaian nasional. Hal ini didorong oleh indikator partisipasi pemuda yang aktif berorganisasi yang mayoritas yaitu sebanyak 26 provinsi memiliki capaian di bawah nasional dan 12 provinsi lainnya di atas capaian nasional.

Pada domain pendidikan dan pelatihan terdapat 16 provinsi yang memiliki capaian di atas nasional dan 22 provinsi yang masih di bawah nasional. Pada domain ketenagakerjaan layak terdapat 14 provinsi yang berada di atas capaian nasional dan 24 provinsi berada di bawah capaian nasional. Adapun pada domain inklusivitas dan kesetaraan gender terdapat 17 provinsi yang berada di atas capaian nasional dan 21 provinsi yang berada di bawah capaian nasional. Didasarkan dengan hal tersebut, selain harus menjadi perhatian secara nasional dalam peningkatan domain partisipasi dan kepemimpinan dibandingkan dengan domain lainnya, hal ini juga selaras dan perlu menjadi perhatian setiap daerah untuk meningkatkan domain tersebut.

Adapun pada tingkat Kabupaten/Kota, capaian IPP Tahun 2024 diperoleh gambaran sebagai berikut



Gambar 4.6 Keterbandingan IPP Kab/Kota Tahun 2024 dengan capaian Tahun 2023 dan capaian nasional

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas diperoleh hasil bahwa capaian IPP Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebanyak 245 Kabupaten/Kota atau 47,67% memiliki capaian di atas capaian nasional lebih sedikit dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang memiliki capaian di bawah capaian nasional sebanyak 269 Kab/Kota atau 52,33%. Secara lebih rinci capaian IPP Kabupaten/Kota dapat dilihat pada lampiran 7.



BAB 5

PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari dinamika capaian pembangunan pemuda baik nasional maupun daerah dengan metode lama dan baru serta rekomendasi terkait dengan arah kebijakan ke depan



5.1 KESIMPULAN

Perkembangan Pembangunan Pemuda Indonesia selama 2015-2024 terus mengalami peningkatan, meskipun kenaikan nilai IPP tahun 2024 cenderung lambat dan memiliki beberapa catatan namun capaian 58,33 telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67. Jika dilihat selama lima tahun terakhir, terdapat peningkatan pada ke-4 domain IPP hanya domain pendidikan yang mengalami stagnasi. Namun demikian domain pendidikan serta domain kesehatan dan kesejahteraan menjadi domain yang memiliki capaian tertinggi dibandingkan dengan tahun lain.



Secara umum hanya terdapat 7 provinsi yang berada di atas capaian IPP nasional. Meskipun demikian, kinerja pembangunan kepemudaan relatif meningkat pada setiap provinsi di Indonesia. Hal ini ditandai oleh 23 provinsi dari 34 provinsi yang mengalami kenaikan nilai IPP. Sehingga mengindikasikan bahwa program dan kebijakan terkait kepemudaan di daerah-daerah tersebut mulai membuahkan hasil dan patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam memajukan potensi pemuda Indonesia. Namun, masih ada kesenjangan dan ruang untuk optimasi yang perlu diatasi dengan upaya berkelanjutan dan sinergis dari semua pihak terkait.

Selain itu setiap provinsi memiliki keunggulan yang perlu dipertahankan dan kelemahan pada setiap domain maupun indikator yang perlu menjadi fokus khusus. Secara umum, pada IPP metode lama, daerah memiliki keunggulan pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan terutama indikator persentase pemuda korban kejahatan dan memiliki kelemahan pada domain lapangan dan kesempatan kerja terutama indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih, hal ini karena mayoritas daerah memiliki kecenderungan capaian yang menurun atau stagnan dan di bawah capaian nasional.

Pada periode pembangunan 2025-2029, kerangka kebijakan pembangunan pemuda memiliki penekanan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, sehingga di tahun 2024 telah dilakukan peninjauan ulang terhadap IPP untuk memastikan bahwa ukuran tersebut mampu merefleksikan capaian pembangunan pemuda dan mengangkat dinamika situasi pemuda saat ini yakni IPP metode baru.

Secara umum, perbedaan antara IPP metode lama dan IPP metode baru terletak pada struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. IPP metode baru memungkinkan disagregasi data IPP hingga tingkat kabupaten/kota, yang sebelumnya hanya terbatas pada tingkat nasional dan provinsi. Perbedaan ini berimplikasi terhadap perbedaan nilai IPP yang dihitung menggunakan metode lama dan metode baru, sehingga perlu menjadi catatan keduanya tidak bisa diperbandingkan.



Adapun capaian IPP metode baru tahun 2024 sebesar 62,88 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,59. Capaian domain Kesehatan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan domain lainnya yaitu 69,34 sedangkan yang paling perlu mendapat perhatian adalah domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 48,24.

Pada tingkat provinsi, terdapat sebanyak 17 provinsi dari 38 provinsi memiliki capaian di atas capaian nasional dan 21 provinsi memiliki capaian di bawah capaian nasional. Senada dengan metode lama, secara umum pada IPP metode baru, daerah memiliki keunggulan pada domain kesehatan dan kesejahteraan terutama pada indikator angka kesakitan pemuda dan memiliki kelemahan pada domain partisipasi dan kepemimpinan terutama pada indikator persentase pemuda yang aktif organisasi, hal ini dikarenakan mayoritas daerah masih memiliki capaian di bawah capaian nasional.

Berbagai tantangan pencapaian indeks pembangunan pemuda seperti besarnya ketimpangan capaian IPP antarwilayah, lemahnya tata kelola koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan, keterbatasan anggaran pembangunan kepemudaan dan rendahnya political will dan komitmen kepala daerah terhadap pembangunan pemuda menggambarkan bahwa peningkatan IPP tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada konsistensi komitmen politik, koordinasi lintas sektor, dan perubahan paradigma pembangunan yang lebih inklusif terhadap pemuda.



Sumber Gambar : Al Gemini



5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi terkait arah kebijakan ke depan pembangunan pemuda di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS).
- b. Mengingat IPP dengan metode baru telah ditetapkan sebagai tolok ukur pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah daerah yang telah memiliki RAD perlu segera melakukan penyesuaian program/intervensi dan target capaian, sedangkan daerah yang belum menyusun diharapkan segera menyusunnya sesuai amanat Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan setiap daerah memiliki rencana aksi yang terukur, relevan, dan sejalan dengan kebijakan nasional.
- c. Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui asistensi teknis dan pemantauan berkelanjutan, agar pelaksanaan RAN dan RAD Kepemudaan tidak berjalan parsial atau sektoral. Pendekatan kolaboratif antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi pemuda, akademisi, dan pemangku kepentingan bidang kepemudaan lainnya menjadi kunci untuk mempercepat capaian pembangunan pemuda yang inklusif dan berkelanjutan.
- d. Secara umum Capaian IPP Nasional dan daerah belum sepenuhnya stabil dan merata pada setiap domain, menunjukkan perlunya peran aktif setiap pemangku kepentingan dalam menjaga konsistensi capaian, serta mendorong peningkatan capaian pada domain yang masih lemah melalui program/kegiatan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan.
- e. Banyaknya kepala daerah yang belum menempatkan isu kepemudaan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan menunjukkan perlunya membangun kesadaran, komitmen dan political will agar kebijakan dan program kepemudaan menjadi agenda strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.

Program-program yang direkomendasikan terkait dengan domain IPP dapat meningkatkan kualitas pemuda, diantaranya adalah:

- a. Pada domain Pendidikan dan Pelatihan, diperlukan penguatan kapasitas pemuda melalui penguasaan keterampilan vokasi, literasi digital, dan kemampuan adaptif yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga capaian pendidikan berdampak langsung pada kemandirian dan daya saing ekonomi.
- b. Pada domain Kesehatan, penguatan resiliensi pemuda terhadap perilaku berisiko perlu diiringi dengan optimalisasi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang adaptif terhadap kebutuhan pemuda. Pembudayaan perilaku hidup sehat dan olahraga harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan kesehatan pemuda yang berorientasi jangka panjang.
- c. Pada domain Ketenagakerjaan Layak, peningkatan kesiapan kerja dan kemandirian ekonomi pemuda perlu ditopang dengan pelatihan keterampilan yang relevan, penguatan ekosistem wirausaha, dan konektivitas dengan sektor produktif. Upaya ini akan memperluas akses pemuda terhadap pekerjaan layak sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru.
- d. Pada Domain Partisipasi dan Kepemimpinan diperlukan penguatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi kepemudaan, komunitas, dan kepramukaan sebagai ruang belajar kepemimpinan, partisipasi bermakna, dan kolaborasi pemuda.
- e. Pada domain Inklusivitas dan Kesetaraan Gender, penguatan tata kelola, kelembagaan, serta kemitraan lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan layanan kepemudaan responsif gender dan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya ruang yang setara bagi seluruh pemuda untuk berpartisipasi, berdaya, dan berkembang.

Seluruh rekomendasi peningkatan capaian domain pembangunan pemuda perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi, tantangan, kebutuhan, dan potensi daerah. Pendekatan yang sensitif terhadap keragaman daerah akan mendorong terciptanya program/intervensi lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan



DAFTAR PUSTAKA

Almaidah, dkk. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok di Kalangan Pemuda Indonesia.* Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Arif Satria. (2023). *Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi dan Tantangan APK Perguruan Tinggi di Indonesia.* Institut Pertanian Bogor (IPB).

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pemuda Indonesia 2024.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2024.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020–2024.* Jakarta: Kemenpora RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.* Jakarta: Bappenas.

Mardatilah & Hermanzoni. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Wirausaha Pemuda di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan.

Mukhaiyar, dkk. (2022). *Pengaruh Jumlah Sekolah terhadap Angka Partisipasi Kasar Anak Sekolah Menengah di Indonesia.* Jurnal Pendidikan dan Ekonomi.

Nuraeni & Suryono. (2021). *Kesetaraan Gender dan Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja di Indonesia.* Jurnal Pembangunan Sosial dan Gender.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.* Jakarta.

Purwandar & Mussadun. (2015). *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Partisipasi Sosial Pemuda.* Jurnal Ilmu Sosial.

Sumber Gambar : Al Gemini



LAMPIRAN

Lampiran 1a. Data Awal Indikator Penyusun IPP Tahun 2024 Domain 1-3

Lampiran 1b. Data Awal Indikator Penyusun IPP Tahun 2024 Domain 4-5

Lampiran 2. Data Transformasi Indikator Penyusun IPP Tahun 2024

Lampiran 3. Indeks Domain IPP Tahun 2024 di 34 Provinsi

Lampiran 4. Indikator yang Unggul dan Kurang Per Provinsi

Lampiran 5. Capaian IPP Metode Lama Tahun 2015-2024

Lampiran 6a. Data Awal Indikator Penyusun IPP Metode Baru Tahun 2024 pada Domain 1-2

Lampiran 6b. Data Awal Indikator Penyusun IPP Metode Baru Tahun 2024 pada Domain 3-5

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024

Lampiran 8b. Rekapitulasi Metode Peroleh Sumber Data dan Data Ekstrem

Pikiran
Terbaik
Negeri



Lampiran 1a. Data Awal Indikator Penyusun IPP Tahun 2024 Domain 1 - 3

NO	PROVINSI	PENDIDIKAN			KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN				LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	
		Rata-rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK PT	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda Korban Kejahatan	Pemuda merokok	Remaja Perempuan Sedang Hamil	Pemuda <i>white collar</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	Aceh	11,74	95,48	42,48	6,68	0,25	22,9	7,5	0,35	14,66
2	Sumatera Utara	11,58	94,61	31,63	5,31	0,39	20,79	10,36	0,51	11,82
3	Sumatera Barat	11,55	94,93	43,29	9,61	0,66	26,55	16,57	0,43	14,26
4	Riau	11,14	90,18	34,86	5,8	0,33	22	32,61	0,34	9,43
5	Jambi	11,2	87,57	31,89	6,16	0,34	25,87	14,69	0,34	10,63
6	Sumatera Selatan	10,86	85,33	26,41	5,67	0,65	27,5	8,23	0,55	11,29
7	Bengkulu	11,28	94,8	37,79	9,34	0,63	28,65	10,07	0,53	8,95
8	Lampung	10,83	90,19	22,29	7,49	0,55	29,19	1,66	0,48	11,43
9	Kepulauan Bangka Belitung	10,94	87,83	20,14	5,02	0,25	24,43	2,82	0,34	11,09
10	Kepulauan Riau	11,8	94,3	30,48	5,77	0,09	20,52	0	0,51	12,71
11	DKI Jakarta	12,38	88,37	41,98	4,5	0,8	18,64	39,02	0,95	16,23
12	Jawa Barat	11,05	87,83	27,21	7,69	0,81	28,96	4,26	0,36	16,26
13	Jawa Tengah	10,69	89,69	26,37	8,48	0,34	27,41	16,38	0,49	12,29
14	DI Yogyakarta	12,59	95,27	73,9	7,99	0,71	25,77	7,35	0,94	9,57
15	Jawa Timur	11,1	91,13	31,85	6,99	0,33	25,45	16,63	0,81	11,08
16	Banten	11,09	86,44	32,4	5,66	0,2	27,25	0	0,33	17,18
17	Bali	11,65	94,68	38,15	5,36	0,04	15,42	12,46	0,46	3,77
18	Nusa Tenggara Barat	11,51	94,08	34,8	11,22	1,07	30,04	6,16	0,35	5,96
19	Nusa Tenggara Timur	10,49	90,49	31,47	8,2	0,24	23,72	15,11	0,14	7,42
20	Kalimantan Barat	10,38	85,15	24,99	5,36	0,29	23,87	11,11	0,28	11,06
21	Kalimantan Tengah	11,15	87,24	27,49	3,1	0,17	23,28	10,83	0,53	9,26
22	Kalimantan Selatan	11,03	86,1	28,06	5,15	0,24	20,5	9,78	0,26	9,99
23	Kalimantan Timur	11,61	95,37	40,03	4,07	0,13	18,25	5,31	0,31	11,87
24	Kalimantan Utara	11,03	95,85	27,98	4,73	0,3	20,51	30,99	0,37	9,78
25	Sulawesi Utara	11,49	87,72	34,75	5,57	0,32	21,14	10,52	0,37	17,38
26	Sulawesi Tengah	10,72	89,49	40,38	6,59	0,41	22,39	13,37	0,3	7,39
27	Sulawesi Selatan	11,05	88,58	41,83	5,65	0,16	20,72	14,64	0,44	9,22
28	Sulawesi Tenggara	11,24	88,77	42,95	5,71	0,2	19,83	8,89	0,31	7,17
29	Gorontalo	10,45	85,95	35,68	11,63	0,41	25,53	4,35	0,25	7,91
30	Sulawesi Barat	10,5	84,12	30,41	6,61	0,29	23,86	10,75	0,16	5,6
31	Maluku	11,76	92,4	47,91	3,66	0,6	24,16	32,79	0,19	14,26
32	Maluku Utara	11,59	91,72	42,22	3,25	0,38	22,27	1,8	0,1	11,01
33	Papua Barat	11,19	93,83	32,25	3,66	0,47	19,28	11,42	0,22	12,94
34	Papua	8,1	76,84	20,72	3,24	0,47	15,18	3,91	0,06	6,64
35	Indonesia	11,11	89,71	32	6,8	0,47	25,09	10,77	0,47	12,24

Keterangan :

: Di atas capaian nasional : Sama dengan capaian nasional : Di bawah capaian nasional

Lampiran 1b. Data Awal Indikator Penyusun IPP Tahun 2024 Domain 4 - 5

NO	PROVINSI	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			GENDER DAN DISKRIMINASI		
		Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial	Partisipasi Pemuda dalam organisasi	Pemuda berpendapat dalam rapat	Perkawinan usia anak	Pemuda perempuan sedang bersekolah menengah dan perguruan tinggi	Pemuda perempuan bekerja di sektor formal
1	Aceh	86,21	1,81	9,85	2,62	48,33	17,53
2	Sumatera Utara	76,82	6	5,45	1,81	47,21	25,19
3	Sumatera Barat	77,53	3,67	9,75	3,49	54,7	22,51
4	Riau	75,39	5,02	7,17	4,13	46,12	23,91
5	Jambi	87,55	3,58	11,21	7,8	40,59	20
6	Sumatera Selatan	73,95	4,21	5,81	8,45	38,39	21,46
7	Bengkulu	77,92	5,78	6,56	6,3	47,77	21,38
8	Lampung	79,24	4,33	8,53	4,87	38,41	19,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	72,15	2,43	4,17	8,05	37,9	27,21
10	Kepulauan Riau	70,48	4,34	4,27	2,89	45,84	37,72
11	DKI Jakarta	67,69	3,63	6,93	1,68	43,92	37,39
12	Jawa Barat	78,45	4,71	7,79	5,78	39,45	27,28
13	Jawa Tengah	86,35	10,16	12,39	6,13	39,86	32,8
14	DI Yogyakarta	90,23	24,64	21,76	0,64	60,02	37,68
15	Jawa Timur	86,72	7,44	10,57	7,78	42,95	27,46
16	Banten	78,91	4,92	7,06	3,73	39,69	29,92
17	Bali	82,84	10,5	11,5	3,37	49,11	44,36
18	Nusa Tenggara Barat	91,84	3,82	11,67	14,96	44,55	20,1
19	Nusa Tenggara Timur	87,67	7	10,95	4,7	44,38	16,47
20	Kalimantan Barat	78,19	3,38	5,66	10,05	38,21	23,73
21	Kalimantan Tengah	79,79	2,23	5,46	9,89	38,47	24,21
22	Kalimantan Selatan	76,96	3,32	4,75	7,8	41,08	27,95
23	Kalimantan Timur	67,61	4,42	4,9	4,29	49,71	27,56
24	Kalimantan Utara	72,54	7,58	4,66	6,94	47,85	25,97
25	Sulawesi Utara	87,88	17,84	6,57	8,96	43,12	24,64
26	Sulawesi Tengah	85,61	5,59	4,88	9,06	46,3	19,7
27	Sulawesi Selatan	70,35	3,28	4,02	8,09	50,95	20,44
28	Sulawesi Tenggara	75,57	1,91	3,31	9,4	47,62	22,31
29	Gorontalo	84,15	5,83	6,18	7,34	47,46	22,54
30	Sulawesi Barat	80,08	9,59	6,74	10,71	43,72	17,75
31	Maluku	86,11	13,61	7,26	4,82	53,22	15,76
32	Maluku Utara	82,85	2,27	9,55	6,88	43,52	15,85
33	Papua Barat	82,39	6,89	15,47	4,13	46,95	15,29
34	Papua	87,89	4,72	12,4	7,47	31,1	7,27
35	Indonesia	80,67	6,16	8,66	5,9	42,88	26,41

Keterangan :

: Di atas capaian nasional : Sama dengan capaian nasional : Di bawah capaian nasional

Lampiran 2. Data Transformasi Indikator Penyusun IPP Tahun 2024

NO	PROVINSI	PENDIDIKAN			KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN				LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA		PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			GENDER DAN DISKRIMINASI		
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
1	Aceh	8	10	5	7	10	4	9	2	5	9	1	4	10	4	3
2	Sumatera Utara	8	10	4	8	9	5	8	3	6	8	2	3	10	3	5
3	Sumatera Barat	8	10	5	6	8	3	7	3	5	8	1	4	9	4	4
4	Riau	8	10	4	8	9	4	3	2	7	8	2	3	9	3	4
5	Jambi	8	9	4	7	9	3	7	2	7	9	1	5	8	3	4
6	Sumatera Selatan	8	9	3	8	8	3	9	3	6	8	1	3	8	2	4
7	Bengkulu	8	10	4	6	8	3	8	3	7	8	2	3	9	4	4
8	Lampung	8	10	3	7	9	2	10	3	6	8	1	4	9	2	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	9	3	8	10	4	10	2	7	8	1	2	8	2	5
10	Kepulauan Riau	8	10	4	8	10	5	10	3	6	8	1	2	10	3	7
11	DKI Jakarta	9	9	5	8	8	5	2	5	5	7	1	3	10	3	7
12	Jawa Barat	8	9	3	7	8	2	10	2	5	8	2	4	9	2	5
13	Jawa Tengah	8	9	3	6	9	3	7	3	6	9	3	5	9	2	6
14	DI Yogyakarta	9	10	8	7	8	3	9	5	7	10	6	9	10	5	7
15	Jawa Timur	8	10	4	7	9	3	7	5	7	9	2	5	8	3	5
16	Banten	8	9	4	8	10	3	10	2	4	8	2	3	9	2	5
17	Bali	8	10	4	8	10	6	8	3	9	9	3	5	9	4	8
18	Nusa Tenggara Barat	8	10	4	5	7	2	9	2	8	10	1	5	6	3	4
19	Nusa Tenggara Timur	7	10	4	6	10	4	7	1	8	9	2	5	9	3	3
20	Kalimantan Barat	7	9	3	8	10	4	8	2	7	8	1	3	7	2	4
21	Kalimantan Tengah	8	9	3	9	10	4	8	3	7	8	1	3	8	2	5
22	Kalimantan Selatan	8	9	3	8	10	5	8	2	7	8	1	2	8	3	5
23	Kalimantan Timur	8	10	5	8	10	5	9	2	6	7	1	2	9	4	5
24	Kalimantan Utara	8	10	3	8	9	5	4	2	7	8	2	2	8	4	5
25	Sulawesi Utara	8	9	4	8	9	5	8	2	4	9	4	3	8	3	5
26	Sulawesi Tengah	8	9	5	7	9	4	8	2	8	9	2	2	8	3	4
27	Sulawesi Selatan	8	9	5	8	10	5	7	3	7	8	1	2	8	4	4
28	Sulawesi Tenggara	8	9	5	8	10	5	9	2	8	8	1	2	8	4	4
29	Gorontalo	7	9	4	5	9	3	10	2	8	9	2	3	8	3	4
30	Sulawesi Barat	7	9	4	7	10	4	8	1	9	9	3	3	7	3	3
31	Maluku	8	10	5	9	8	4	3	1	5	9	4	3	9	4	3
32	Maluku Utara	8	10	5	9	9	4	10	1	7	9	1	4	8	3	3
33	Papua Barat	8	10	4	9	9	5	8	2	6	9	2	7	9	3	3
34	Papua	6	8	3	9	9	6	10	1	8	9	2	5	8	1	2
35	Indonesia	8	9	4	7	9	4	8	3	6	9	2	4	9	3	5

Keterangan :

: Di atas capaian nasional : Sama dengan capaian nasional : Di bawah capaian nasional

Lampiran 3. Indeks Domain IPP Tahun 2024 di 34 Provinsi

NO	PROVINSI	DOMAIN PENDIDIKAN	DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	DOMAIN KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI	DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI
1	Aceh	76,67	75,00	35,00	46,67	56,67
2	Sumatera Utara	73,33	75,00	45,00	43,33	60,00
3	Sumatera Barat	76,67	60,00	40,00	43,33	56,67
4	Riau	73,33	60,00	45,00	43,33	53,33
5	Jambi	70,00	65,00	45,00	50,00	50,00
6	Sumatera Selatan	66,67	70,00	45,00	40,00	46,67
7	Bengkulu	73,33	62,50	50,00	43,33	56,67
8	Lampung	70,00	70,00	45,00	43,33	50,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	66,67	80,00	45,00	36,67	50,00
10	Kepulauan Riau	73,33	82,50	45,00	36,67	66,67
11	DKI Jakarta	76,67	57,50	50,00	36,67	66,67
12	Jawa Barat	66,67	67,50	35,00	46,67	53,33
13	Jawa Tengah	66,67	62,50	45,00	56,67	56,67
14	DI Yogyakarta	90,00	67,50	60,00	83,33	73,33
15	Jawa Timur	73,33	65,00	60,00	53,33	53,33
16	Banten	70,00	77,50	30,00	43,33	53,33
17	Bali	73,33	80,00	60,00	56,67	70,00
18	Nusa Tenggara Barat	73,33	57,50	50,00	53,33	43,33
19	Nusa Tenggara Timur	70,00	67,50	45,00	53,33	50,00
20	Kalimantan Barat	63,33	75,00	45,00	40,00	43,33
21	Kalimantan Tengah	66,67	77,50	50,00	40,00	50,00
22	Kalimantan Selatan	66,67	77,50	45,00	36,67	53,33
23	Kalimantan Timur	76,67	80,00	40,00	33,33	60,00
24	Kalimantan Utara	70,00	65,00	45,00	40,00	56,67
25	Sulawesi Utara	70,00	75,00	30,00	53,33	53,33
26	Sulawesi Tengah	73,33	70,00	50,00	43,33	50,00
27	Sulawesi Selatan	73,33	75,00	50,00	36,67	53,33
28	Sulawesi Tenggara	73,33	80,00	50,00	36,67	53,33
29	Gorontalo	66,67	67,50	50,00	46,67	50,00
30	Sulawesi Barat	66,67	72,50	50,00	50,00	43,33
31	Maluku	76,67	60,00	30,00	53,33	53,33
32	Maluku Utara	76,67	80,00	40,00	46,67	46,67
33	Papua Barat	73,33	77,50	40,00	60,00	50,00
34	Papua	56,67	85,00	45,00	53,33	36,67
35	Indonesia	70,00	70,00	45,00	50,00	56,67

Keterangan :

: Di atas capaian nasional
 : Sama dengan capaian nasional
 : Di bawah capaian nasional

Lampiran 4. Indikator yang Unggul dan Kurang Per Provinsi

	PROVINSI	PENDIDIKAN			KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN				LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA		PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			GENDER DAN DISKRIMINASI		
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15
1	Aceh	-	Unggul	-	Unggul	-	-	Unggul	Kurang	-	Unggul	Kurang	-	Unggul	-	-
2	Sumatera Utara	Unggul	-	Kurang	-	Unggul	-	Unggul	-	Unggul	-	Kurang	-	Unggul	Unggul	-
3	Sumatera Barat	Unggul	Unggul	Unggul	Kurang	-	Kurang	-	-	Kurang	-	Kurang	Unggul	Unggul	-	-
4	Riau	-	Unggul	-	-	Unggul	-	Kurang	Kurang	Unggul	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	Unggul	-	-	Unggul	Unggul	Kurang	Kurang	Kurang	Unggul	Unggul	Kurang	Unggul	Kurang	Kurang	Kurang
6	Sumatera Selatan	-	Kurang	Kurang	-	Kurang	Kurang	Unggul	Unggul	-	-	-	-	-	-	Kurang
7	Bengkulu	Unggul	Unggul	-	Kurang	-	Kurang	Unggul	-	Unggul	-	Kurang	-	-	-	-
8	Lampung	-	Unggul	-	Kurang	-	-	Unggul	Unggul	-	-	Kurang	-	Unggul	Kurang	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	Kurang	-	Unggul	Unggul	-	Unggul	-	-	-	-	-	-	-	Unggul
10	Kepulauan Riau	Unggul	Unggul	-	Unggul	Unggul	Unggul	-	Unggul	Kurang	-	Kurang	-	-	Unggul	-
11	DKI Jakarta	Unggul	-	Unggul	Unggul	Kurang	-	-	Unggul	-	-	Kurang	-	Unggul	Unggul	-
12	Jawa Barat	-	-	-	Kurang	Kurang	Kurang	Unggul	Kurang	-	-	-	-	Unggul	-	Unggul
13	Jawa Tengah	-	Kurang	-	Kurang	Unggul	Kurang	-	-	-	Unggul	Unggul	Unggul	-	-	Unggul
14	DI Yogyakarta	-	Unggul	-	Kurang	-	Kurang	Unggul	-	-	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	Kurang	Unggul	-	-	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	-	Unggul	Unggul
16	Banten	Kurang	-	Unggul	-	Unggul	Kurang	-	Kurang	-	-	-	-	Unggul	-	Unggul
17	Bali	-	-	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul	-	Kurang	Unggul	Unggul	-	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
18	Nusa Tenggara Barat	Unggul	Unggul	Unggul	-	Kurang	Kurang	Unggul	-	Unggul	Unggul	Kurang	Unggul	-	Unggul	Kurang
19	Nusa Tenggara Timur	-	Unggul	Kurang	-	Unggul	Unggul	-	Kurang	Unggul	Unggul	-	Unggul	Unggul	Unggul	-
20	Kalimantan Barat	-	Kurang	Kurang	Unggul	Unggul	-	-	Kurang	Unggul	-	-	Kurang	-	Kurang	-
21	Kalimantan Tengah	Unggul	-	-	Unggul	Unggul	-	-	-	Unggul	-	Kurang	Kurang	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	Kurang	-	Unggul	-	Unggul	-	Unggul	-	-	-	-	Kurang	Unggul
23	Kalimantan Timur	Unggul	Unggul	-	Unggul	Unggul	-	Unggul	Kurang	Unggul	-	-	-	Unggul	Unggul	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	Unggul	Unggul	-	-	-	Unggul	-	Unggul	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	Unggul	Kurang	-	Unggul	-	Unggul	Unggul	Kurang	Kurang	Unggul	Unggul	-	-	Unggul	-
26	Sulawesi Tengah	-	Kurang	Unggul	-	Unggul	-	Kurang	Kurang	-	Unggul	Kurang	Kurang	Kurang	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	Unggul	Unggul	Kurang	-	Unggul	-	Kurang	Kurang	Kurang	Unggul	Kurang
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	Unggul	-	Unggul	Kurang	Unggul	-	Kurang	Kurang	-	Unggul	-
29	Gorontalo	-	-	-	Kurang	-	Kurang	Unggul	-	Unggul	-	-	Kurang	-	-	Kurang
30	Sulawesi Barat	-	Kurang	-	-	-	-	Unggul	Kurang	-	-	Unggul	-	-	Unggul	-
31	Maluku	Unggul	-	-	Unggul	-	-	-	-	-	Unggul	-	Kurang	Unggul	-	-
32	Maluku Utara	Unggul	-	-	Unggul	Unggul	-	Unggul	Kurang	Unggul	Unggul	Kurang	-	-	-	Kurang
33	Papua Barat	-	-	-	-	Kurang	Unggul	-	Kurang	-	Unggul	-	Unggul	Unggul	-	-
34	Papua	-	Kurang	-	-	Kurang	Unggul	Unggul	Kurang	-	Unggul	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Lebih tinggi dari capaian nasional dan meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya
- Lebih rendah dari capaian nasional dan menurun dibandingkan capaian tahun sebelumnya

Lampiran 5. Capaian IPP Metode Lama Tahun 2015-2024

NO	PROVINSI	TAHUN									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	51,83	53,83	55,33	55,50	55,33	56,33	57,67	57,67	60,00	58,00
2	Sumatera Utara	52,67	50,33	53,50	55,67	54,17	54,50	52,50	52,50	56,33	59,33
3	Sumatera Barat	49,33	53,17	50,83	53,50	50,33	55,33	51,33	55,17	55,67	55,33
4	Riau	48,83	51,00	50,67	49,50	52,67	50,67	56,17	52,17	55,17	55,00
5	Jambi	50,00	50,33	52,33	54,17	49,33	50,33	54,50	51,83	56,83	56,00
6	Sumatera Selatan	42,17	52,00	47,50	48,17	49,50	48,67	48,33	51,33	54,00	53,67
7	Bengkulu	48,50	55,17	51,00	51,33	52,67	50,83	53,17	54,83	57,33	57,17
8	Lampung	43,83	46,67	46,00	49,50	48,50	49,83	47,50	53,00	53,17	55,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	46,83	50,83	49,00	53,67	48,67	48,83	48,17	52,67	52,67	55,67
10	Kepulauan Riau	57,17	53,50	56,67	54,83	58,67	55,67	56,83	56,83	55,33	60,83
11	DKI Jakarta	53,50	54,00	55,00	55,67	54,00	51,00	49,67	51,50	52,50	57,50
12	Jawa Barat	45,83	47,67	45,67	46,17	50,00	48,83	47,00	49,67	51,17	53,83
13	Jawa Tengah	48,33	50,83	51,00	53,50	54,50	53,67	50,67	53,83	55,50	57,50
14	DI Yogyakarta	65,50	66,00	70,33	70,33	74,67	71,00	69,67	67,50	73,33	74,83
15	Jawa Timur	48,50	51,33	51,67	53,17	52,50	53,00	53,50	55,50	56,50	61,00
16	Banten	47,17	49,83	51,00	48,67	52,17	49,00	47,83	52,17	53,33	54,83
17	Bali	61,33	61,67	62,00	61,33	61,67	61,00	61,33	62,17	62,67	68,00
18	Nusa Tenggara Barat	44,17	48,00	50,83	51,67	51,50	51,00	48,83	52,50	53,67	55,50
19	Nusa Tenggara Timur	46,83	48,50	49,00	53,17	51,67	52,17	52,83	54,33	55,33	57,17
20	Kalimantan Barat	46,50	48,83	50,50	49,33	49,33	47,83	49,50	50,33	53,33	53,33
21	Kalimantan Tengah	47,50	47,17	48,67	50,83	49,17	50,67	49,00	50,00	54,83	56,83
22	Kalimantan Selatan	43,83	47,17	47,00	48,00	47,83	50,67	49,33	50,17	54,67	55,83
23	Kalimantan Timur	52,17	58,33	53,50	54,83	56,33	54,83	52,50	56,67	59,17	58,00
24	Kalimantan Utara	50,83	52,50	48,33	57,00	50,33	52,67	48,50	49,67	51,17	55,33
25	Sulawesi Utara	46,83	55,50	50,67	49,67	49,50	49,50	52,00	53,33	54,83	56,33
26	Sulawesi Tengah	46,83	50,33	48,00	49,17	50,00	52,17	54,17	53,00	60,00	57,33
27	Sulawesi Selatan	48,17	48,67	48,17	50,50	52,00	48,67	52,67	53,67	56,67	57,67
28	Sulawesi Tenggara	48,33	49,67	51,67	49,33	49,83	48,83	50,33	53,00	56,67	58,67
29	Gorontalo	47,83	52,17	45,67	48,17	49,33	50,67	53,17	53,83	57,83	56,17
30	Sulawesi Barat	47,67	50,17	48,50	49,50	49,50	47,33	49,17	53,33	55,50	56,50
31	Maluku	48,67	57,00	50,67	52,00	50,00	52,00	54,67	56,67	54,33	54,67
32	Maluku Utara	50,83	56,67	51,83	51,67	52,67	55,83	55,67	59,17	58,83	58,00
33	Papua Barat	48,50	51,33	51,00	50,83	50,17	51,33	55,17	55,83	57,17	60,17
34	Papua	48,00	50,83	48,00	47,50	49,83	50,17	52,00	57,50	52,17	55,33
35	Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,5	52,67	51	53,33	55,33	56,33	58,33

Keterangan :

: Di atas capaian nasional
 : Sama dengan capaian nasional
 : Di bawah capaian nasional

Lampiran 6a. Data Awal Indikator Penyusun IPP Metode Baru Tahun 2024 pada Domain 1-2

NO	PROVINSI	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				KESEHATAN		
		Pemuda mendapatkan pelatihan	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	Pemuda dengan keterampilan TIK	Angka Kesakitan Pemuda	Pemuda Merokok	Pemuda Olahraga	Remaja perempuan sedang hamil
1	Aceh	11,77	72,10	96,30	6,68	23,12	30,88	7,50
2	Sumatera Utara	15,54	72,20	97,33	5,31	21,02	29,97	10,36
3	Sumatera Barat	18,22	68,76	98,29	9,61	26,72	37,40	16,57
4	Riau	18,10	65,03	98,86	5,80	22,25	37,13	32,61
5	Jambi	13,21	63,27	98,79	6,16	26,03	39,69	14,69
6	Sumatera Selatan	15,80	61,29	97,72	5,67	27,84	29,11	8,23
7	Bengkulu	17,88	62,62	97,62	9,34	29,07	35,93	10,07
8	Lampung	14,32	59,06	98,17	7,49	29,40	33,76	1,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	16,03	67,84	98,78	5,02	24,69	42,23	2,82
10	Kepulauan Riau	23,95	75,14	99,45	5,77	21,13	47,08	0,00
11	DKI Jakarta	30,79	87,01	98,80	4,50	19,23	52,75	39,02
12	Jawa Barat	15,72	61,03	98,36	7,69	29,40	44,72	4,26
13	Jawa Tengah	17,59	52,65	98,77	8,48	27,89	32,80	16,38
14	DI Yogyakarta	27,83	83,83	99,67	7,99	26,99	42,64	7,35
15	Jawa Timur	18,28	62,02	98,15	6,99	26,04	35,20	16,63
16	Banten	17,81	62,58	97,84	5,66	27,83	47,42	0,00
17	Bali	37,19	69,29	98,65	5,36	17,92	38,85	12,46
18	Nusa Tenggara Barat	20,20	65,12	98,00	11,22	30,41	43,04	6,16
19	Nusa Tenggara Timur	11,50	51,13	93,25	8,20	24,02	24,10	15,11
20	Kalimantan Barat	12,44	54,89	96,35	5,36	24,27	35,57	11,11
21	Kalimantan Tengah	14,53	63,26	97,35	3,10	23,74	35,89	10,83
22	Kalimantan Selatan	23,93	64,35	97,95	5,15	21,28	37,28	9,78
23	Kalimantan Timur	23,91	72,06	99,25	4,07	19,16	43,23	5,31
24	Kalimantan Utara	15,60	65,53	97,83	4,73	21,30	37,20	30,99
25	Sulawesi Utara	17,44	68,97	96,99	5,57	21,46	27,49	10,52
26	Sulawesi Tengah	10,10	55,38	94,46	6,59	22,66	33,47	13,37
27	Sulawesi Selatan	15,67	63,96	98,26	5,65	20,99	33,04	14,64
28	Sulawesi Tenggara	15,10	66,50	98,68	5,71	20,01	37,22	8,89
29	Gorontalo	14,44	53,75	97,72	11,63	25,70	31,56	4,35
30	Sulawesi Barat	14,29	55,76	96,96	6,61	23,98	32,30	10,75
31	Maluku	10,59	73,12	92,76	3,66	24,24	27,34	32,79
32	Maluku Utara	9,10	66,94	91,44	3,25	22,35	35,71	1,80
33	Papua Barat	10,10	59,52	87,72	2,93	19,71	26,57	11,42
34	Papua Barat Daya	12,43	70,17	88,34	4,33	19,91	31,73	11,42
35	Papua	19,44	69,21	85,26	4,85	16,08	35,24	3,91
36	Papua Selatan	6,26	44,91	64,64	4,85	27,94	22,81	3,91
37	Papua Tengah	3,83	32,71	44,36	2,68	12,55	28,84	3,91
38	Papua Pegunungan	1,05	24,93	21,58	1,89	11,97	11,23	3,91
39	Indonesia	17,31	63,03	97,25	6,80	25,56	37,52	10,77

Keterangan berdasarkan proses perolehan data penyusun IPP:

: Direct Estimation

: Pooling Data

: Klasterisasi Data

Lampiran 6b. Data Awal Indikator Penyusun IPP Metode Baru Tahun 2024 pada Domain 3 - 5

NO	PROVINSI	KETENAGAKERJAAN LAYAK			PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN			INKLUSIVITAS DAN GENDER		
		NEET Pemuda	Pekerja tidak penuh	Rasio Kewirausahaan pemuda	Pemuda mengikuti Kegiatan Sosmas	Pemuda aktif organisasi	Pemuda bekerja di posisi manajerial	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Perkawinan usia anak
1	Aceh	31,71	45,89	3,06	86,21	1,81	1,68	65,15	18,88	2,62
2	Sumatera Utara	23,94	37,71	1,21	76,82	6,00	1,37	72,97	21,53	1,81
3	Sumatera Barat	24,53	43,14	1,60	77,53	3,67	1,25	71,83	18,54	3,49
4	Riau	26,21	36,04	2,31	75,39	5,02	1,50	59,24	23,80	4,13
5	Jambi	25,47	35,69	1,47	87,55	3,58	0,91	60,17	39,35	7,80
6	Sumatera Selatan	26,44	41,66	0,89	73,95	4,21	1,02	62,02	16,42	8,45
7	Bengkulu	24,20	42,78	1,64	77,92	5,78	1,62	61,20	18,38	6,30
8	Lampung	27,00	42,92	1,29	79,24	4,33	0,89	64,48	11,50	4,87
9	Kepulauan Bangka Belitung	24,55	30,71	1,59	72,15	2,43	1,19	61,57	37,25	8,05
10	Kepulauan Riau	20,59	19,24	0,34	70,48	4,34	1,82	70,96	39,06	1,92
11	DKI Jakarta	19,32	12,88	1,24	67,69	3,63	1,47	77,64	17,66	1,68
12	Jawa Barat	27,01	26,38	1,07	78,45	4,71	1,35	67,14	20,95	5,78
13	Jawa Tengah	21,37	27,33	1,10	86,35	10,16	0,84	72,88	23,16	6,13
14	DI Yogyakarta	13,76	27,52	1,01	90,23	24,64	0,84	77,59	14,70	1,34
15	Jawa Timur	20,89	31,88	0,89	86,72	7,44	1,13	69,25	21,42	7,78
16	Banten	27,93	20,09	0,80	78,91	4,92	1,18	69,92	12,64	3,73
17	Bali	10,01	23,54	1,29	82,84	10,50	1,37	88,71	28,69	3,37
18	Nusa Tenggara Barat	18,31	49,55	0,85	91,84	3,82	0,96	73,68	16,05	14,96
19	Nusa Tenggara Timur	18,77	60,91	0,62	87,67	7,00	0,74	79,79	16,65	4,70
20	Kalimantan Barat	24,58	38,40	0,92	78,19	3,38	0,49	60,12	14,23	10,05
21	Kalimantan Tengah	25,27	28,95	1,49	79,79	2,23	2,45	57,29	16,57	9,89
22	Kalimantan Selatan	22,26	34,25	0,81	76,96	3,32	1,25	64,90	22,46	7,80
23	Kalimantan Timur	23,82	24,30	0,98	67,61	4,42	1,15	62,63	1,84	4,29
24	Kalimantan Utara	20,95	31,47	1,20	72,54	7,58	0,89	56,08	13,70	6,94
25	Sulawesi Utara	31,10	30,07	0,83	87,88	17,84	3,08	67,51	5,07	8,96
26	Sulawesi Tengah	22,41	35,85	1,16	85,61	5,59	1,75	62,51	25,97	9,06
27	Sulawesi Selatan	24,59	42,31	2,05	70,35	3,28	1,45	65,66	19,10	8,09
28	Sulawesi Tenggara	22,60	44,57	1,38	75,57	1,91	0,70	67,64	19,16	9,40
29	Gorontalo	23,98	32,96	0,87	84,15	5,83	0,97	65,36	35,90	7,34
30	Sulawesi Barat	22,57	55,37	0,45	80,08	9,59	0,79	60,68	30,32	10,71
31	Maluku	34,00	44,66	0,82	86,11	13,61	1,65	71,83	11,46	4,82
32	Maluku Utara	30,46	43,22	0,51	82,85	2,27	1,28	62,34	20,67	6,88
33	Papua Barat	27,78	44,15	0,50	81,41	7,16	0,53	73,85	16,31	4,90
34	Papua Barat Daya	29,61	40,82	0,53	83,38	6,62	2,41	67,47	21,39	3,40
35	Papua	30,32	37,55	0,46	86,43	10,62	3,37	73,27	10,55	2,70
36	Papua Selatan	23,52	41,07	0,30	92,07	4,15	0,75	73,74	30,58	14,40
37	Papua Tengah	28,69	44,81	0,20	89,83	5,82	0,60	71,21	46,49	9,05
38	Papua Pegunungan	11,94	56,50	0,07	85,06	0,24	0,11	97,99	74,47	6,60
39	Indonesia	23,78	32,90	1,13	80,67	6,16	1,19	69,04	20,04	5,90

Keterangan berdasarkan proses perolehan data penyusun IPP:

: Direct Estimation
 : Pooling Data
 : Klasterisasi Data

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024
1101 Kab. Simeulue	58,92	3213 Kab. Subang	69,37	6302 Kab. Kotabaru	57,24
1102 Kab. Aceh Singkil	60,17	3214 Kab. Purwakarta	58,30	6303 Kab. Banjar	62,65
1103 Kab. Aceh Selatan	61,93	3215 Kab. Karawang	63,35	6304 Kab. Barito Kuala	64,12
1104 Kab. Aceh Tenggara	57,06	3216 Kab. Bekasi	65,76	6305 Kab. Tapin	57,74
1105 Kab. Aceh Timur	57,99	3217 Kab. Bandung Barat	54,52	6306 Kab. Hulu Sungai Selatan	62,23
1106 Kab. Aceh Tengah	60,02	3218 Kab. Pangandaran	65,11	6307 Kab. Hulu Sungai Tengah	63,66
1107 Kab. Aceh Barat	65,59	3271 Kota Bogor	66,92	6308 Kab. Hulu Sungai Utara	67,59
1108 Kab. Aceh Besar	62,79	3272 Kota Sukabumi	67,97	6309 Kab. Tabalong	66,80
1109 Kab. Pidie	59,14	3273 Kota Bandung	72,96	6310 Kab. Tanah Bumbu	60,35
1110 Kab. Bireuen	69,82	3274 Kota Cirebon	73,27	6311 Kab. Balangan	66,80
1111 Kab. Aceh Utara	56,62	3275 Kota Bekasi	74,77	6371 Kota Banjarmasin	71,98
1112 Kab. Aceh Barat Daya	56,62	3276 Kota Depok	74,47	6372 Kota Banjarbaru	71,26
1113 Kab. Gayo Lues	57,28	3277 Kota Cimahi	69,39	6401 Kab. Paser	58,19
1114 Kab. Aceh Tamiang	60,98	3278 Kota Tasikmalaya	72,57	6402 Kab. Kutai Barat	63,53
1115 Kab. Nagan Raya	59,47	3279 Kota Banjar	67,41	6403 Kab. Kutai Kartanegara	63,09
1116 Kab. Aceh Jaya	65,34	3301 Kab. Cilacap	60,18	6404 Kab. Kutai Timur	60,28
1117 Kab. Bener Meriah	66,33	3302 Kab. Banyumas	63,26	6405 Kab. Berau	61,43
1118 Kab. Pidie Jaya	55,00	3303 Kab. Purbalingga	59,98	6409 Kab. Penajam Paser Utara	60,65
1171 Kota Banda Aceh	74,01	3304 Kab. Banjarnegara	56,60	6411 Kab. Mahakam Ulu	59,31
1172 Kota Sabang	69,85	3305 Kab. Kebumen	64,83	6471 Kota Balikpapan	69,45
1173 Kota Langsa	69,51	3306 Kab. Purworejo	67,96	6472 Kota Samarinda	69,02
1174 Kota Lhokseumawe	71,00	3307 Kab. Wonosobo	59,07	6474 Kota Bontang	64,77
1175 Kota Subulussalam	63,09	3308 Kab. Magelang	60,78	6501 Kab. Malinau	53,82
1201 Kab. Nias	65,84	3309 Kab. Boyolali	68,12	6502 Kab. Bulungan	59,46
1202 Kab. Mandailing Natal	60,53	3310 Kab. Klaten	68,13	6503 Kab. Tana Tidung	63,16
1203 Kab. Tapanuli Selatan	67,62	3311 Kab. Sukoharjo	74,11	6504 Kab. Nunukan	57,51
1204 Kab. Tapanuli Tengah	63,37	3312 Kab. Wonogiri	67,16	6571 Kota Tarakan	64,47
1205 Kab. Tapanuli Utara	67,11	3313 Kab. Karanganyar	70,34	7101 Kab. Bolaang Mongondow	62,23
1206 Kab. Toba	66,50	3314 Kab. Sragen	68,02	7102 Kab. Minahasa	72,81
1207 Kab. Labuhanbatu	61,61	3315 Kab. Grobogan	58,46	7103 Kab. Kepulauan Sangihe	62,16
1208 Kab. Asahan	62,98	3316 Kab. Blora	61,92	7104 Kab. Kepulauan Talaud	61,52
1209 Kab. Simalungun	66,88	3317 Kab. Rembang	64,06	7105 Kab. Minahasa Selatan	68,80
1210 Kab. Dairi	68,34	3318 Kab. Pati	69,03	7106 Kab. Minahasa Utara	72,22
1211 Kab. Karo	65,27	3319 Kab. Kudus	69,53	7107 Kab. Bolaang Mongondow Utara	63,98
1212 Kab. Deli Serdang	64,22	3320 Kab. Jepara	62,19	7108 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	65,85
1213 Kab. Langkat	62,62	3321 Kab. Demak	69,20	7109 Kab. Minahasa Tenggara	65,74
1214 Kab. Nias Selatan	65,65	3322 Kab. Semarang	72,96	7110 Kab. Bolaang Mongondow Selatan	61,57
1215 Kab. Humbang Hasundutan	74,49	3323 Kab. Temanggung	60,62	7111 Kab. Bolaang Mongondow Timur	55,22
1216 Kab. Pakpak Bharat	66,38	3324 Kab. Kendal	70,31	7171 Kota Manado	75,94
1217 Kab. Samosir	68,84	3325 Kab. Batang	61,09	7172 Kota Bitung	66,15

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024
1218 Kab. Serdang Bedagai	61,85	3326 Kab. Pekalongan	70,36	7173 Kota Tomohon	71,19
1219 Kab. Batu Bara	66,55	3327 Kab. Pematang	61,74	7174 Kota Kotamobagu	69,38
1220 Kab. Padang Lawas Utara	57,78	3328 Kab. Tegal	63,60	7201 Kab. Banggai Kepulauan	55,18
1221 Kab. Padang Lawas	70,22	3329 Kab. Brebes	57,40	7202 Kab. Banggai	63,62
1222 Kab. Labuhanbatu Selatan	64,12	3371 Kota Magelang	69,48	7203 Kab. Morowali	63,03
1223 Kab. Labuhanbatu Utara	64,91	3372 Kota Surakarta	70,21	7204 Kab. Poso	62,99
1224 Kab. Nias Utara	64,98	3373 Kota Salatiga	71,26	7205 Kab. Donggala	60,41
1225 Kab. Nias Barat	60,60	3374 Kota Semarang	73,86	7206 Kab. Toli Toli	59,10
1271 Kota Sibolga	63,71	3375 Kota Pekalongan	68,82	7207 Kab. Buol	59,52
1272 Kota Tanjung Balai	62,20	3376 Kota Tegal	68,68	7208 Kab. Parigi Moutong	57,52
1273 Kota Pematangsiantar	65,38	3401 Kab. Kulon Progo	70,80	7209 Kab. Tojo Una Una	60,47
1274 Kota Tebing Tinggi	69,32	3402 Kab. Bantul	76,15	7210 Kab. Sigi	62,91
1275 Kota Medan	69,79	3403 Kab. Gunungkidul	68,39	7211 Kab. Banggai Laut	57,55
1276 Kota Binjai	70,76	3404 Kab. Sleman	81,75	7212 Kab. Morowali Utara	63,22
1277 Kota Padang Sidempuan	66,60	3471 Kota Yogyakarta	78,56	7271 Kota Palu	72,45
1278 Kota Gunungsitoli	69,55	3501 Kab. Pacitan	62,31	7301 Kab. Kepulauan Selayar	66,93
1301 Kab. Kepulauan Mentawai	53,16	3502 Kab. Ponorogo	65,70	7302 Kab. Bulukumba	61,48
1302 Kab. Pesisir Selatan	58,79	3503 Kab. Trenggalek	63,15	7303 Kab. Bantaeng	59,27
1303 Kab. Solok	63,16	3504 Kab. Tulungagung	66,13	7304 Kab. Jeneponto	58,57
1304 Kab. Sijunjung	58,78	3505 Kab. Blitar	64,43	7305 Kab. Takalar	63,91
1305 Kab. Tanah Datar	67,07	3506 Kab. Kediri	67,88	7306 Kab. Gowa	61,11
1306 Kab. Padang Pariaman	62,56	3507 Kab. Malang	61,34	7307 Kab. Sinjai	57,95
1307 Kab. Agam	62,57	3508 Kab. Lumajang	55,81	7308 Kab. Maros	60,20
1308 Kab. Lima Puluh Kota	60,88	3509 Kab. Jember	55,67	7309 Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	64,96
1309 Kab. Pasaman	54,65	3510 Kab. Banyuwangi	67,43	7310 Kab. Barru	67,13
1310 Kab. Solok Selatan	62,63	3511 Kab. Bondowoso	55,43	7311 Kab. Bone	58,78
1311 Kab. Dharmasraya	58,05	3512 Kab. Situbondo	61,99	7312 Kab. Soppeng	61,85
1312 Kab. Pasaman Barat	62,76	3513 Kab. Probolinggo	57,99	7313 Kab. Wajo	63,65
1371 Kota Padang	65,77	3514 Kab. Pasuruan	60,50	7314 Kab. Sidenreng Rappang	64,19
1372 Kota Solok	64,63	3515 Kab. Sidoarjo	70,03	7315 Kab. Pinrang	64,32
1373 Kota Sawahlunto	71,89	3516 Kab. Mojokerto	68,16	7316 Kab. Enrekang	59,40
1374 Kota Padang Panjang	69,77	3517 Kab. Jombang	68,80	7317 Kab. Luwu	64,34
1375 Kota Bukittinggi	69,82	3518 Kab. Nganjuk	67,98	7318 Kab. Tana Toraja	55,89
1376 Kota Payakumbuh	71,63	3519 Kab. Madiun	74,02	7322 Kab. Luwu Utara	53,77
1377 Kota Pariaman	70,44	3520 Kab. Magetan	68,48	7325 Kab. Luwu Timur	56,90
1401 Kab. Kuantan Singingi	66,69	3521 Kab. Ngawi	71,44	7326 Kab. Toraja Utara	63,75
1402 Kab. Indragiri Hulu	58,29	3522 Kab. Bojonegoro	65,64	7371 Kota Makassar	75,13
1403 Kab. Indragiri Hilir	58,82	3523 Kab. Tuban	69,82	7372 Kota Parepare	75,81
1404 Kab. Pelalawan	65,59	3524 Kab. Lamongan	69,51	7373 Kota Palopo	66,47
1405 Kab. Siak	64,54	3525 Kab. Gresik	67,97	7401 Kab. Buton	60,93
1406 Kab. Kampar	62,68	3526 Kab. Bangkalan	54,87	7402 Kab. Muna	63,84

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024
1407 Kab. Rokan Hulu	65,10	3527 Kab. Sampang	58,40	7403 Kab. Konawe	62,62
1408 Kab. Bengkalis	61,39	3528 Kab. Pamekasan	58,34	7404 Kab. Kolaka	69,78
1409 Kab. Rokan Hilir	54,09	3529 Kab. Sumenep	61,14	7405 Kab. Konawe Selatan	60,59
1410 Kab. Kepulauan Meranti	58,79	3571 Kota Kediri	70,71	7406 Kab. Bombana	60,50
1471 Kota Pekanbaru	72,77	3572 Kota Blitar	67,16	7407 Kab. Wakatobi	62,70
1473 Kota Dumai	67,86	3573 Kota Malang	77,41	7408 Kab. Kolaka Utara	62,76
1501 Kab. Kerinci	64,09	3574 Kota Probolinggo	68,94	7409 Kab. Buton Utara	59,29
1502 Kab. Merangin	64,51	3575 Kota Pasuruan	67,05	7410 Kab. Konawe Utara	61,22
1503 Kab. Sarolangun	60,05	3576 Kota Mojokerto	75,90	7411 Kab. Kolaka Timur	60,44
1504 Kab. Batanghari	60,06	3577 Kota Madiun	75,42	7412 Kab. Konawe Kepulauan	62,59
1505 Kab. Muaro Jambi	66,62	3578 Kota Surabaya	77,40	7413 Kab. Muna Barat	60,52
1506 Kab. Tanjung Jabung Timur	58,55	3579 Kota Batu	67,34	7414 Kab. Buton Tengah	57,27
1507 Kab. Tanjung Jabung Barat	64,10	3601 Kab. Pandeglang	59,54	7415 Kab. Buton Selatan	63,78
1508 Kab. Tebo	58,67	3602 Kab. Lebak	58,30	7471 Kota Kendari	68,77
1509 Kab. Bungo	59,49	3603 Kab. Tangerang	63,95	7472 Kota Bau Bau	66,61
1571 Kota Jambi	73,95	3604 Kab. Serang	60,49	7501 Kab. Boalemo	59,91
1572 Kota Sungai Penuh	70,67	3671 Kota Tangerang	71,08	7502 Kab. Gorontalo	61,95
1601 Kab. Ogan Komering Ulu	59,13	3672 Kota Cilegon	69,50	7503 Kab. Pohuwato	59,68
1602 Kab. Ogan Komering Ilir	57,46	3673 Kota Serang	62,40	7504 Kab. Bone Bolango	63,85
1603 Kab. Muara Enim	57,52	3674 Kota Tangerang Selatan	74,22	7505 Kab. Gorontalo Utara	59,74
1604 Kab. Lahat	58,10	5101 Kab. Jembrana	68,63	7571 Kota Gorontalo	69,92
1605 Kab. Musi Rawas	59,42	5102 Kab. Tabanan	80,30	7601 Kab. Majene	65,20
1606 Kab. Musi Banyuasin	60,96	5103 Kab. Badung	82,27	7602 Kab. Polewali Mandar	65,01
1607 Kab. Banyuasin	56,84	5104 Kab. Gianyar	80,69	7603 Kab. Mamasa	57,77
1608 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	54,75	5105 Kab. Klungkung	74,07	7604 Kab. Mamuju	60,34
1609 Kab. Ogan Komering Ulu Timur	59,17	5106 Kab. Bangli	75,87	7605 Kab. Mamuju Utara	55,15
1610 Kab. Ogan Ilir	61,66	5107 Kab. Karangasem	73,19	7606 Kab. Mamuju Tengah	54,86
1611 Kab. Empat Lawang	57,73	5108 Kab. Buleleng	68,00	8101 Kab. Kepulauan Tanimbar	54,16
1612 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	55,98	5171 Kota Denpasar	77,70	8102 Kab. Maluku Tenggara	58,32
1613 Kab. Musi Rawas Utara	53,45	5201 Kab. Lombok Barat	60,13	8103 Kab. Maluku Tengah	58,99
1671 Kota Palembang	65,78	5202 Kab. Lombok Tengah	59,08	8104 Kab. Buru	58,31
1672 Kota Prabumulih	64,87	5203 Kab. Lombok Timur	60,95	8105 Kab. Kepulauan Aru	50,80
1673 Kota Pagar Alam	61,47	5204 Kab. Sumbawa	62,78	8106 Kab. Seram Bagian Barat	61,06
1674 Kota Lubuk Linggau	64,30	5205 Kab. Dompu	61,52	8107 Kab. Seram Bagian Timur	57,24
1701 Kab. Bengkulu Selatan	63,02	5206 Kab. Bima	67,41	8108 Kab. Maluku Barat Daya	53,82
1702 Kab. Rejang Lebong	60,52	5207 Kab. Sumbawa Barat	62,05	8109 Kab. Buru Selatan	57,19
1703 Kab. Bengkulu Utara	61,93	5208 Kab. Lombok Utara	58,87	8171 Kota Ambon	75,27
1704 Kab. Kaur	59,46	5271 Kota Mataram	66,16	8172 Kota Tual	68,44
1705 Kab. Seluma	71,06	5272 Kota Bima	64,14	8201 Kab. Halmahera Barat	60,15
1706 Kab. Muko Muko	61,21	5301 Kab. Sumba Barat	58,61	8202 Kab. Halmahera Tengah	59,69

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024
1707 Kab. Lebong	57,13	5302 Kab. Sumba Timur	54,71	8203 Kab. Kepulauan Sula	59,55
1708 Kab. Kepahiang	57,87	5303 Kab. Kupang	57,26	8204 Kab. Halmahera Selatan	55,33
1709 Kab. Bengkulu Tengah	63,25	5304 Kab Timor Tengah Selatan	60,43	8205 Kab. Halmahera Utara	63,64
1771 Kota Bengkulu	75,60	5305 Kab. Timor Tengah Utara	60,40	8206 Kab. Halmahera Timur	60,77
1801 Kab. Lampung Barat	62,53	5306 Kab. Belu	56,13	8207 Kab. Pulau Morotai	58,17
1802 Kab. Tanggamus	55,24	5307 Kab. Alor	57,03	8208 Kab. Pulau Taliabu	67,85
1803 Kab. Lampung Selatan	60,22	5308 Kab. Lembata	55,66	8271 Kota Ternate	71,25
1804 Kab. Lampung Timur	58,42	5309 Kab. Flores Timur	58,32	8272 Kota Tidore Kepulauan	62,15
1805 Kab. Lampung Tengah	58,38	5310 Kab. Sikka	60,75	9101 Kab. Fak Fak	61,24
1806 Kab. Lampung Utara	57,93	5311 Kab. Ende	58,92	9102 Kab. Kaimana	58,42
1807 Kab. Way Kanan	54,29	5312 Kab. Ngada	58,52	9103 Kab. Teluk Wondama	58,62
1808 Kab. Tulang Bawang	56,56	5313 Kab. Manggarai	59,71	9104 Kab. Teluk Bintuni	60,01
1809 Kab. Pesawaran	60,71	5314 Kab. Rote Ndao	60,87	9105 Kab. Manokwari	59,46
1810 Kab. Pringsewu	60,20	5315 Kab. Manggarai Barat	54,98	9111 Kab. Manokwari Selatan	58,41
1811 Kab. Mesuji	52,96	5316 Kab. Sumba Tengah	54,68	9112 Kab. Pegunungan Arfak	57,13
1812 Kab. Tulang Bawang Barat	56,74	5317 Kab. Sumba Barat Daya	54,62	9201 Kab. Raja Ampat	52,65
1813 Kab. Pesisir Barat	57,07	5318 Kab. Nagekeo	62,66	9202 Kab. Sorong	63,40
1871 Kota Bandar Lampung	66,74	5319 Kab. Manggarai Timur	58,29	9203 Kab. Sorong Selatan	56,38
1872 Kota Metro	68,84	5320 Kab. Sabu Raijua	58,99	9204 Kab. Maybrat	66,43
1901 Kab. Bangka	71,84	5321 Kab. Malaka	58,48	9205 Kab. Tambrauw	61,44
1902 Kab. Belitung	64,13	5371 Kota Kupang	73,49	9271 Kota Sorong	66,39
1903 Kab. Bangka Barat	60,07	6101 Kab. Sambas	53,40	9403 Kab. Jayapura	70,74
1904 Kab. Bangka Tengah	67,94	6102 Kab. Bengkayang	56,33	9408 Kab. Kepulauan Yapen	60,57
1905 Kab. Bangka Selatan	62,69	6103 Kab. Landak	57,06	9409 Kab. Biak Numfor	65,38
1906 Kab. Belitung Timur	67,00	6104 Kab. Mempawah	62,32	9419 Kab. Sarmi	54,70
1971 Kota Pangkal Pinang	71,17	6105 Kab. Sanggau	53,78	9420 Kab. Keerom	57,28
2101 Kab. Karimun	73,60	6106 Kab. Ketapang	60,19	9426 Kab. Waropen	60,50
2102 Kab. Bintan	71,53	6107 Kab. Sintang	62,88	9427 Kab. Supiori	60,79
2103 Kab. Natuna	76,17	6108 Kab. Kapuas Hulu	59,06	9428 Kab. Mamberamo Raya	46,71
2104 Kab. Lingga	68,08	6109 Kab. Sekadau	60,59	9471 Kota Jayapura	74,91
2105 Kab. Kepulauan Anambas	76,18	6110 Kab. Melawi	56,48	9501 Kab. Merauke	65,13
2171 Kota Batam	73,91	6111 Kab. Kayong Utara	57,31	9502 Kab. Boven Digoel	56,83
2172 Kota Tanjung Pinang	80,06	6112 Kab. Kubu Raya	56,72	9503 Kab. Mappi	51,09
3101 Kab. Adm. Kep. Seribu	61,81	6171 Kota Pontianak	64,56	9504 Kab. Asmat	55,83
3171 Kota Adm. Jakarta Selatan	73,86	6172 Kota Singkawang	60,23	9601 Kab. Mimika	73,40
3172 Kota Adm. Jakarta Timur	70,59	6201 Kab. Kotawaringin Barat	64,32	9602 Kab. Dogiyai	61,31
3173 Kota Adm. Jakarta Pusat	66,66	6202 Kab. Kotawaringin Timur	61,62	9603 Kab. Deiyai	51,31
3174 Kota Adm. Jakarta Barat	64,67	6203 Kab. Kapuas	61,28	9604 Kab. Nabire	81,09
3175 Kota Adm. Jakarta Utara	68,16	6204 Kab. Barito Selatan	61,96	9605 Kab. Paniai	49,87
3201 Kab. Bogor	61,58	6205 Kab. Barito Utara	59,86	9606 Kab. Intan Jaya	55,33

Lampiran 7. Capaian IPP Kabupaten / Kota Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024	Kabupaten/Kota	Capaian IPP Tahun 2024
3202 Kab. Sukabumi	56,89	6206 Kab. Sukamara	65,69	9607 Kab. Puncak	56,03
3203 Kab. Cianjur	60,43	6207 Kab. Lamandau	65,25	9608 Kab. Puncak Jaya	60,86
3204 Kab. Bandung	59,01	6208 Kab. Seruyan	59,73	9701 Kab. Nduga	59,07
3205 Kab. Garut	62,65	6209 Kab. Katingan	67,33	9702 Kab. Jayawijaya	62,25
3206 Kab. Tasikmalaya	65,89	6210 Kab. Pulang Pisau	59,89	9703 Kab. Lanny Jaya	62,34
3207 Kab. Ciamis	67,84	6211 Kab. Gunung Mas	63,23	9704 Kab. Tolikara	56,46
3208 Kab. Kuningan	62,59	6212 Kab. Barito Timur	62,27	9705 Kab. Mamberamo Tengah	61,75
3209 Kab. Cirebon	63,40	6213 Kab. Murung Raya	55,09	9706 Kab. Yalimo	64,80
3210 Kab. Majalengka	61,63	6271 Kota Palangkaraya	75,91	9707 Kab. Yahukimo	57,22
3211 Kab. Sumedang	67,19	6301 Kab. Tanah Laut	62,13	9708 Kab. Pegunungan Bintang	58,10
3212 Kab. Indramayu	63,40				

Keterangan :

: Di atas capaian nasional
 : Sama dengan capaian nasional
 : Di bawah capaian nasional

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

[illegible]

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

[illegible]

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

[illegible]

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

[illegible]

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

Kabupaten Kota	D1		D2		D3		D4		D5							
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16
7472 Kota Bau Bau	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7501 Kab. Boalemo	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7502 Kab. Gorontalo	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7503 Kab. Pohuwato	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7504 Kab. Bone Bolango	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7505 Kab. Gorontalo Utara	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7571 Kota Gorontalo	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7601 Kab. Majene	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7602 Kab. Polewali Mandar	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7603 Kab. Mamasa	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7604 Kab. Mamuju	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7605 Kab. Mamuju Utara	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
7606 Kab. Mamuju Tengah	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8101 Kab. Kepulauan Tanimbar	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8102 Kab. Maluku Tenggara	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8103 Kab. Maluku Tengah	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8104 Kab. Buru	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8105 Kab. Kepulauan Aru	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8106 Kab. Seram Bagian Barat	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8107 Kab. Seram Bagian Timur	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8108 Kab. Maluku Barat Daya	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8109 Kab. Buru Selatan	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8171 Kota Amben	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8172 Kota Tual	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8201 Kab. Halmahera Barat	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8202 Kab. Halmahera Tengah	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8203 Kab. Kepulauan Sula	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8204 Kab. Halmahera Selatan	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8205 Kab. Halmahera Utara	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8206 Kab. Halmahera Timur	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8207 Kab. Pulau Morotai	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8208 Kab. Pulau Taliabu	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8271 Kota Ternate	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
8272 Kota Tidore Kepulauan	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9101 Kab. Fak Fak	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9102 Kab. Kaimana	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9103 Kab. Teluk Wondama	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9104 Kab. Teluk Bintuni	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9105 Kab. Manokwari	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9111 Kab. Manokwari Selatan	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9112 Kab. Pegunungan Arfak	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9201 Kab. Raja Ampat	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9202 Kab. Sorong	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9203 Kab. Sorong Selatan	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9204 Kab. Maybrat	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9205 Kab. Tambora	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9271 Kota Sorong	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9403 Kab. Jayapura	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9408 Kab. Kepulauan Yapen	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9409 Kab. Biak Numfor	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9419 Kab. Sarmi	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9420 Kab. Keerom	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9426 Kab. Waropen	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9427 Kab. Supiori	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9428 Kab. Mamberamo Raya	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9471 Kota Jayapura	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9501 Kab. Merauke	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9502 Kab. Boven Digoel	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9503 Kab. Mappi	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9504 Kab. Asmat	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9601 Kab. Mimika	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9602 Kab. Dogiyai	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9603 Kab. Delai	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9604 Kab. Nabire	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9605 Kab. Paniai	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9606 Kab. Intan Jaya	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9607 Kab. Puncak	Projecting	Projecting	Direct Estimation	Projecting	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9608 Kab. Puncak Jaya	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9701 Kab. Nduga	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation
9702 Kab. Jayawijaya	Projecting	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Interpretation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation	Projector Estimation

Lampiran 8a. Rincian Metodologi Perolehan Sumber Data pada masing-masing Indikator pada Kabupaten/Kota Tahun 2024 (Lanjutan)

Kabupaten Kota	D1			D2			D3			D4			D5			
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16
9703 Kab. Lanny Jaya	Pooling	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Clustering
9704 Kab. Tolikara	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Pooling	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Clustering
9705 Kab. Mamberamo Tengah	Clustering	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Clustering
9706 Kab. Yalimo	Clustering	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Clustering
9707 Kab. Yahukimo	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Pooling
9708 Kab. Pegunungan Bintang	Pooling	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Direct Estimation	Projection Estimation	Interpolation	Direct Estimation	Direct Estimation	Clustering	Projection Estimation	Clustering	Clustering	Direct Estimation	Imputasi Provinsi	Direct Estimation

Keterangan

	: Direct Estimation		: Pooling		: Clustering
	: Projection Estimation		: Interpolation		: Imputasi dengan angka Provinsi
	: Imputasi angka maksimal				

Lampiran 8b. Rekapitulasi Metode Perolehan Sumber Data dan Data Ekstrem

No	Indikator	Metode Perolehan Sumber Data	Data Ekstrem
1.	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	☒ <i>Direct Estimation</i> : 496 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 8 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 10 Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih, Kota Tanjung Pinang, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kab. Tabanan, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Bangli, Kota Banjarbaru
2.	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	☒ <i>Direct Estimation</i> : 513 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 1 Kabupaten/Kota	Kab. Wonosobo, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Nduga, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang
3.	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	☒ <i>Direct Estimation</i> : 509 Kabupaten/Kota ☒ <i>Imputasi</i> menggunakan batas batas atas Kab/Kota di Provinsi : 5 Kabupaten/Kota	Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mappi, Kab. Asmat, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang
4.	Angka kesakitan pemuda	☒ <i>Direct Estimation</i> : 494 Kabupaten/Kota ☒ <i>pooling</i> : 17 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 3 Kabupaten / Kota	Kab. Tanah Datar, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumba Timur, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Bantaeng, Kab. Muna Barat, Kab. Pohuwato
5.	Persentase pemuda yang merokok	☒ <i>Direct Estimation</i> : 514 Kabupaten/Kota	Kab. Empat Lawang, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yahukimo
6.	Persentase pemuda yang berolahraga	☒ <i>Projection estimation</i> : 514 Kabupaten/Kota Data tahun 2024 tidak tersedia hingga level Kabupaten/Kota sehingga dilakukan estimasi proyeksi (<i>projection estimation</i>).	Kota Jambi, Kota Pangkal Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Palangkaraya, Kab. Nduga, Kab. Yahukimo
7.	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	☒ <i>Interpolation</i> : 514 Kabupaten/Kota Data tahun 2024 tidak tersedia sehingga dilakukan interpolasi pada 514 Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Dharmasraya, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hilir, Kab. Adm. Kep. Seribu, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Utara, Kab. Wonosobo, Kab. Probolinggo, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan, Kab. Tambora
8.	Persentase pemuda NEET	☒ <i>Direct Estimation</i> : 514 Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie Jaya, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Sarmi, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Deiyai, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya

Lampiran 8b. Rekapitulasi Metode Perolehan Sumber Data dan Data Ekstrem (Lanjutan)

No	Indikator	Metode Perolehan Sumber Data	Data Ekstrem
9.	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	☒ <i>Direct Estimation</i> : 513 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 1 Kabupaten/Kota (Kab. Tanjung Jabung Barat)	Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Malaka, Kab. Maybrat
10.	Rasio kewirausahaan pemuda	☒ <i>Direct Estimation</i> : 85 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 259 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 170 Kabupaten/Kota	Kab. Bireuen, Kota Sabang, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Pangkajene Dan Kepulauan, Kab. Muna, Kota Tual
11.	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	☒ <i>Projection estimation</i> : 501 Kabupaten/Kota ☒ <i>Imputasi</i> menggunakan batas bawah dan batas atas Kab/Kota di Provinsi : 13 Kabupaten/Kota Data tahun 2024 tidak tersedia hingga level Kabupaten/Kota sehingga dilakukan estimasi proyeksi (<i>projection estimation</i>).	Kota Bukittinggi, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kota Pangkal Pinang, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Bau Bau, Kota Ternate
12.	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	☒ <i>Projection estimation</i> : 458 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 56 Kabupaten/Kota *Data tahun 2024 tidak tersedia hingga level Kabupaten/Kota sehingga dilakukan estimasi proyeksi (<i>projection estimation</i>), data klusterisasi merupakan data hasil <i>projection estimation</i> yang dilakukan <i>clustering</i>	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman, Kota Yogyakarta, Kab. Tabanan, Kab. Karangasem, Kab. Minahasa, Kab. Kepulauan Sangihe, Kab. Minahasa Selatan, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kota Ambon, Kab. Mimika, Kab. Nabire
13.	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	☒ <i>Direct Estimation</i> : 84 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 249 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 181 Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Barat, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Bengkulu, Kab. Kepulauan Anambas, Kab. Sukoharjo, Kota Malang, Kab. Gunung Mas, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Makassar, Kota Tual, Kab. Biak Numfor, Kab. Waropen
14.	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	☒ <i>Direct Estimation</i> : 514 Kabupaten/Kota	Kab. Nias, Kab. Morowali, Kab. Maybrat, Kab. Nduga, Kab. Yalimo
15.	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	☒ <i>Direct Estimation</i> : 58 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 60 Kabupaten/Kota ☒ <i>Imputasi</i> menggunakan data provinsi : 377 Kabupaten/Kota ☒ <i>Imputasi</i> menggunakan batas bawah dan batas atas Kab/Kota di Provinsi : 19 Kabupaten/Kota	Kota Subulussalam, Kab. Serdang Bedagai, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kerinci, Kab. Batanghari, Kota Jambi, Kab. Bangka, Kab. Luwu, Kab. Toraja Utara, Kota Parepare, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Nduga, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Yahukimo, Kab. Pegunungan Bintang

Lampiran 8b. Rekapitulasi Metode Perolehan Sumber Data dan Data Ekstrem (Lanjutan)

No	Indikator	Metode Perolehan Sumber Data	Data Ekstrem
16.	Persentase perkawinan anak	☒ <i>Direct Estimation</i> : 216 Kabupaten/Kota ☒ <i>Pooling</i> : 166 Kabupaten/Kota ☒ <i>Clustering</i> : 132 Kabupaten/Kota	Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Wonosobo, Kab. Blora, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Sanggau, Kab. Banggai Laut, Kab. Luwu Timur, Kab. Pegunungan Bintang

Keterangan :

1. *Direct Estimation* dipakai untuk data yang memiliki *Relative Standard Error* (RSE) < 50
2. Data yang memiliki *Relative Standard Error* (RSE) > 50 dilakukan *Pooling* dan kemudian di hitung kembali *Relative Standard Error* (RSE)
3. Data yang memiliki *Relative Standard Error* (RSE) > 50 setelah dilakukan *Pooling*, selanjutnya dilakukan Imputasi menggunakan *Clustering*
4. Indikator Persentase Pemuda Penyandang Disabilitas yang bekerja dilakukan Imputasi dengan menggunakan nilai Provinsinya masing-masing, hal ini karena banyaknya Kab/Kota yang memiliki RSE > 50 setelah dilakukan *Pooling* sangat banyak
5. Hasil Imputasi menggunakan Batas Atas pada Kab/Kota di masing-masing provinsi merupakan data yang memiliki nilai 100% pada hasil *Direct Estimation* maupun *Pooling*
6. Data ekstrem merupakan data yang memiliki tren lebih besar dari rerata ditambah 2,5 standar deviasi
7. Mekanisme Estimasi Indikator Pembentuk IPP dilakukan hingga tahapan pengukuran data ekstrem dan proses *ground checking* tidak dilakukan dengan pertimbangan tertentu tanpa melewati proses lainnya



KEMENPORA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

